



MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

**Konsultasi Regional dalam Rangka Penyusunan Konsep Rancangan Awal RPJMN 2020-2024
20-21 Agustus 2019**

1. Kondisi saat ini

2. *Overview* RPJMN 2020-2024 Kewilayahan

3. Arahana Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan

4. Strategi Pembangunan Provinsi di Pulau Kalimantan



1. Kondisi saat ini

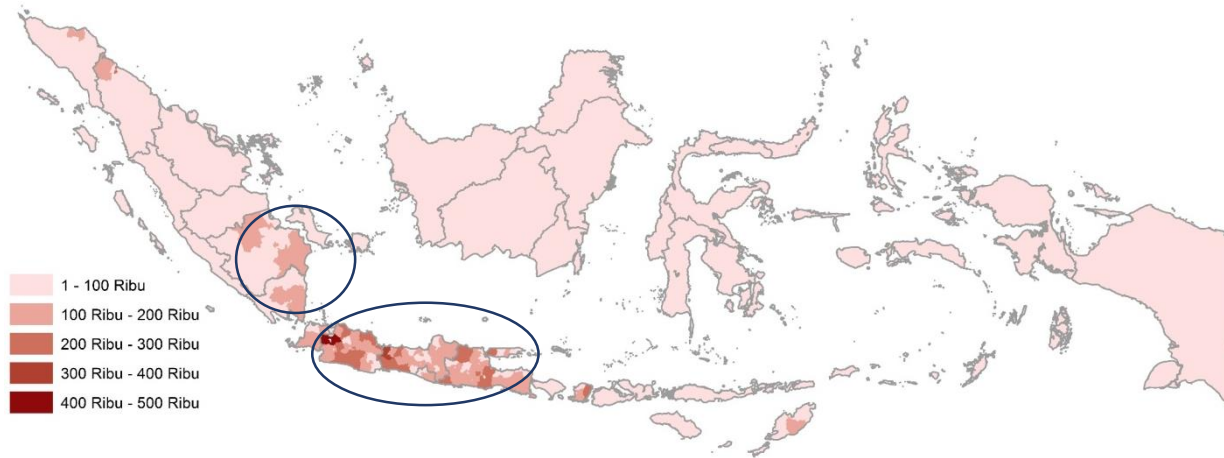
CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019

No.	Indikator	Capaian Kumulatif 2015-2018	Sasaran RPJMN 2015-2019
A. Pembangunan Wilayah			
1	Penurunan Desa Tertinggal (Desa)	6.518	5.000
2	Peningkatan Desa Mandiri (Desa)	2.665	2.000
3	Kabupaten Daerah Tertinggal Terentaskan (Kabupaten)	59 (daerah tertinggal potensi terentaskan tahun 2018)	80
4	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	17,41 (2018)	15-15,6
5	Rata-rata IPM di Daerah Tertinggal	61,99 (2018)	62,78
B. Pemerataan Pembangunan			
1	KEK di Luar Jawa (Lokasi)	11	11
2	Penguatan 39 Pusat Pertumbuhan sebagai PKL/PKW (Kawasan)	39	39
3	Optimalisasi 20 kota sedang di luar Jawa sebagai PKN/PKW (kawasan)	15	20
4	Inkubasi Kota Baru	9	11
5	Sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	11.969.998	7.115.765
C. Kontribusi Antar-Pulau			
1	Peran Sumatera dalam PDB Nasional (%)	21,5	24,6
2	Peran Jawa dalam PDB Nasional (%)	58,3	55,1
3	Peran Bali-Nusra dalam PDB Nasional (%)	3,0	2,6
4	Peran Kalimantan dalam PDB Nasional (%)	8,1	9,6
5	Peran Sulawesi dalam PDB Nasional (%)	6,3	5,2
6	Peran Maluku-Papua dalam PDB Nasional (%)	2,6	2,9

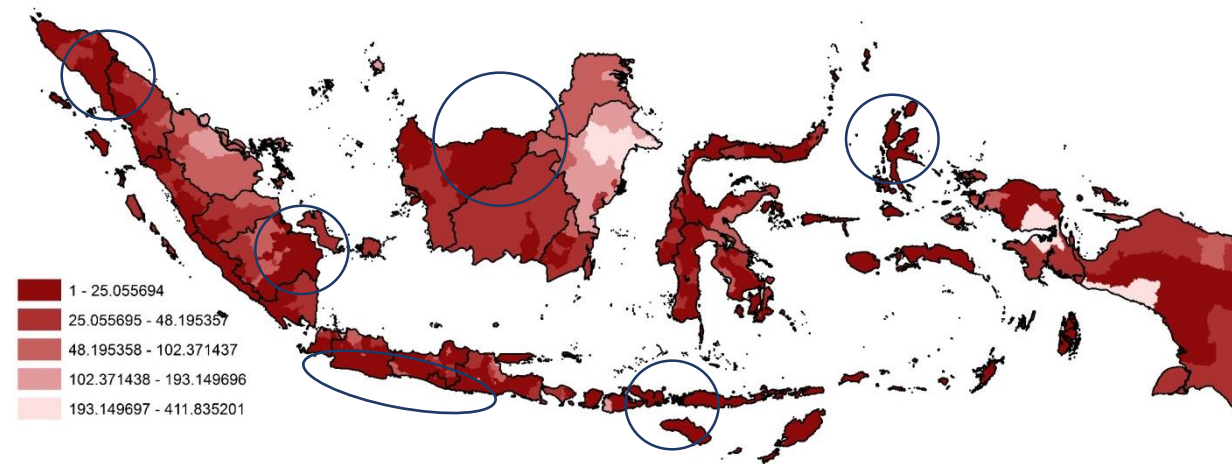
- Sebagian indikator **telah tercapai**
- Beberapa indikator lain **prospektif untuk dicapai** hingga akhir tahun 2019

TINGKAT KEMISKINAN

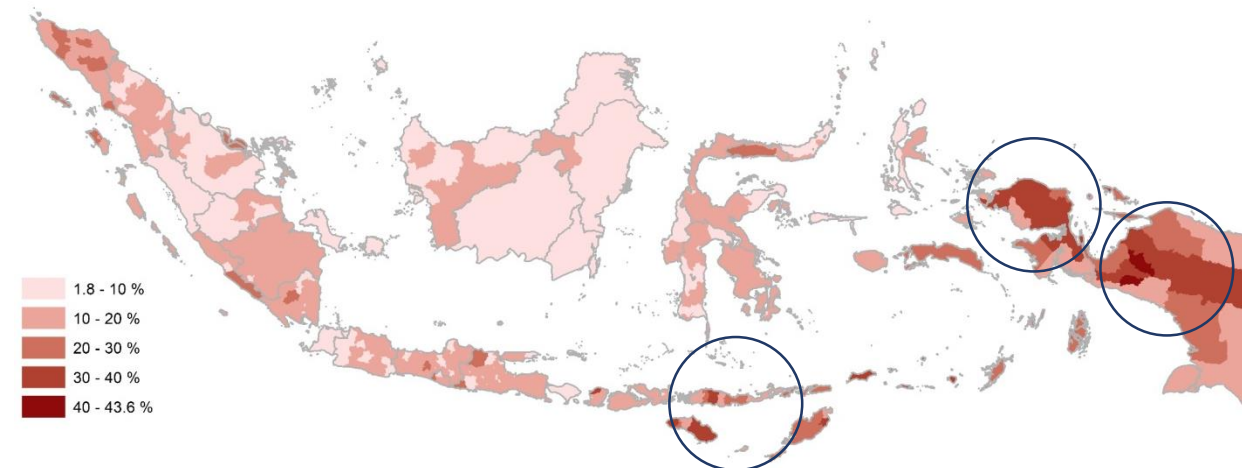
JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2017



PDRB PER KAPITA ADHK (Rp. Juta)

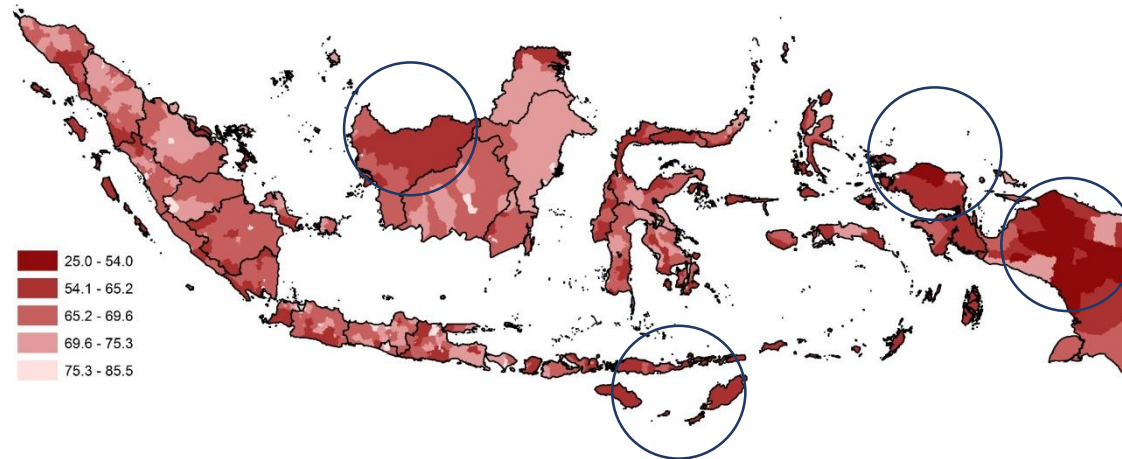


PERSENTASE KEMISKINAN 2017

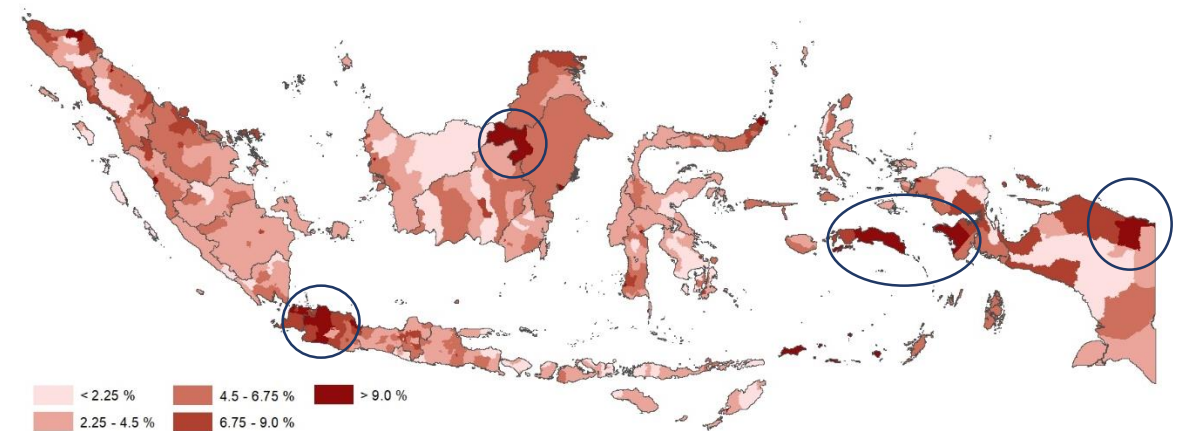


Penyediaan pelayanan dasar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pemenuhan SPM bidang pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar yang sebaiknya difokuskan pada wilayah berwarna GELAP

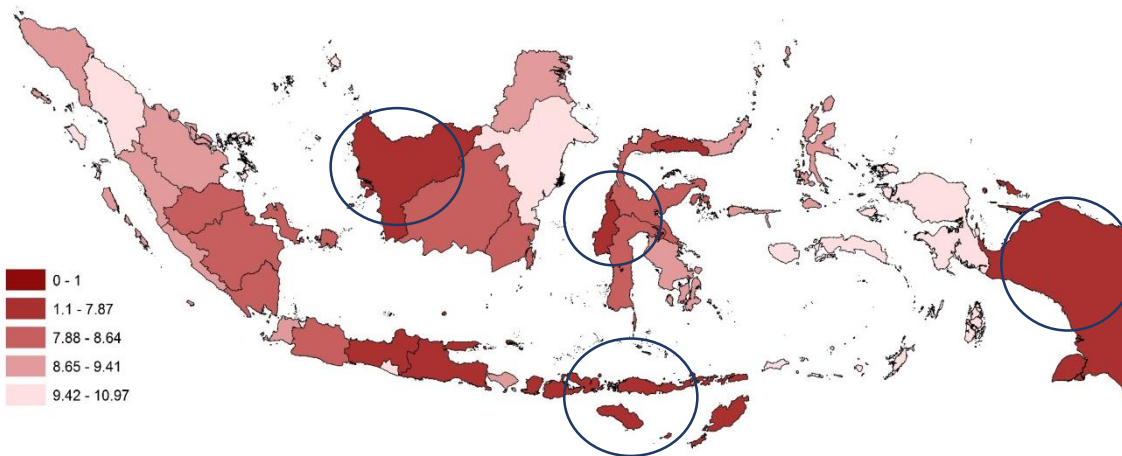
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2017



PERSENTASE PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA 2017

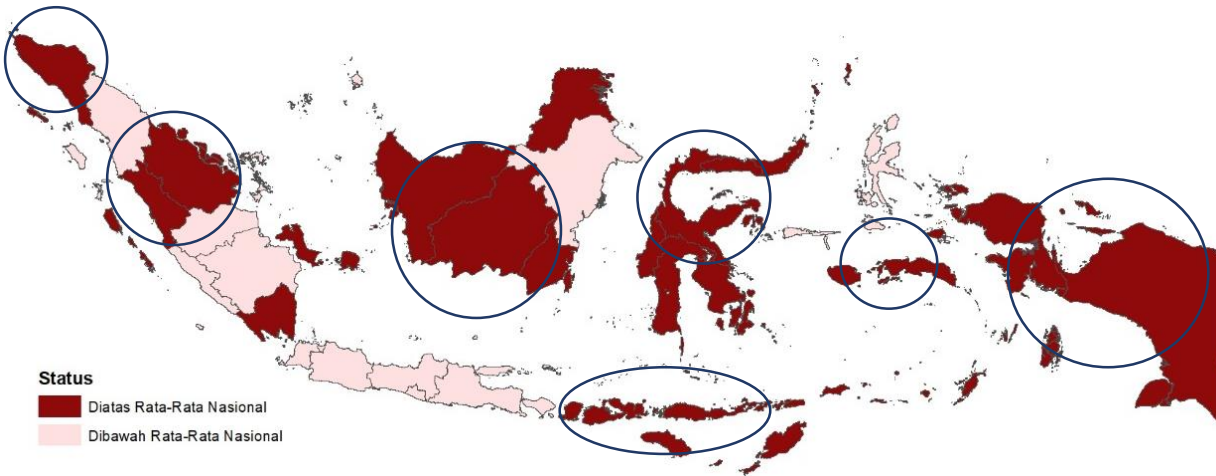


ANGKA LAMA SEKOLAH 2017

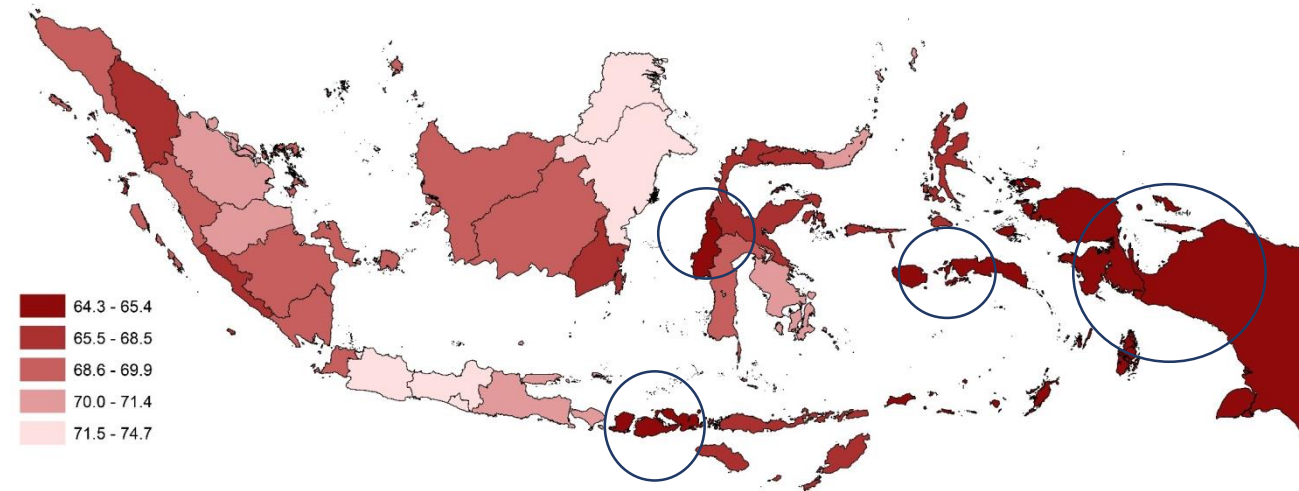


Prioritas pemenuhan SPM bidang pendidikan difokuskan pada wilayah yang berwarna GELAP

PERSENTASE STUNTING 0-59 BULAN PER PROVINSI 2017



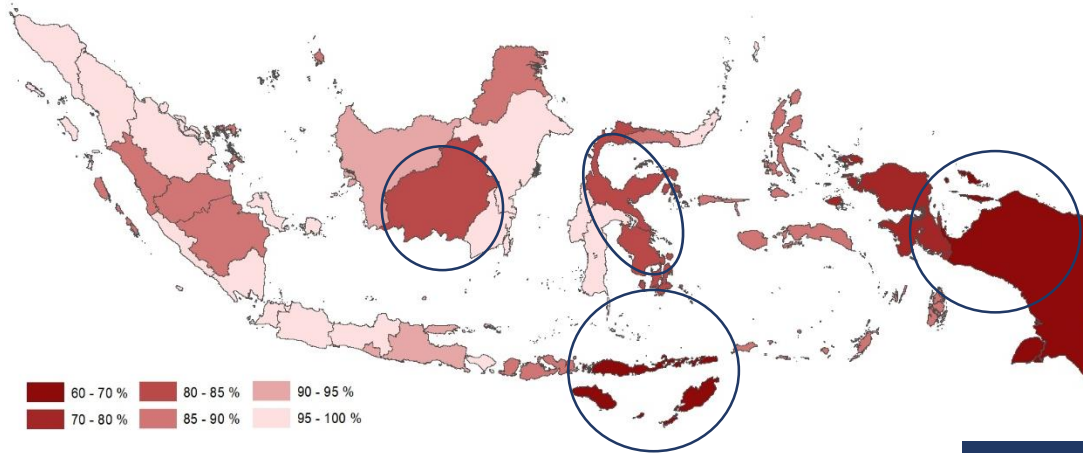
ANGKA HARAPAN HIDUP 2017



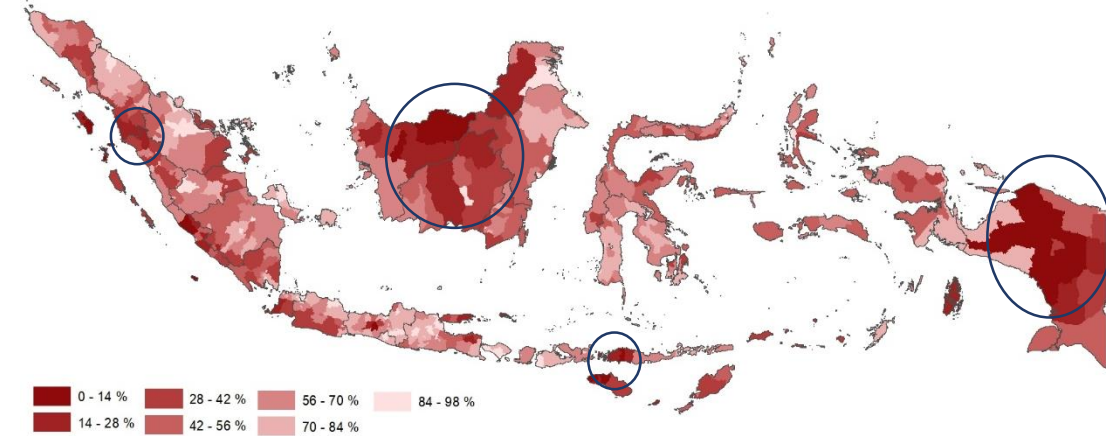
Prioritas pemenuhan SPM bidang kesehatan difokuskan pada wilayah yang berwarna GELAP

HUNIAN LAYAK

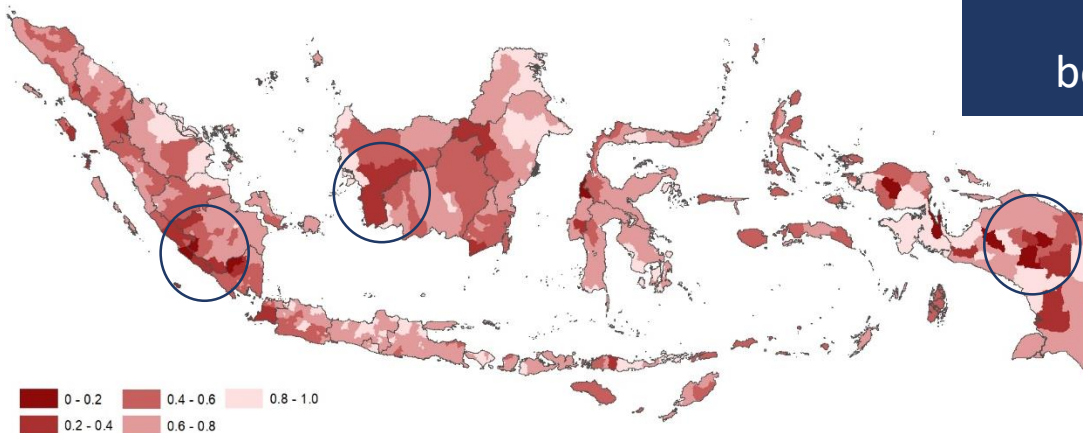
RASIO ELEKTRIFIKASI PER PROVINSI 2017



PERSENTASE SANITASI LAYAK KABUPATEN/KOTA 2017

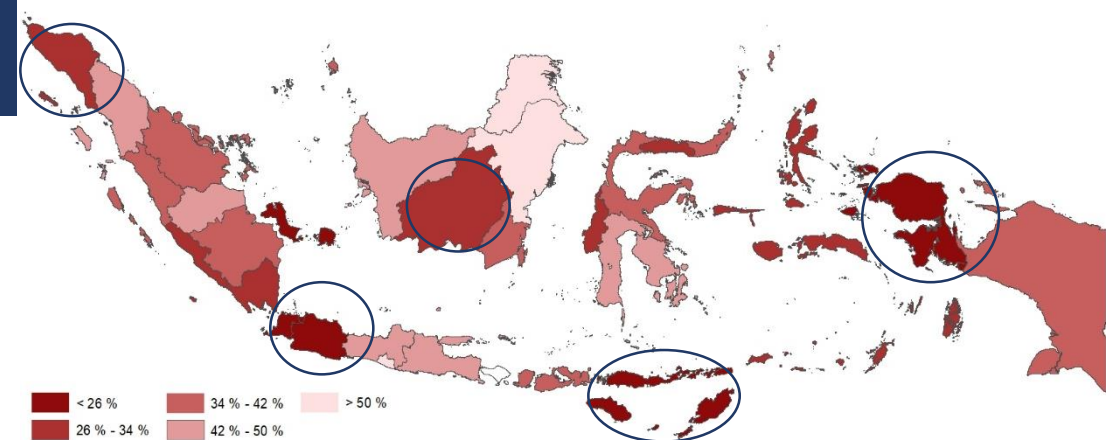


TINGKAT LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA 2017



Prioritas pemenuhan
SPM bidang prasarana
dasar difokuskan pada
wilayah yang
berwarna GELAP

TINGKAT HUNIAN LAYAK PER PROVINSI 2017



KOMODITAS UNGGULAN NASIONAL DAN PULAU BESAR

SUMATERA

- Perkebunan: Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Lada, Kelapa, Teh, Tebu, Nilam, Pala
- Pangan: Jagung, Kedelai, Ubi Kayu
- Peternakan: Daging Sapi, domba, kerbau, kambing
- Perikanan: Perikanan Tangkap dan Budidaya (nila, lele, udang, patin)
- Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara

KALIMANTAN

- Perkebunan: Kelapa Sawit, Karet, Lada, Kelapa
- Peternakan: Daging sapi, Kerbau, kambing
- Pangan: Kedelai
- Perikanan: Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya (rumput laut, nila, bandeng, Udang, patin)
- Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara

SULAWESI

- Perkebunan: Kakao, Kopi, Kelapa, Lada, Nilam
- Pangan: Jagung, Kedelai, Ubi Kayu
- Peternakan: Daging Sapi, kerbau, kambing
- Perikanan: Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya (rumput laut, udang, bandeng, nila)

PAPUA

- Perkebunan: Kakao, Ubi Jalar
- Perikanan: Perikanan Tangkap (udang, Tuna Tongkol Cakalang)

JAWA-BALI

- Perkebunan: Kakao, Kopi, Karet, Kelapa, Teh, Tebu, Tembakau, Nilam,
- Pangan: Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Kacang Hijau
- Peternakan: Daging Sapi, domba, kerbau, kambing
- Perikanan: Lele, rumput laut, nila, udang, bandeng (budidaya)

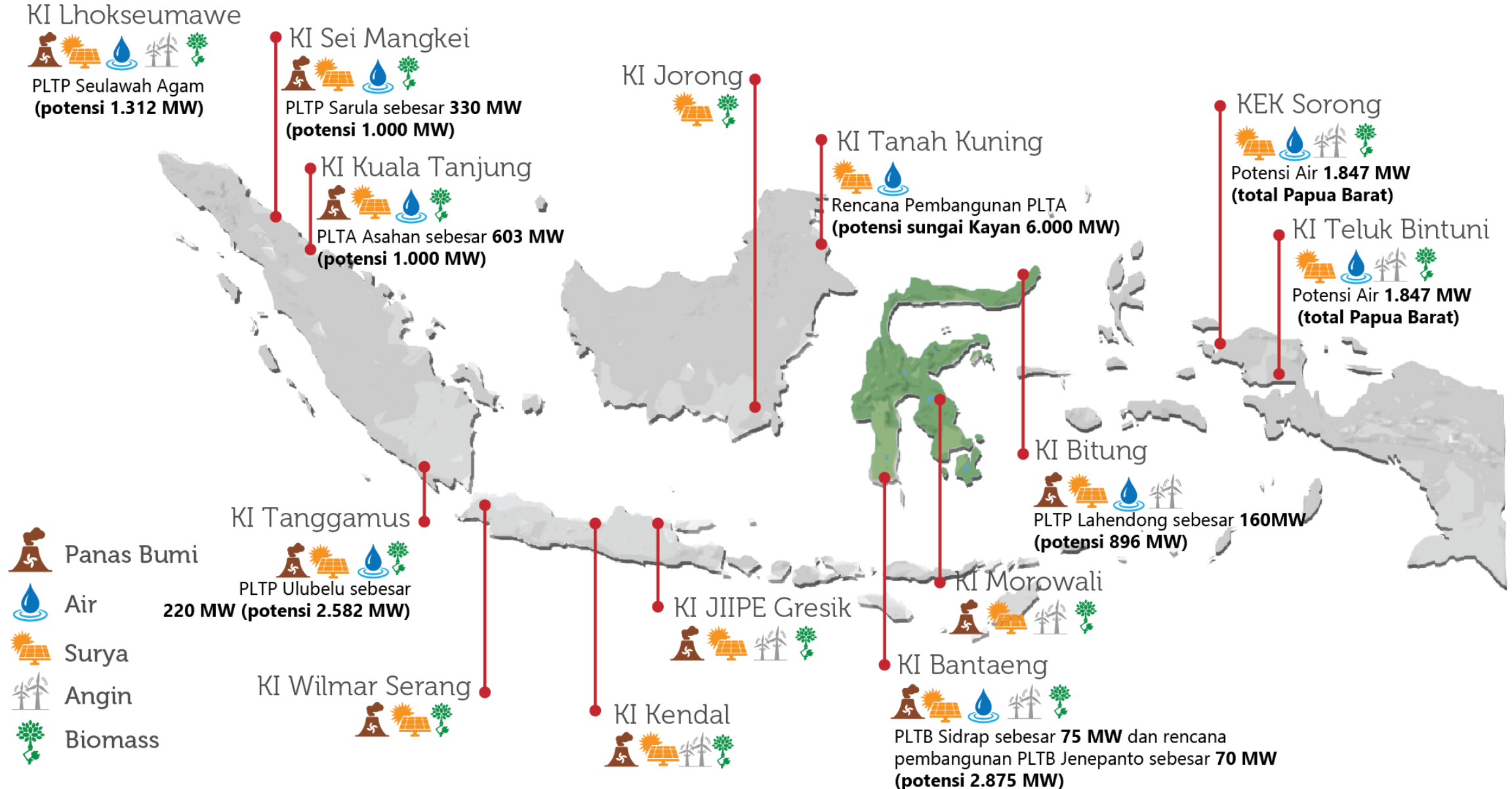
NUSA TENGGARA

- Perkebunan: Kopi, Tembakau, Jambu Mete
- Pangan: Jagung, Kedelai, Kacang Hijau, Ubi Kayu
- Peternakan: Daging sapi, Kerbau, kambing
- Perikanan: Perikanan Budidaya (rumput laut, udang, bandeng, nila)

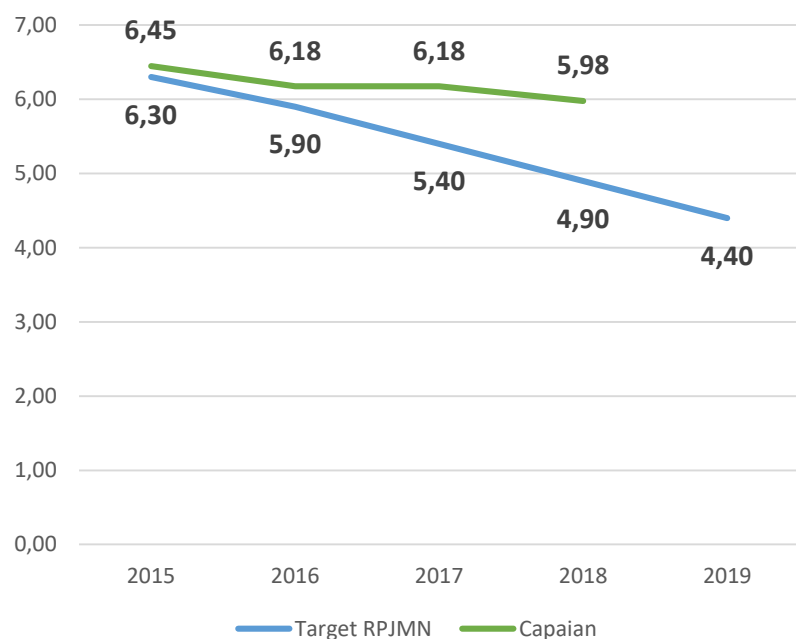
MALUKU

- Perkebunan: Kakao, Kelapa, Pala
- Perikanan: Perikanan Tangkap (Tuna Tongkol Cakalang), Perikanan Budidaya (rumput laut, udang)

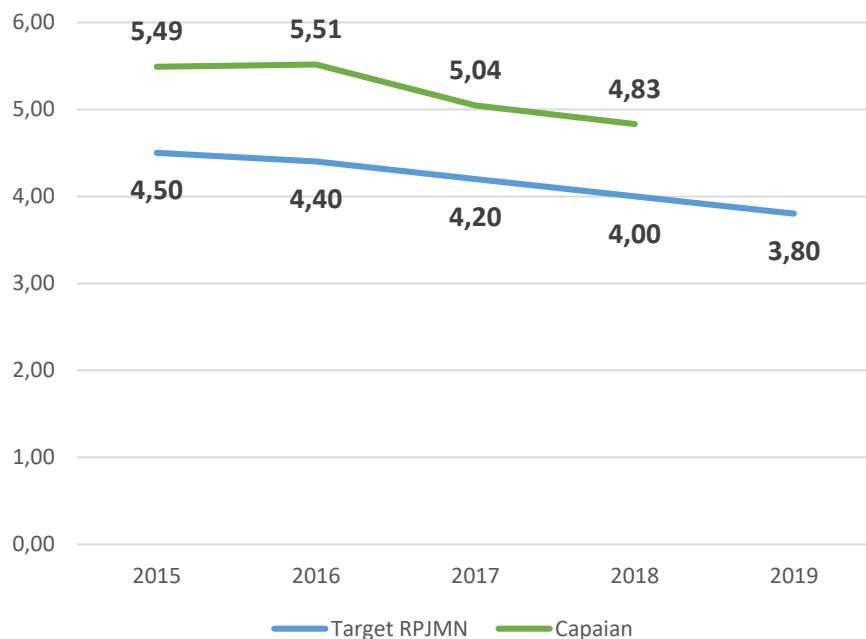




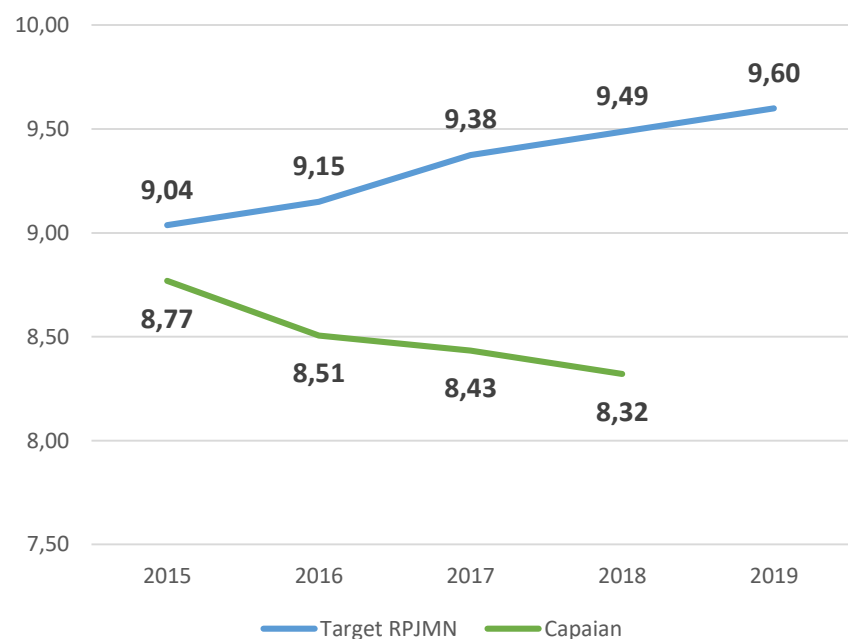
PENCAPAIAN TARGET KALIMANTAN DALAM RPJMN 2015-2019



TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN



TINGKAT PENGANGGURAN KALIMANTAN



SHARE PDRB KALIMANTAN

PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH KALIMANTAN



Kalimantan berada di **wilayah pengelolaan perikanan (WPP)**, yaitu:

1. WPP 711, meliputi meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan (pemanfaatan 79,3%)
2. WPP 712, meliputi Laut Jawa (pemanfaatan 82,5%)
3. WPP 713, meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali (pemanfaatan 50,8%)
4. WPP 716, meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera (pemanfaatan 43,9%)

Komoditas perikanan tangkap : ikan pelagis kecil dan besar, ikan demersal

Jumlah **Pelabuhan Perikanan (PP)** di Kalimantan = 44 unit, dimana 7 unit diantaranya telah ditetapkan kelasnya

→ Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
 Pemangkat, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
 Teluk Batang, PPP Sungai Rengas, Pangkalan
 Pendaratan Ikan (PPI) Muara Kintap, PPI Selili, PPI
 Sambaliung, dan PPI Tanjung Limau

Keterangan: 1. Data potensi berdasarkan Kepmen KP No. 50/2017 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkap yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP
 2. Data produksi perikanan tangkap di laut tahun 2017 berdasarkan KKP, 2019
 3. jumlah kapal dan alat tangkap perikanan tahun 2016



2. *Overview* RPJMN 2020-2024 Kewilayahan

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI KEWILAYAHAN

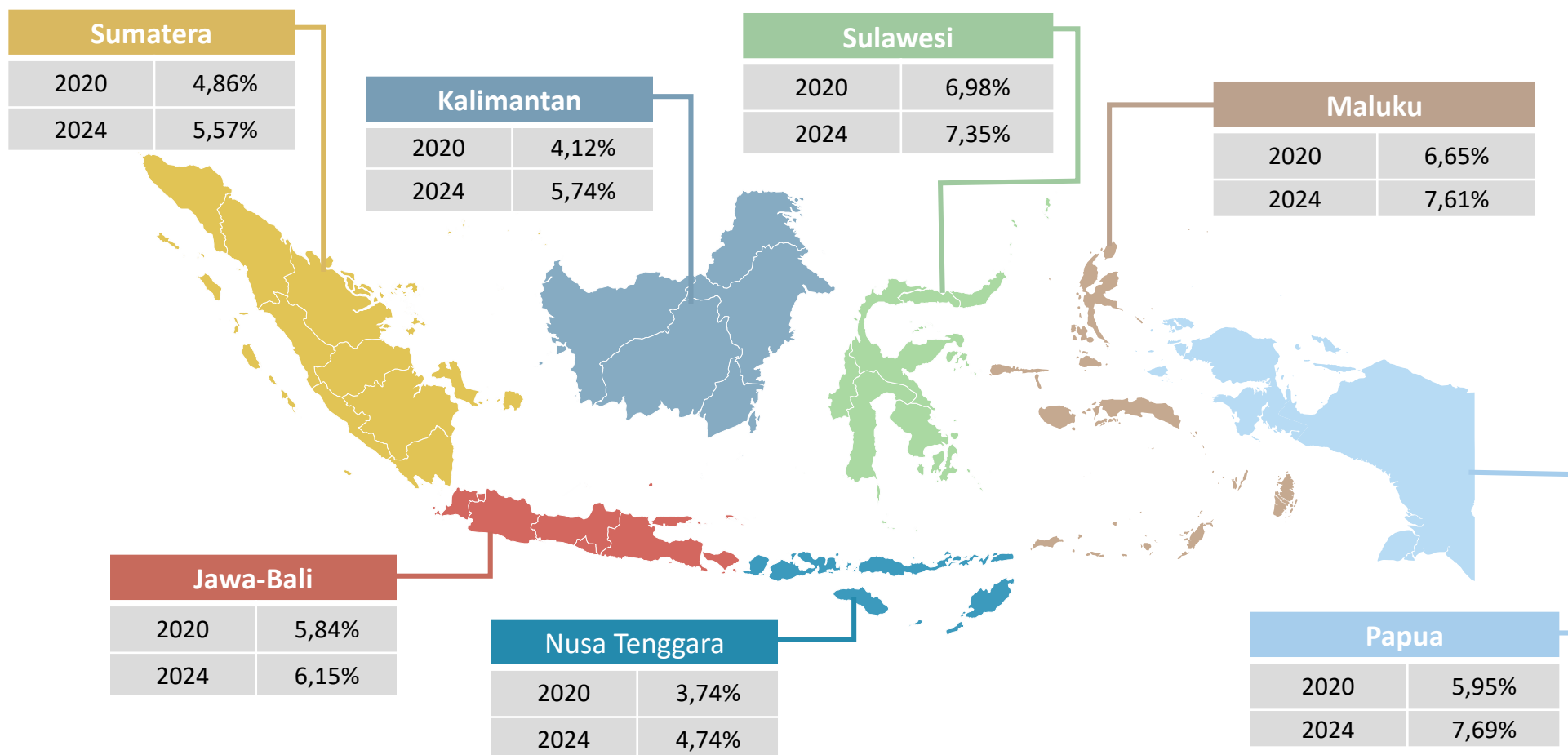
NASIONAL	Low Scenario					Moderate Scenario					High Scenario				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB (YoY, %)	5,3	5,4	5,4	5,5	5,5	5,4	5,5	5,7	5,9	6,1	5,5	5,7	5,9	6,2	6,5
Inflasi (YoY, %): End of Period	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0
Rerata Pertumbuhan Ekonomi	5,4					5,7					6,0				



**Pertumbuhan Ekonomi
Regional Berdasarkan Asumsi
Skenario Moderat
(5,7 Persen)**



**Kebijakan pengembangan
wilayah diarahkan untuk
memacu pertumbuhan
ekonomi di luar Jawa**



KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Kemiskinan di KTI (18,01%), KBI (10,33%), perdesaan (13,47%) dan perkotaan (7,20%) yang tinggi (BPS, 2017)
- Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (Rasio Gini: 0,32) - Perkotaan (0,39)
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa

PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 3 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak huni 38,3%, air minum layak 61,3%, sanitasi layak 74,6%, dsb) (BPS, 2018)
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal
- Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari → Papua)

PENGELOLAAN URBANISASI

- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB)

PEMANFAATAN RUANG

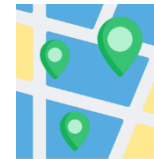
- Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas
- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa)
- Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dsb)

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN PEMILIKAN, PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

- Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4%;
- Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91%;
- 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga (Sensus Pertanian BPS, 2013);
- Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani

FUNGSI IBUKOTA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN

- Jumlah kerugian akibat kemacetan dan inefisiensi penggunaan bahan bakar Rp. 56 triliun di tahun 2011 (Pulstra UGM, 2013)
- Dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya *gap* dengan daerah lain di Indonesia (kontribusi wilayah metropolitan Jakarta 20,85% nasional, Jawa 58,49 % dari PDB Nasional (BPS, 2018),
- Wilayah metropolitan Jakarta adalah area dengan jumlah populasi penduduk terbesar di Indonesia



SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN

SASARAN

Meningkatnya
Pemerataan antarwilayah
(KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)



Meningkatnya
Keunggulan Kompetitif
Pusat-pusat
Pertumbuhan Wilayah



Meningkatnya Kualitas
Dan Akses Pelayanan
Dasar, Daya Saing serta
Kemandirian Daerah

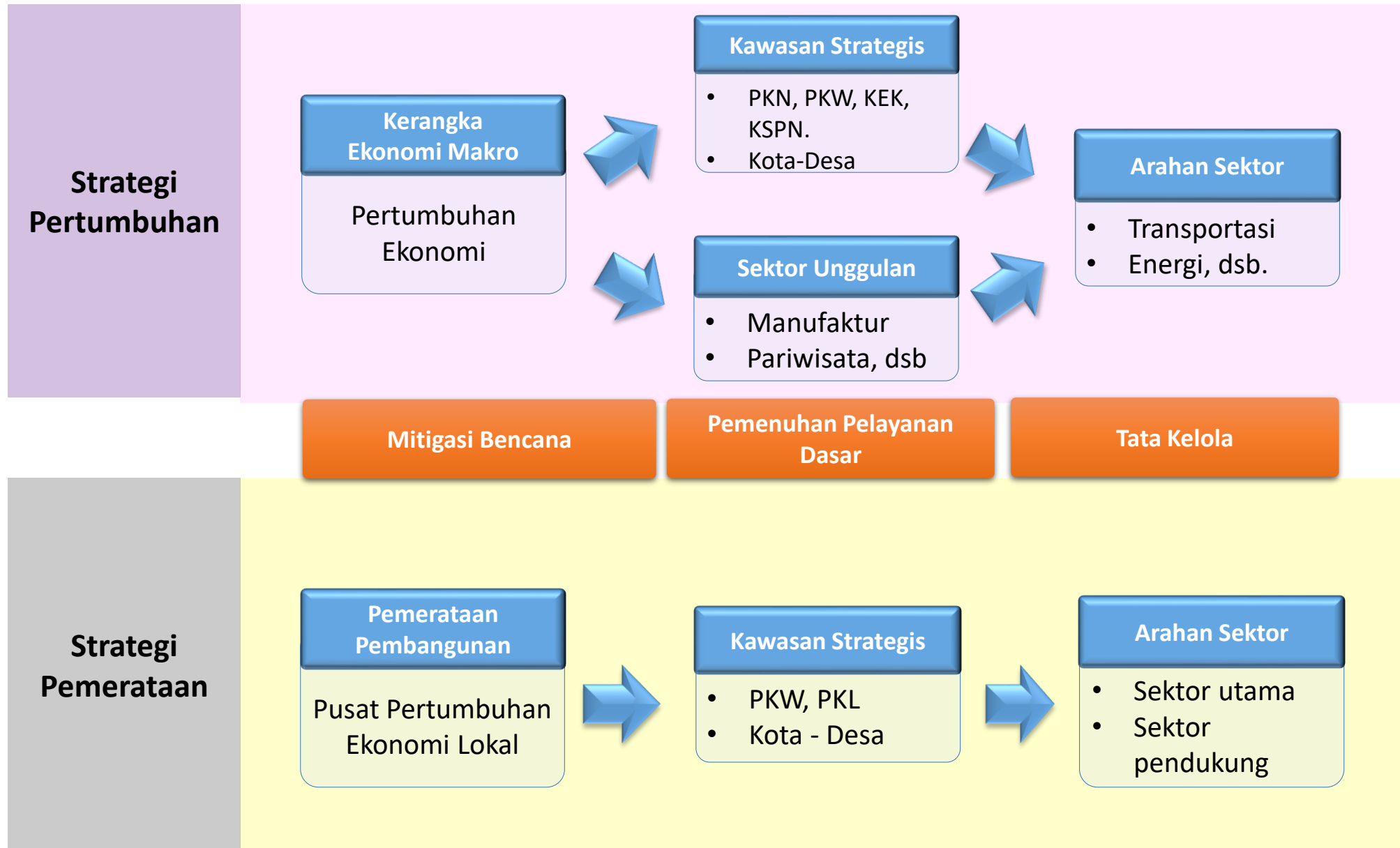


Meningkatnya Sinergi
Pemanfaatan Ruang
Wilayah



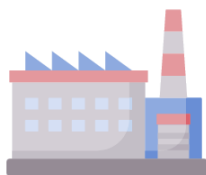
ARAH KEBIJAKAN

1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal
2. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
3. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan)
4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa
5. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
7. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang,
9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah
11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah



RPJMN 2020-2024

- Konsep koridor dibangun berdasarkan pertampalan (*overlay*) dari
- Pertampalan tersebut membentuk jalur pembangunan utama (**koridor pertumbuhan**) dan jalur pembangunan pendukung (**koridor pemerataan**).



Jalur
Manufaktur
Nusantara



Jalur
Mineral
Nusantara



Jalur
Pariwisata
Nusantara



Pola **Persebaran**
Pusat Kegiatan
(PKN dan PKW)

Jalur disusun dengan menggunakan perhitungan *Regional Comparative Advantage* (RCA) berdasarkan angka PDRB 2017

Koridor Pemerataan

bertujuan untuk pemenuhan **elayanan dasar** yang lebih **merata**,

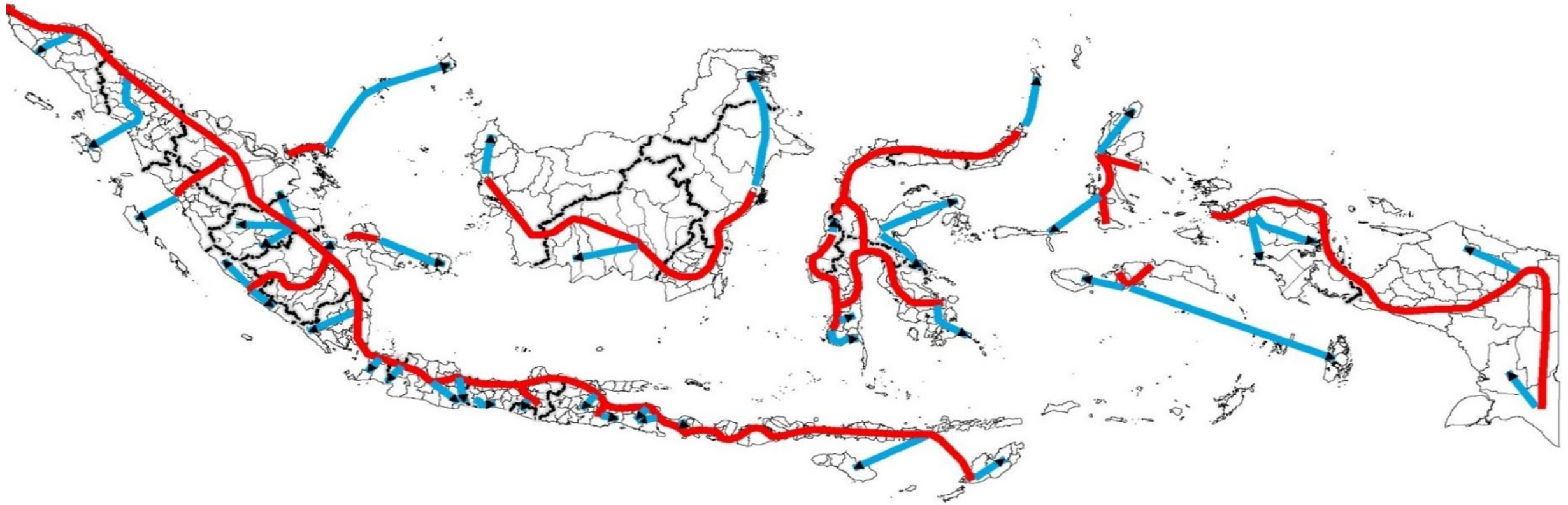
melalui pengembangan **PKW** dan **PKL** sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada **koridor pemerataan**

Koridor Pertumbuhan

bertujuan untuk **memacu pertumbuhan** ekonomi nasional

melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi **PKN, PKW, KEK, KI**, dan **KSPN**, serta kota-desa pada kabupaten/kota yang terletak pada **koridor pertumbuhan**

KORIDOR WILAYAH



Koridor Pertumbuhan
Koridor Pemerataan



- Arah pembangunan wilayah dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan diidentifikasi sesuai **potensi dan karakteristik masing-masing wilayah**.



- Arah pembangunan wilayah tersebut diterjemahkan di dalam **arah pembangunan wilayah 7 (tujuh) pulau besar**, dimana masing-masing pulau juga memiliki Proyek Prioritas Nasional unggulan masing-masing (*Major Projects*)

Di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan, diidentifikasi juga arah pembangunan wilayah **yang sifatnya umum (generic)** untuk seluruh wilayah, yang meliputi:

Pengurangan Angka Kemiskinan dan Kesenjangan di setiap Wilayah

Arah Kebijakan: **Peningkatan Pelayanan Dasar**
Strategi:

- Meningkatkan Akses dan Mutu Kesehatan
- Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan
- Meningkatkan Akses dan Mutu Permukiman
- Meningkatkan Akses dan Mutu Air Bersih
- Meningkatkan Akses dan Mutu Energi (Listrik)

Peningkatan Kewaspadaan dalam rangka Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana di setiap Wilayah

Arah Kebijakan: **Peningkatan Kewaspadaan & Ketangguhan Bencana**
Strategi:

- Mengurangi Risiko Kerugian Ekonomi
- Meningkatkan Mitigasi Bencana
- Memperkuat Kesiapsiagaan Bencana

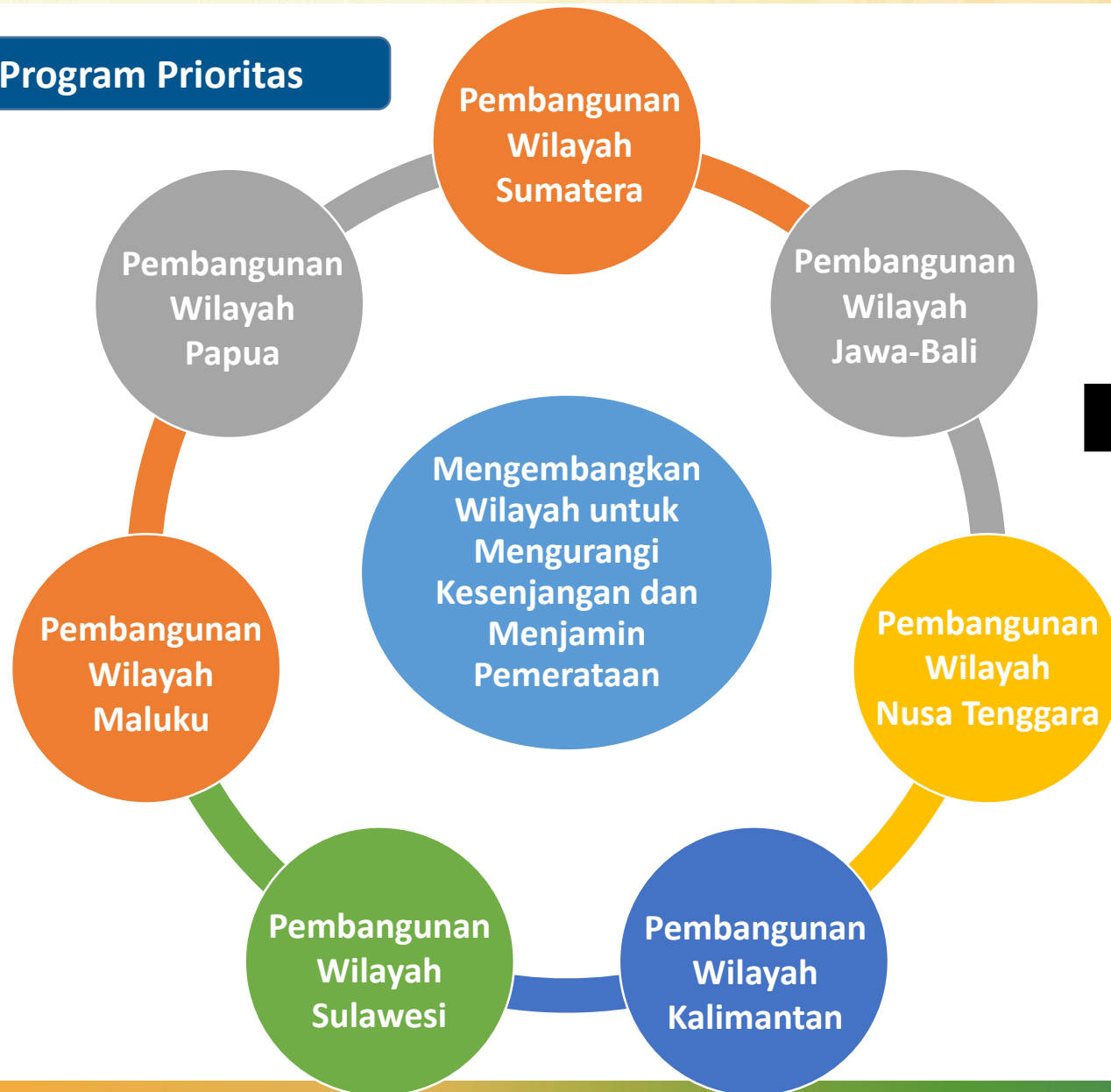
Mengembangkan sistem
dan peralatan deteksi dini
bencana

Meningkatkan
kapasitas aparat dan
masyarakat

Memperluas
kerjasama dalam
mitigasi bencana

PROGRAM PRIORITAS dalam PRIORITAS NASIONAL Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Program Prioritas



Kegiatan Prioritas

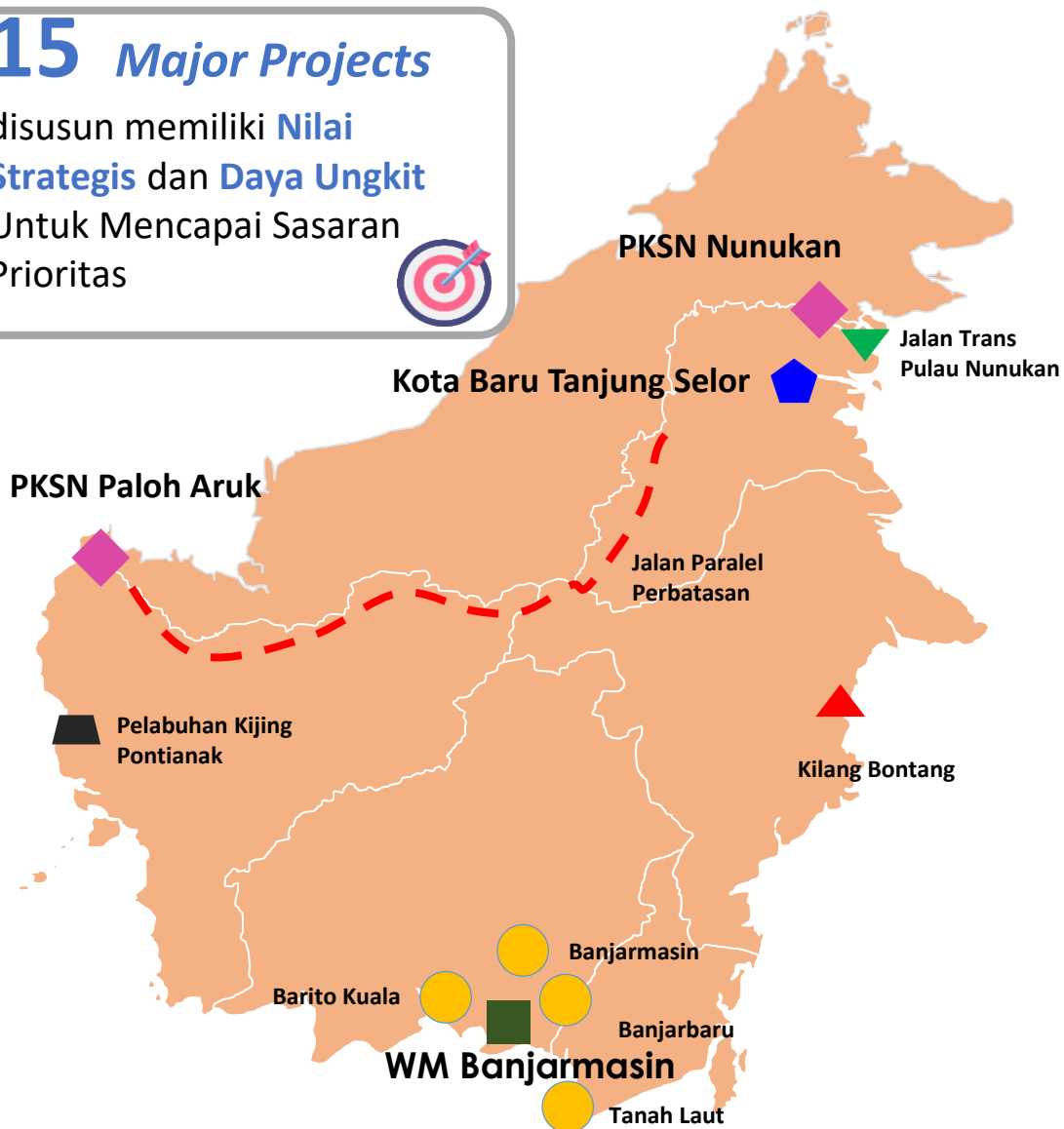
1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
5. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan
6. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Diuraikan di dalam Proyek Prioritas Nasional dan Proyek K/L

MAJOR PROJECTS PULAU KALIMANTAN

15 Major Projects

disusun memiliki **Nilai Strategis** dan **Daya Ungkit** Untuk Mencapai Sasaran Prioritas

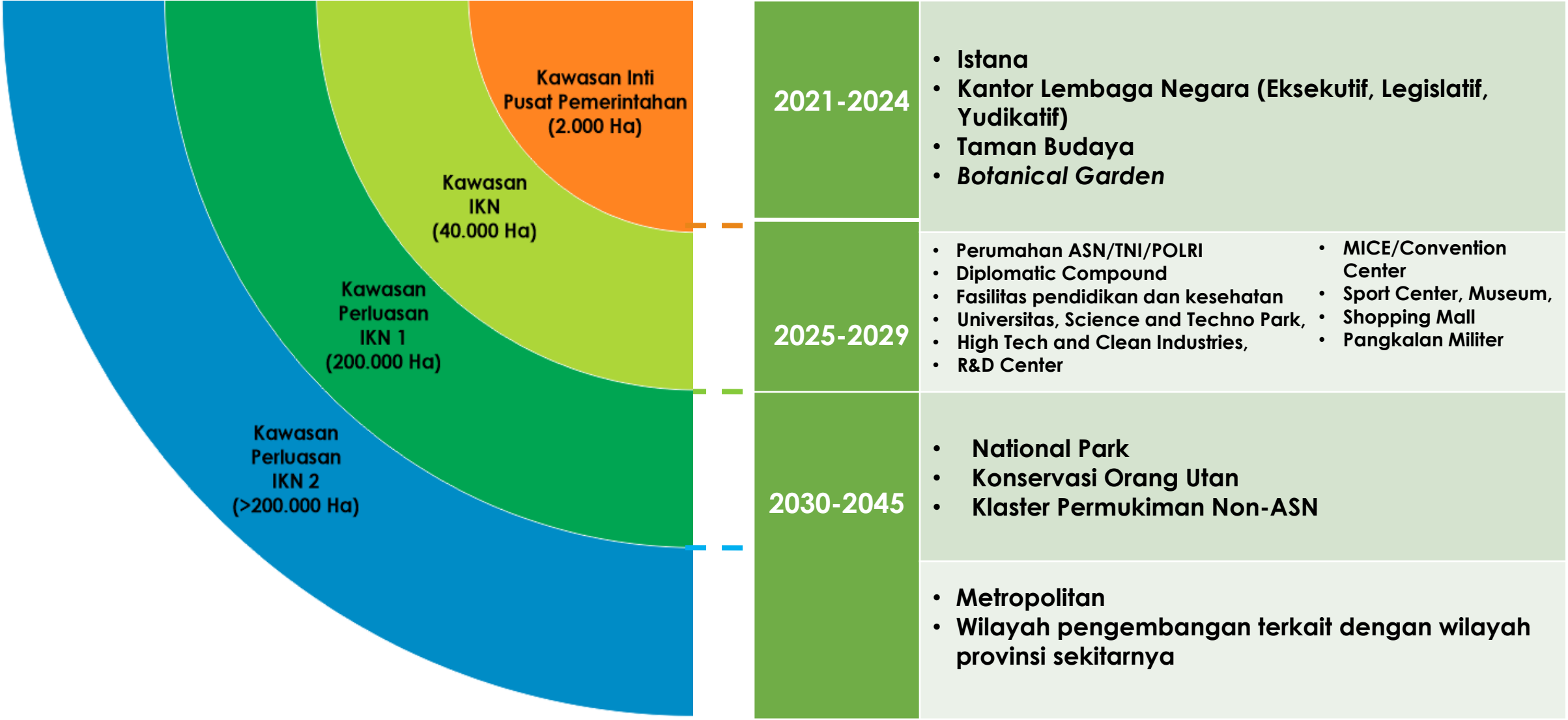


- Pemindahan Ibu Kota Negara
- Wilayah Metropolitan Banjarmasin
- ◆ Kota baru Tanjung Selor
- ◆ PKSN Paloh Aruk dan PKSN Nunukan
- Penyediaan hunian layak dan terjangkau, termasuk hunian vertikal di perkotaan (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut)
- ▤ Standardisasi Kinerja dan Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Hub Terpadu: Pelabuhan Kijing/Pontianak
- ▲ Pembangunan Kilang Baru di Bontang (Kalimantan Timur)
- ▼ Penanganan Jalan Trans/Lingkar Pulau Terluar dan Tertinggal: Pulau Nunukan
- Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan
- Penyelesaian Program 35.000 MW (Target 2020-2024: Pembangkit 2.110 MW, Jaringan Transmisi 5.904 kms/1.670 MVA)
- Pengembangan Infrastruktur Gas Kota (Target Pembangunan TA 2020/2021 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara)
- Penuntasan Infrastruktur TIK (19.300 Titik Layanan Satelit Multifungsi dan BTS/lastmile di 325 desa di Pulau Kalimantan)
- Pengembangan 5 Waduk Multiguna
- Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah (SR) di Indonesia (Target 1 Juta SR di Pulau Kalimantan)
- Peningkatan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (Target 60.500 SR IPAL Kota dan 9 unit IPLT)



MAJOR PROJECT IKN - RANCANGAN ZONASI DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN

Tahap Pembangunan



DAMPAK EKONOMI PEMINDAHAN IBU KOTA KE KALIMANTAN

- 01 Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar **0,1% - 0,2%**;
- 02 Penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan:
 - *Kenaikan Price of capital*: **0,23%**
 - *Kenaikan Price of Labour*: **1,37%**
- 03 Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional sekitar:
 - *Output Multiplier* : **2,3***
 - *Employment Multiplier*: **2,9***
- 04 Pemindahan ibukota ke Kalimantan akan mendorong penurunan kesenjangan antar wilayah, karena:
 - **Mendorong perdagangan antar wilayah**, terutama perdagangan antara pulau Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa serta antar wilayah di luar pulau Jawa
 - **Mendorong investasi** terutama di provinsi ibukota negara baru dan provinsi sekitarnya.
 - **Mendorong diversifikasi ekonomi**, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di provinsi tersebut.
- 05 Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan **meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional**, terutama Sektor Jasa



3. Arahana Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan

ISU STRATEGIS WILAYAH PULAU KALIMANTAN



Peran Wilayah sebagai **paru-paru dunia** terancam dengan tingginya ancaman kerusakan hutan



Relatif masih tingginya potensi bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan banjir, yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya **kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif**



Penguatan peran **daerah perbatasan sebagai pintu beranda negara** belum optimal



Menurunnya penerimaan daerah



Infrastruktur dan layanan dasar untuk kesehatan dan produktivitas yang masih terbatas serta **penerapan SPM** yang masih perlu ditingkatkan



Tata kelola dan **kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan serta kerjasama antar daerah** yang belum optimal



Konektivitas intra-wilayah belum memadai



Pengembangan **industri berbasis sumberdaya alam** belum optimal



Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan atas perubahan iklim, bencana dan polusi, serta akibat kesenjangan dan kemiskinan perkotaan

ARAH KEBIJAKAN

Percepatan **pertumbuhan**, **diversifikasi**, dan **pelestarian alam**

STRATEGI

1. Mempertahankan peran sebagai **lambung energi nasional**;
2. Mengembangkan **industri pengolahan** (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang;
3. Memperkuat peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk **hilirisasi industri**;
4. Memperkuat **penguatan kawasan transmigrasi mandiri**;
5. Menjaga **kawasan perbatasan** untuk menjamin kedaulatan NKRI;
6. Menjaga kawasan dengan fungsi **pelestarian lingkungan dan ekologis**;
7. Menjamin pemenuhan **konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar** pada kawasan dan kota-kota baru.
8. Meningkatkan **kapasitas pemerintahan daerah** untuk **mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerjasama antara daerah** dan **meningkatkan PAD**.
9. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui **integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana** serta **penguatan sistem mitigasi bencana**
10. **Pemindahan Ibukota Negara sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional**

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON PULAU KALIMANTAN



ARAH KEBIJAKAN

Memastikan luas tutupan hutan dapat dijaga dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas

STRATEGI

1. Optimalisasi upaya **rehabilitasi hutan dan lahan** untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
2. Konservasi dan perlindungan **hutan primer dan habitat spesies kunci**;
3. Pengembangan **energi baru terbarukan**;
4. Optimalisasi pengelolaan **sampah dan limbah bahan berbahaya beracun** secara terpadu;
5. Pengembangan sarana dan prasarana **transportasi massal**;
6. **Penegakan hukum** atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON PULAU KALIMANTAN

ISU STRATEGIS



Kehutanan dan Lahan

Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit



Energi

Nilai investasi per ton CO₂ yang dapat dikuantifikasikan relatif besar



Pengelolaan Limbah

Peningkatan timbunan sampah



Transportasi

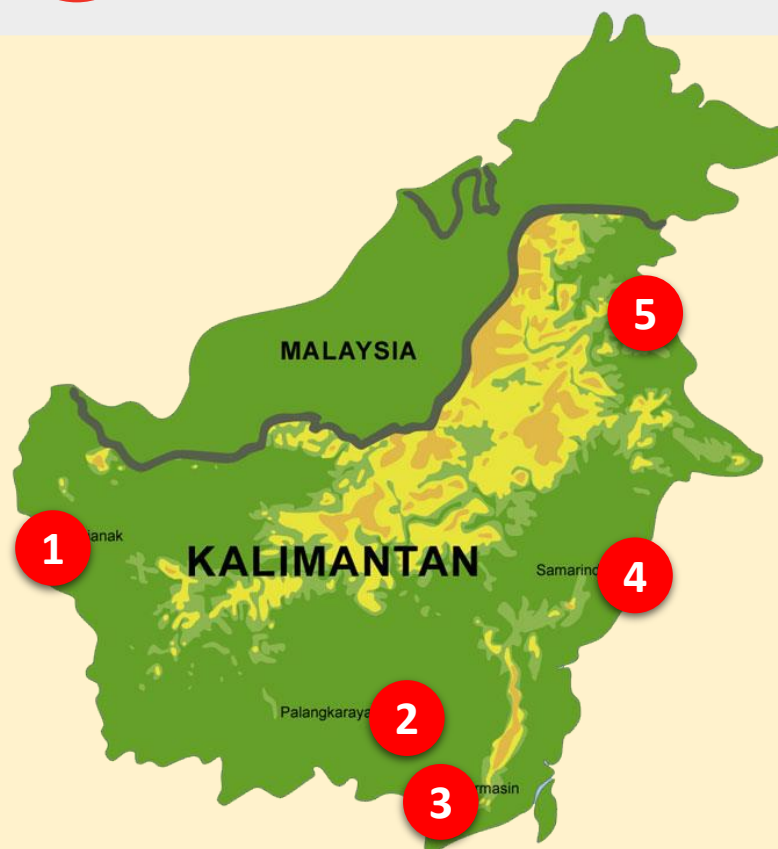
Aksi mitigasi hanya berfokus pada tata kelola transportasi di perkotaan

-  Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan di APL seluas 137470.5 Ha
-  Menambah kapasitas pembangkit EBT terpasang 1,56 MW dari PLTMH dan PLTS Komunal
-  Pengembangan TPA/TPST 28 Unit
-  Pengembangan BRT 1 Koridor

1

-  Pemanfaatan Lahan tanpa bakar seluas 3214 Ha
-  Pengembangan EBT 29,07 MW (dari PLTS, PLTM, PLT Bayu, dan PLT Biogas)
-  Pengembangan TPA/TPST 487 Unit
-  Pengembangan BRT 1 Koridor

2



-  Perlindungan hutan seluas 647740 Ha
-  Menambah kapasitas pembangkit EBT 0,41 MW (dari PLTMH dan PLTS)
-  Pengembangan TPA/TPST 1 Unit
-  Pengembangan BRT 30 Unit

5

-  Menjaga tutupan lahan untuk berhutan seluas 2.118.850 Ha
-  Menambah kapasitas pembangkit EBT 4 MW (dari PLTMH dan PLTBm)
-  Pengembangan TPA/TPST 28 Unit
-  Pengembangan BRT 1 Koridor

4

-  Rehabilitasi Hutan 31267, 14 Ha
-  Menambah Kapasitas Pembangkit EBT 10,68 MW (dari PLTS dan pome)
-  Pengembangan TPA/TPST 250 Unit
-  Pengembangan BRT 1 Koridor

3

ARAH KEBIJAKAN KALIMANTAN BERDASARKAN ANALISIS KLHS RPJMN 2020-2024

Provinsi Kalimantan Barat

Mempertahankan pada 2024:

- ❑ Tutupan hutan minimal seluas 5.8 juta Ha
- ❑ Luas habitat spesies kunci sebesar 3.3 juta Ha
- ❑ Batas aman penyediaan air di kisaran 1700 M3/kapita
- ❑ Wilayah permukiman di pesisir dengan CVI (tinggi) seluas 2600 Ha
- ❑ Tutupan hutan di lahan gambut minimal seluas 436 ribu Ha

Provinsi Kalimantan Tengah

Mempertahankan pada 2024:

- ❑ Tutupan hutan minimal seluas 6.7 juta Ha
- ❑ Luas habitat spesies kunci sebesar 4.8 juta Ha
- ❑ Batas aman penyediaan air di kisaran 1700 M3/kapita
- ❑ Wilayah permukiman di pesisir dengan CVI (tinggi) seluas 225 Ha
- ❑ Tutupan hutan di lahan gambut minimal seluas 1.1 juta Ha

Provinsi Kalimantan Selatan

Mempertahankan pada 2024:

- ❑ Tutupan hutan minimal seluas 813 ribu Ha
- ❑ Luas habitat spesies kunci sebesar 2.500 Ha
- ❑ Batas aman penyediaan air di kisaran 1700 M3/kapita
- ❑ Wilayah permukiman di pesisir dengan CVI (tinggi) seluas 2050 Ha
- ❑ Tutupan hutan di lahan gambut minimal seluas 6.100 Ha



Provinsi Kalimantan Utara

Mempertahankan pada 2024:

- ❑ Tutupan hutan minimal seluas 5.7 juta Ha
- ❑ Luas habitat spesies kunci sebesar 76 ribu Ha
- ❑ Batas aman penyediaan air di kisaran 1700 M3/kapita
- ❑ Tutupan hutan di lahan gambut minimal seluas 26 ribu Ha

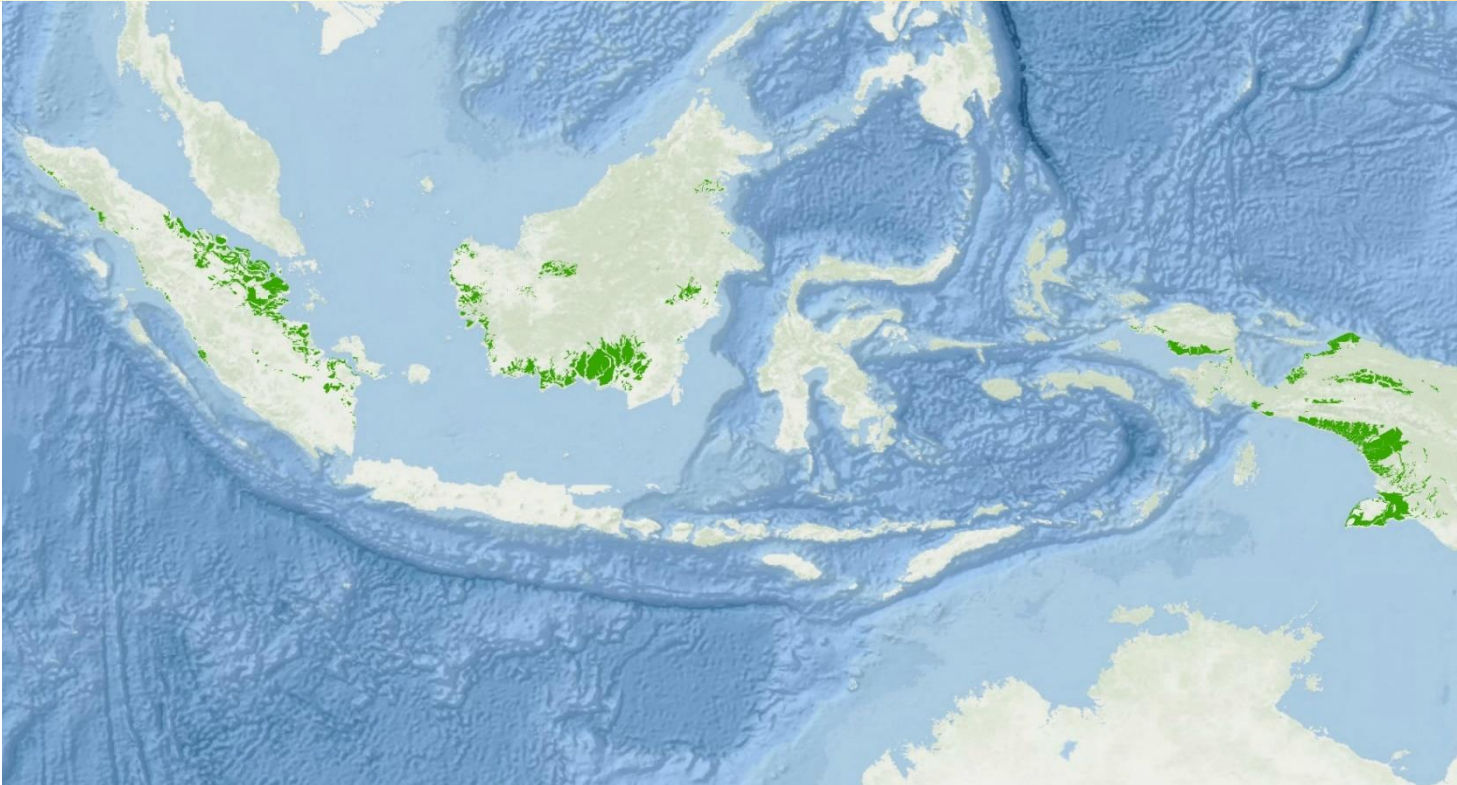
Provinsi Kalimantan Timur

Mempertahankan pada 2024:

- ❑ Tutupan hutan minimal seluas 6.7 juta Ha
- ❑ Luas habitat spesies kunci sebesar 2.2 juta Ha
- ❑ Batas aman penyediaan air di kisaran 1700 M3/kapita
- ❑ Wilayah permukiman di pesisir dengan CVI (tinggi) seluas 25 Ha
- ❑ Tutupan hutan di lahan gambut minimal seluas 23 ribu Ha

BAU (2024)	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Kalimantan Utara
Tutupan Hutan (Ha)	7.092.800	851.175	5.991.225	5.323.575	6.014.525
Luas Habitat (Ha)	2.396.800	3.450	4.242.825	3.071.575	76.525
Air (m3/kapita)	31.971	13.634	14.285	34.168	72.610
CVI (Ha)	25 (tinggi)	2.025 (tinggi)	225 (tinggi)	2.425 (tinggi)	0
Gambut (Ha)	22.550	2.375	449.800	306.700	23.600

ALIH FUNGSI HUTAN GAMBUT



- Alih fungsi hutan gambut pada periode 2000 hingga 2015, di Kalimantan mencapai 15 % lebih dan di Sumatera 20 %
- Moratorium lahan gambut baru dimulai dari tahun 2015.

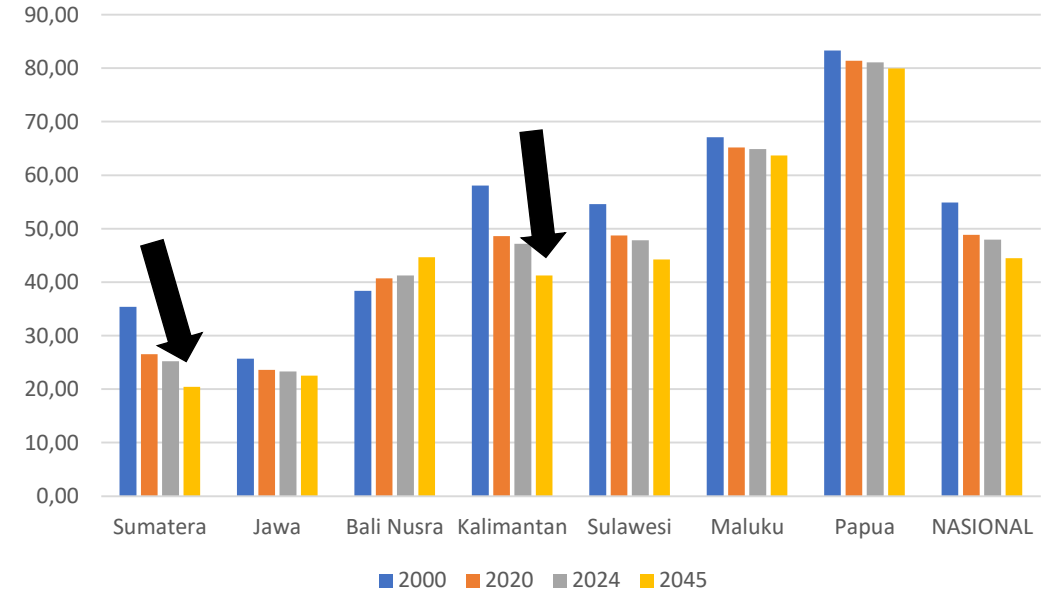
Pulau	Luas Kawasan (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54

Sumber: KLHS RPJMN
2020-2024 (Bappenas,
2019)

LAJU DEFORESTASI TUTUPAN HUTAN (%)



	Sumatera	Jawa	Bali Nusra	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua	NASIONAL
2000	35.37	25.69	38.41	58.07	54.57	67.07	83.29	54.88
2020	26.55	23.62	40.70	48.63	48.76	65.20	81.40	48.87
2024	25.25	23.32	41.24	47.20	47.85	64.91	81.10	47.97
2045	20.42	22.52	44.64	41.28	44.24	63.67	79.98	44.51

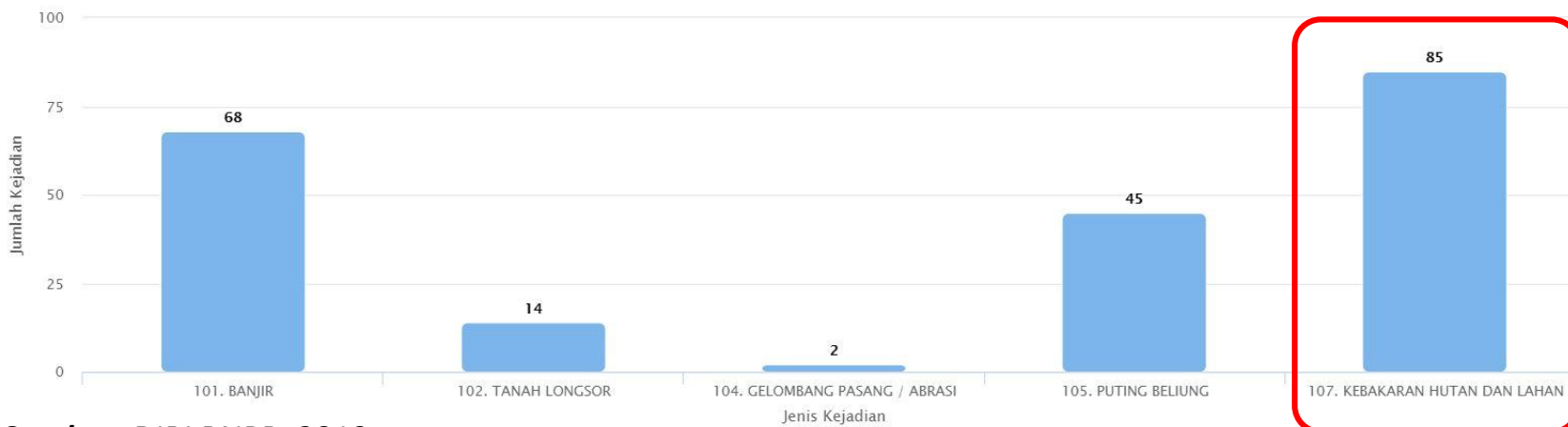


- Laju deforestasi tertinggi sejak tahun 2000 didominasi oleh **Pulau Sumatera dan Kalimantan** dengan penurunan **-10,12%** dan **-10,88%** di tahun 2024. Penurunan ini akan terus berlanjut hingga **-14,95%** dan **- 16,79%** di tahun 2045.
- Adapun penurunan jumlah tutupan lahan ini diakibatkan oleh adanya kompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk **sawit** yang menjadi komoditas utama dalam mendorong perekonomian nasional.
- Tanpa intervensi kebijakan, berdasarkan tren histori, tutupan lahan hutan di tahun 2045 secara nasional akan menurun drastis ke angka **44,51%**

Sumber: KLHS RPJMN 2020-2024 (Bappenas, 2019)
Tutupan hutan termasuk hutan Primer, Sekunder dan Tanaman

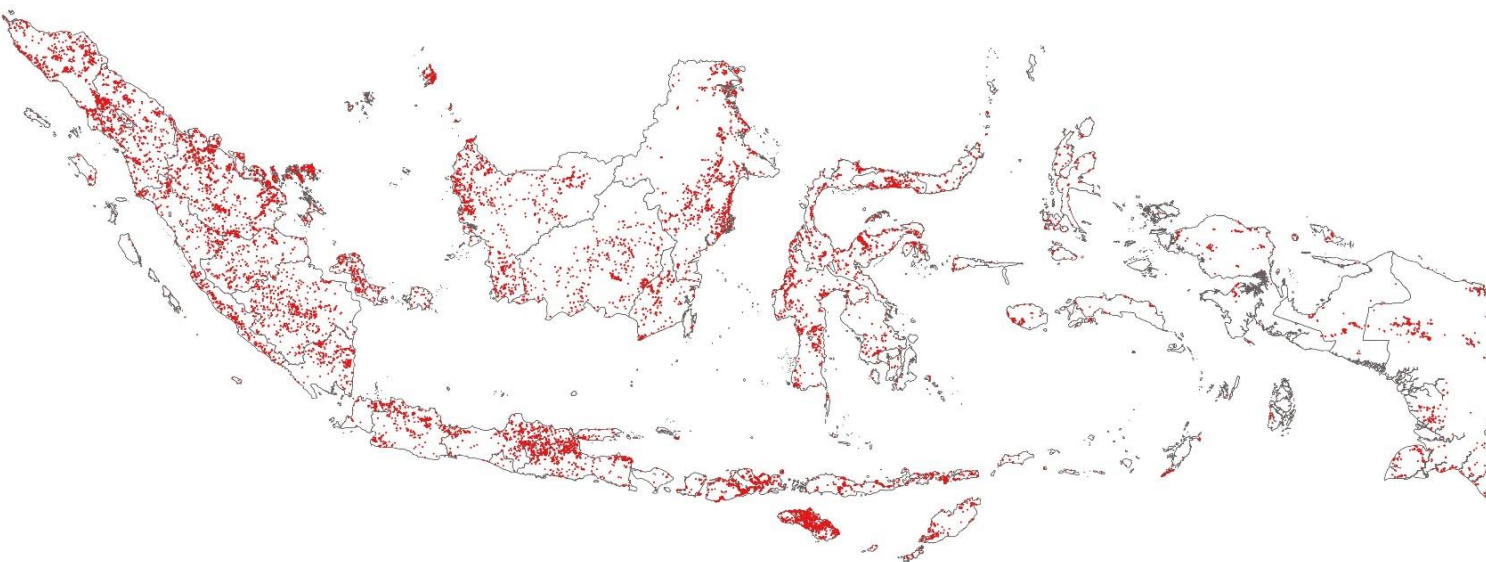
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2015-2019

PULAU KALIMANTAN



- Selama tahun 2015-2019 tercatat 214 kejadian bencana yang terjadi di **Pulau Kalimantan**. Jenis bencana yang banyak terjadi adalah **kebakaran hutan dan lahan (85 kasus)**.
- Pulau Kalimantan memiliki **titik panas terbanyak** serta wilayah **kebakaran hutan dan lahan terluas** di Indonesia.
- Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana**, khususnya untuk bencana kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalimantan.

Titik Api Selama Januari Hingga Juli 2019

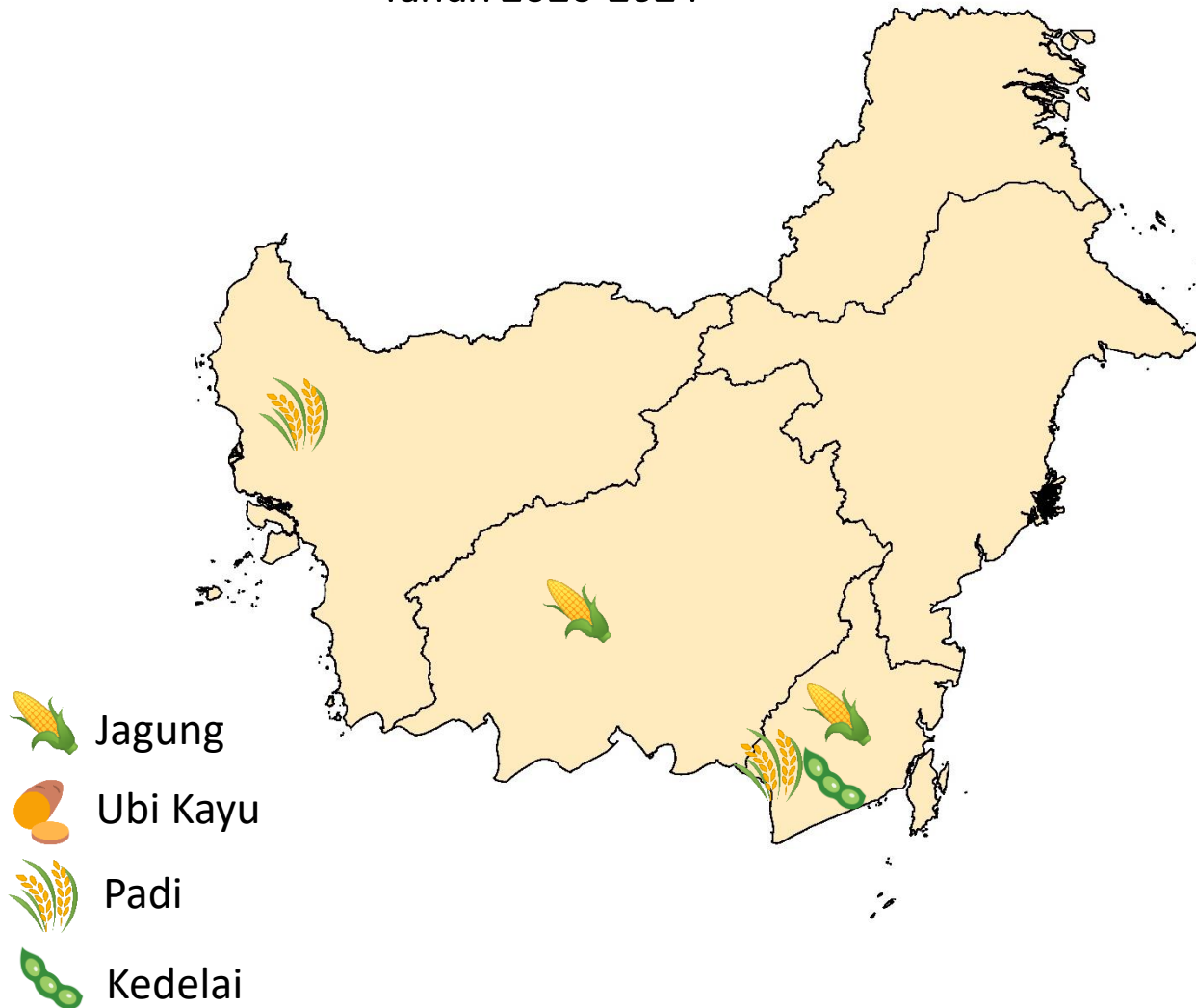


Provinsi	Jumlah Titik Panas	Luas (Ha)
Kalimantan Barat	558	3.315
Kalimantan Selatan	62	4.670
Kalimantan Tengah	100	3.618
Kalimantan Timur	105	4.430
Kalimantan Utara	36	859

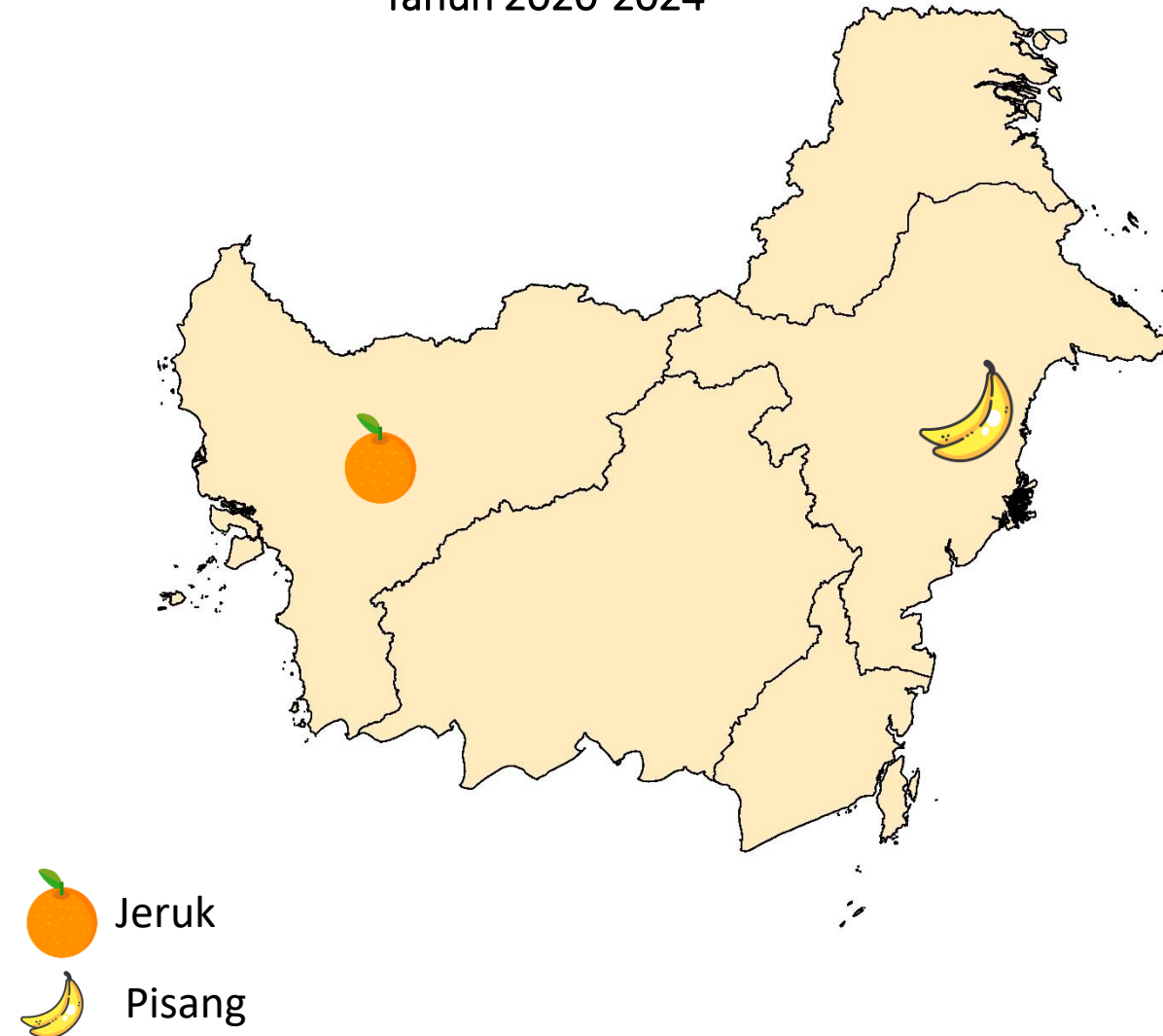
Sumber: Yayasan Madani Berkelanjutan, 2019

POTENSI HILIRISASI KOMODITAS

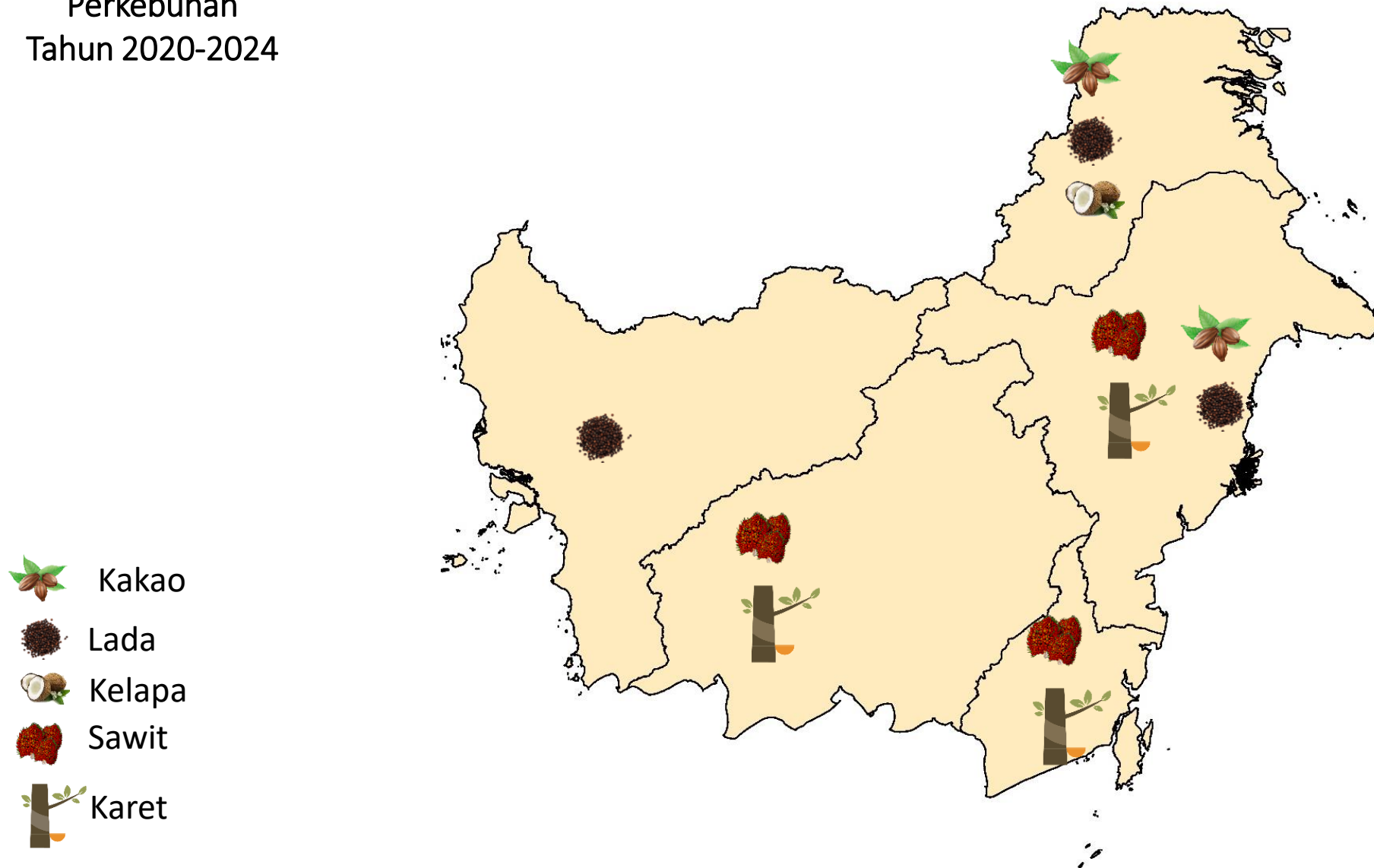
Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2020-2024



Buah dan Florikultura Tahun 2020-2024



Perkebunan
Tahun 2020-2024



PERIKANAN BUDIDAYA DI WILAYAH KALIMANTAN



Komoditas unggulan perikanan budidaya di Kalimantan:

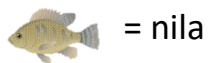
1. Rumput laut, Nila, Bandeng, Patin, Udang

Kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan perikanan budidaya:

1. Jaringan irigasi dan air bersih
2. Jalan akses

Balai Benih Ikan di Kalimantan :

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiingin,
Kalimantan Selatan (komoditas utama: patin)



= nila



= patin



= bandeng

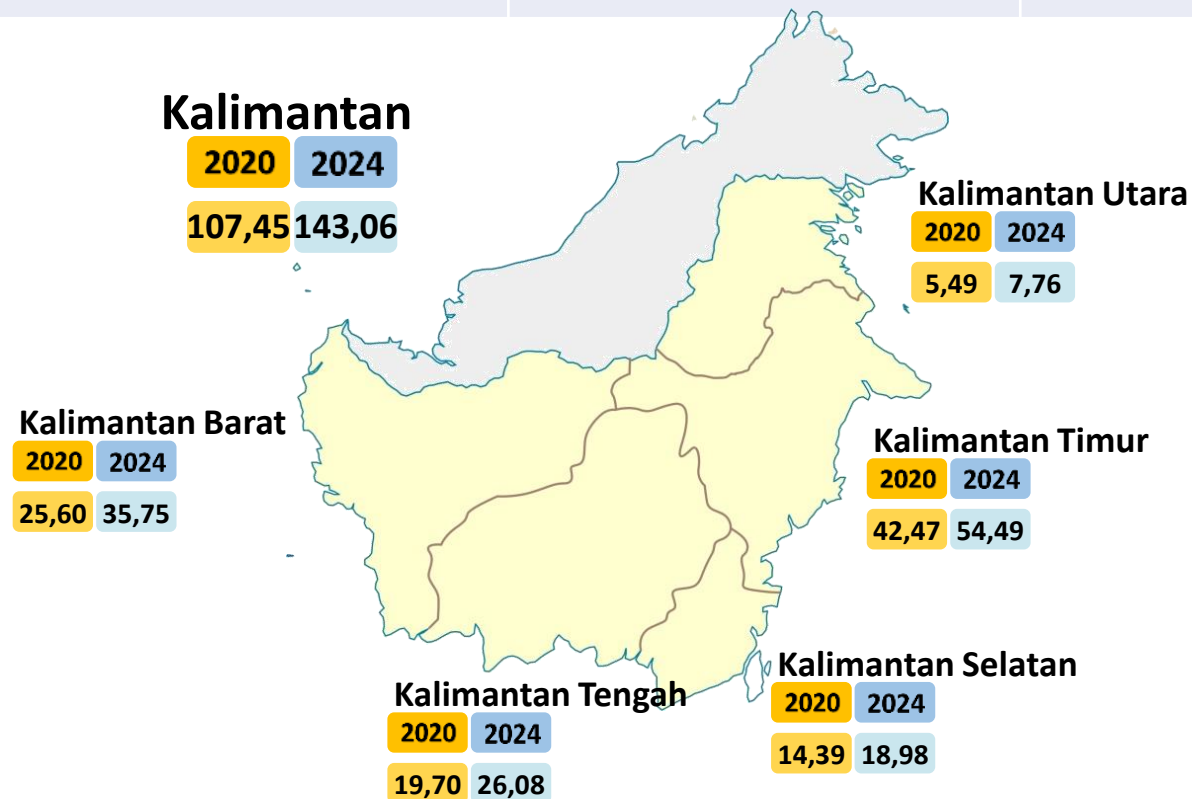


= rumput laut

PEMETAAN WILAYAH [TARGET INVESTASI PER PROVINSI]

PN 1: Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

NO	Arah Kebijakan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	31. Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	875,1-890,3	972,2-1.012,4	1.084,4-1.150,0	1.212,3-1.318,0	1.354,3-1.500,0



Target PMA PMDN (dalam Rp Triliun) untuk wilayah Kalimantan Tahun 2020-2024*

*Hasil Perhitungan per Provinsi atas Proyeksi
Penanaman Modal 2020-2024 (Skenario
Tinggi BKPM)

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI PRIORITAS KAWASAN BERBASIS INDUSTRI



**Kemampuan Akses
Pendanaan** dari
Pengelolaa Kawasan



Kesesuaian dengan
**Rencana Tata Ruang
Wilayah**



Ketersediaan **Anchor
Investor** yang berinvestasi
dalam Kawasan



Kesesuaian **komoditas
unggulan** dalam basis
produksi industri



Prioritas pada
kawasan di **luar
pulau Jawa**



Tingkat **kerawanan
terhadap Bencana**
(IRBI)



Dukungan dari **kawasan
hinterland** di sekitar
kawasan



Listrik



**Ketersediaan
Infrastruktur dalam
Kawasan**



Jaringan
Jalan



Lahan



Air Bersih



IPAL



Energi



**Ketersediaan
Infrastruktur Luar
Kawasan**



Pelabuhan



Air Bersih



Jalan Nasional/
Jalan Tol



TPS/TPA



Bandara



Perusda



Swasta
Lokal



**Bentuk entitias
pengelola**



Afiliasi
Konglomerasi Asing



BUMN



Asing atau JV
Asing

KRITERIA PEMILIHAN LOKASI PRIORITAS KAWASAN BERBASIS PARIWISATA



Kesesuaian dengan
**Rencana Tata Ruang
Wilayah**



Jumlah investasi
(Penanaman Modal Asing)



**Industri pengolahan
setempat** yang
mendukung



Prioritas pada
kawasan di **luar
pulau Jawa**



Tingkat **kerawanan
terhadap Bencana**
(IRBI)



Dukungan dari **kawasan
hinterland** di sekitar
kawasan



**Ketersediaan
Infrastruktur dalam
Kawasan**



Energi



Jaringan
Jalan



**Ketersediaan
Infrastruktur Luar
Kawasan**



Energi



Bandara



Air Bersih



Jalan Nasional/
Jalan Tol



Kuantitas dan kualitas
amenitas pendukung
berupa hotel



**Jumlah
wisatawan** yang
berkunjung



TPS



Air Bersih



IPAL

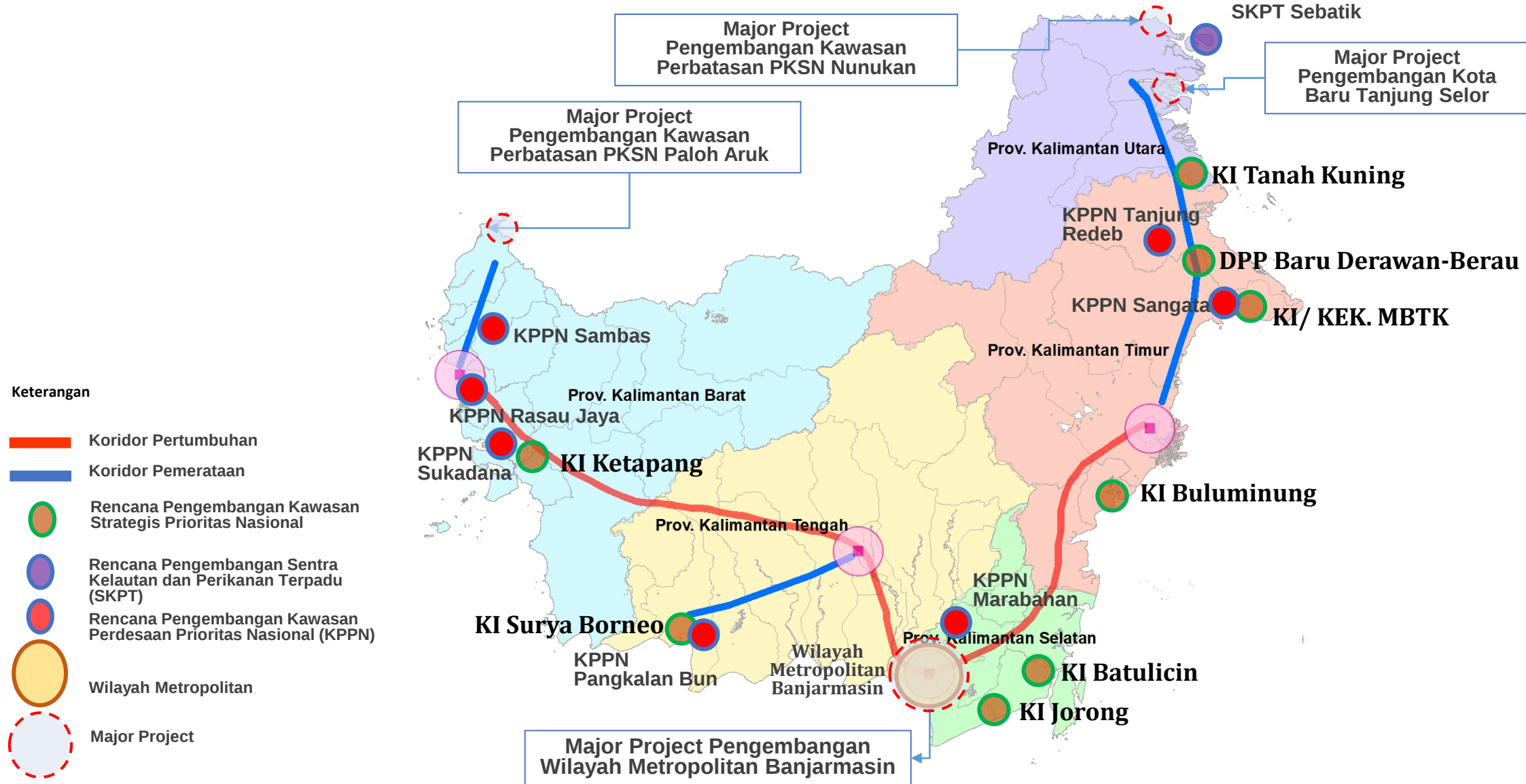


Memberi **kontribusi
tinggi** terhadap PAD



Memiliki **kemudahan
usaha yang baik**,
termasuk status KEK
eksisting dan usulan KEK

PEMETAAN KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS PULAU KALIMANTAN



KI Ketapang

Ketapang, Kalimantan Barat

KIPI Tanah Kuning

Bulungan, Kalimantan Utara



Highlight Indikasi Program Prioritas Infrastruktur Sektor Transportasi Wilayah Kalimantan

No.	Kawasan	Infrastruktur
1	KI Ketapang	- Jalan Akses KI Ketapang - Bandara Baru Ketapang Baru
2	KI dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning	Jalan Akses KIPI Tanah Kuning
3	KEK MBTK	Pengembangan Pelabuhan Maloy
4	KI Jorong	- Jalan Akses KI Jorong - Pengembangan Pelabuhan Pelaihari - Jalan Akses Pelabuhan

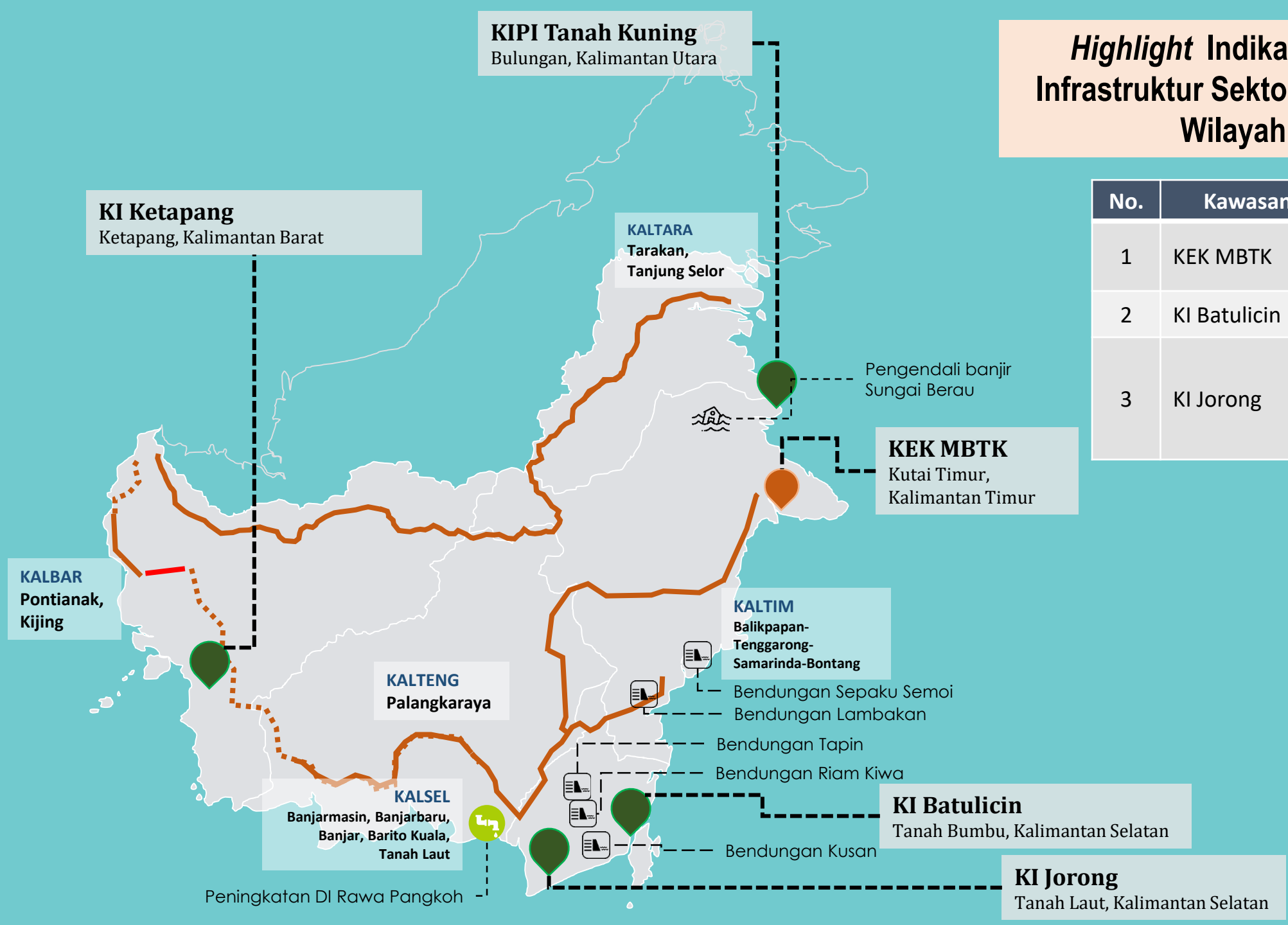
Highlight Indikasi Program Prioritas Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Wilayah Kalimantan



No.	Kawasan	Infrastruktur
1	KI Ketapang	- Jalan Akses KI Ketapang - Bandara Baru Ketapang Baru
2	KI dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning	Jalan Akses KIPI Tanah Kuning
3	KEK MBTK	Pengembangan Pelabuhan Maloy
4	KI Jorong	- Jalan Akses KI Jorong - Pengembangan Pelabuhan Pelaihari - Jalan Akses Pelabuhan

**Highlight Indikasi Program Prioritas
Infrastruktur Sektor Pengairan dan Irigasi
Wilayah Kalimantan**

No.	Kawasan	Infrastruktur
1	KEK MBTK	• Pengendalian Banjir Sungai Berau
2	KI Batulicin	• Bendungan Tapin • Bendungan Riam Kiwa • Bendungan Kusan
3	KI Jorong	• Peningkatan DI Rawa Pangkoh



LOKASI FOKUS PRIORITAS PENGEMBANGAN SMK UNTUK MENDUKUNG KI, KEK DAN KSPN DI KALIMANTAN

Kalsel

Energi: 3
Industri: 21
Industri Kreatif: 5
Kemaritiman: 2
Ket. Pangan: 17
Pariwisata: 6

Kaltara

Energi: 1
Industri: 4
Kemaritiman: 2
Pariwisata: 1

Kalbar

Energi: 1
Industri: 14
Kemaritiman: 4
Ket. Pangan: 33
Pariwisata: 2

Kalteng

Energi: 6
Industri: 14
Kemaritiman: 3
Ket. Pangan: 47
Pariwisata: 4

Kaltim

Energi: 13
Industri: 33
Kemaritiman: 3
Ket. Pangan: 28
Pariwisata: 7

Dukungan SMK Terhadap Sektor Energi, Sektor Industri, Sektor Industri Kreatif, Sektor Kemaritiman, Sektor Ketahanan Pangan, dan Sektor Pariwisata:

1. Provinsi Kalimantan Barat

- 1 SMK mendukung sektor energi
- 14 SMK mendukung sektor industri
- 4 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 33 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 2 SMK mendukung sektor pariwisata

2. Provinsi Kalimantan Selatan

- 3 SMK mendukung sektor energi
- 21 SMK mendukung sektor industri
- 5 SMK mendukung sektor industri kreatif
- 2 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 17 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 6 SMK mendukung sektor pariwisata

3. Provinsi Kalimantan Tengah

- 6 SMK mendukung sektor energi
- 14 SMK mendukung sektor industri
- 3 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 47 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 4 SMK mendukung sektor pariwisata

4. Provinsi Kalimantan Utara

- 1 SMK mendukung sektor energi
- 4 SMK mendukung sektor industri
- 2 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 1 SMK mendukung sektor pariwisata

5. Provinsi Kalimantan Timur

- 13 SMK mendukung sektor energi
- 33 SMK mendukung sektor industri
- 3 SMK mendukung sektor kemaritiman
- 28 SMK mendukung sektor ketahanan pangan
- 7 SMK mendukung sektor pariwisata

PERSEBARAN BLK DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA KERJA BARU DI PULAU KALIMANTAN TAHUN 2020-2024

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja 2020-2024^{c)}



Industri

Jabatan	Jumlah
Tenaga Presisi (Tekstil)	430.430
Tenaga Pengolah Industri Pengolahan	123.664
Tenaga Pengolah Industri Tekstil	52.979



Pertanian

Jabatan	Jumlah
Buruh Pertanian	32018
Petani Subsisten	12412
Petani/Pekerja Kehutanan Subsisten	7663



Konstruksi

Jabatan	Jumlah
Buruh Konstruksi Gedung	7.729
Manajer Perusahaan (Gedung)	4.431
Buruh Konstruksi Sipil	2.847



Pariwisata

Jabatan	Jumlah
Manajer Umum (Perdagangan)	55.071
Pelayan, Pramuwisata, Koki ^{d)}	23.700
Manajer Umum ^{d)}	12.809

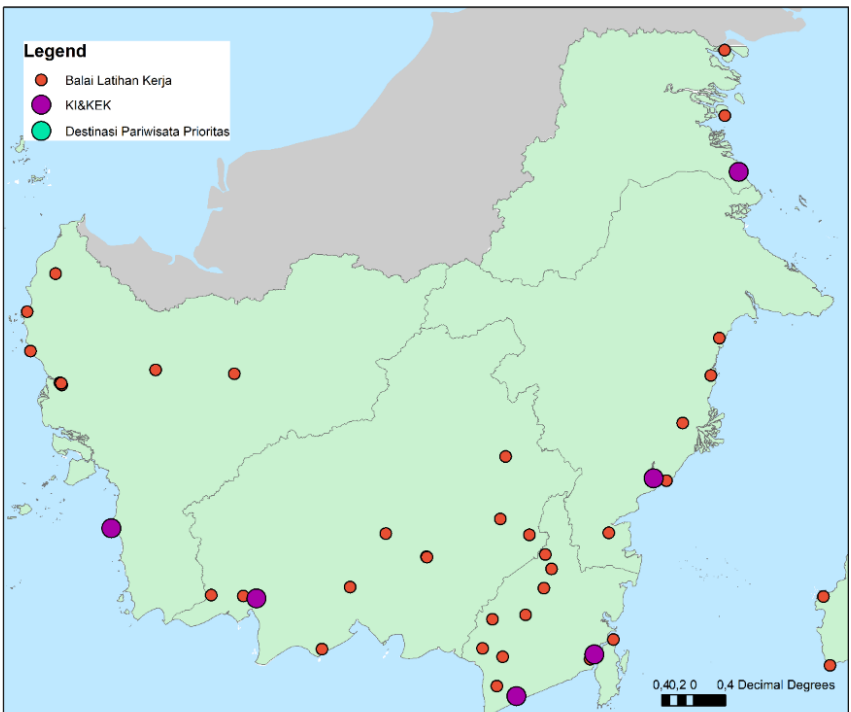
c) Kebutuhan **per tahun** terbesar berdasarkan jabatan di sektor ybs.

d) Subsektor penyediaan makanan dan minuman pariwisata.

Jumlah dan Kejuruan

BLK	
Jumlah lembaga	36 (33 BLK yang beroperasi)
Kejuruan dengan kapasitas peserta terbanyak	Otomotif
	Komputer/IT
	Menjahit
	Las
	Bisnis dan Manajemen

Sumber : Ditjen Binalattas, Kemnaker (2018)



LOKASI FOKUS PRIORITAS PENURUNAN *STUNTING*



● 2018

● Tambahan di
2019

● Tambahan di
2020

Cakupan intervensi:

- PMT ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus
- Pemantauan status gizi
- Akses air minum dan sanitasi
- Parenting dan PAUD
- Peningkatan kapasitas pemda

KALIMANTAN BARAT

1. Ketapang
2. Sambas
3. Sintang
4. Melawi
5. Kapuas Hulu

KALIMANTAN TENGAH

1. Barito Timur
2. Kotawaringin Timur
3. Kapuas
4. Barito Selatan
5. Gunung Mas

KALIMANTAN SELATAN

1. Hulu Sungai Utara
2. Tanah Bumbu
3. Tapin
4. Tabalong

KALIMANTAN TIMUR

1. Penajam Paser Utara
2. Kutai Barat
3. Kutai Kartanegara
4. Kutai Timur

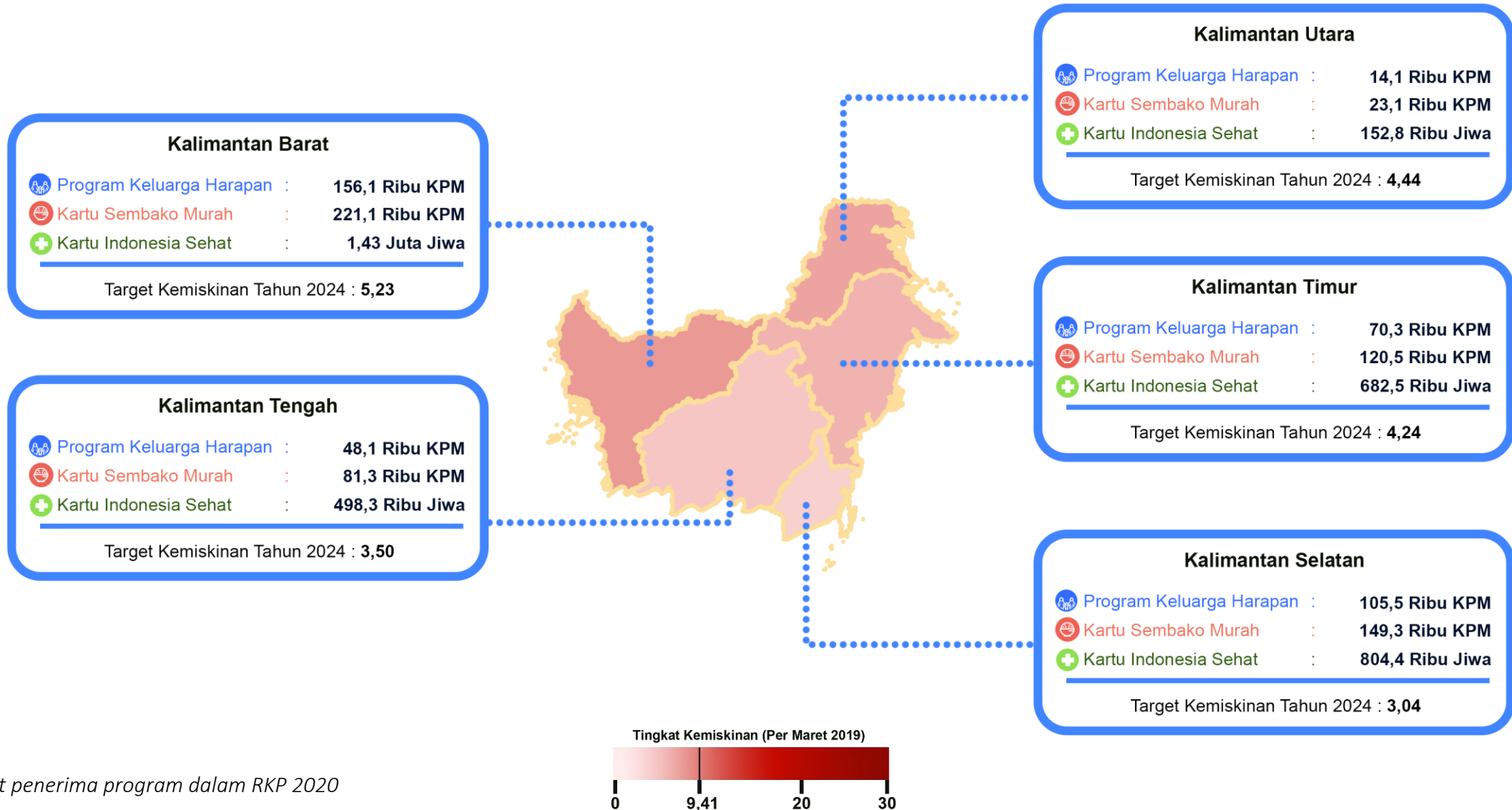
KALIMANTAN UTARA

1. Malinau
2. Nunukan
3. Bulungan

RENCANA SEBARAN PENERIMA MANFAAT

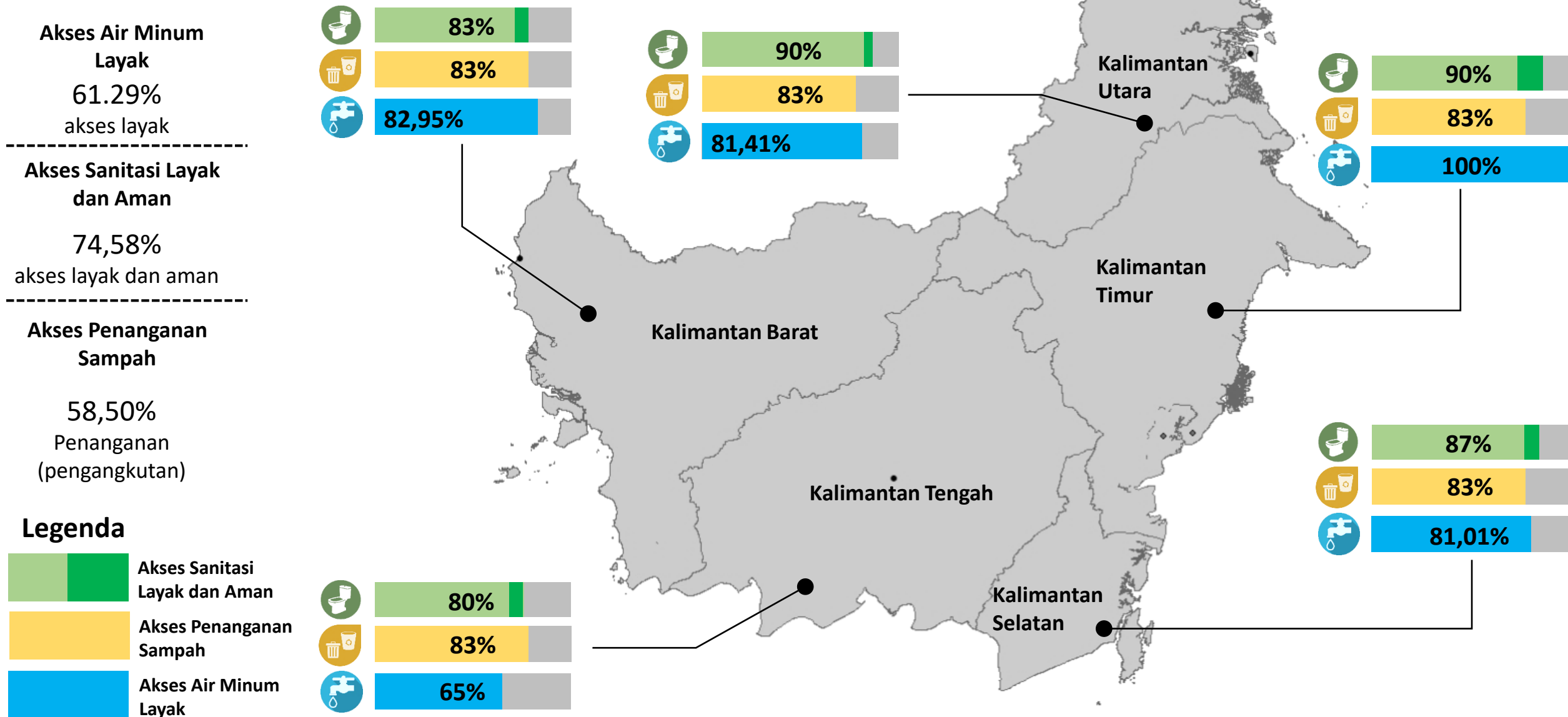
KEGIATAN PRIORITAS BANTUAN SOSIAL DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN TAHUN 2020-2024

DI PULAU KALIMANTAN *)



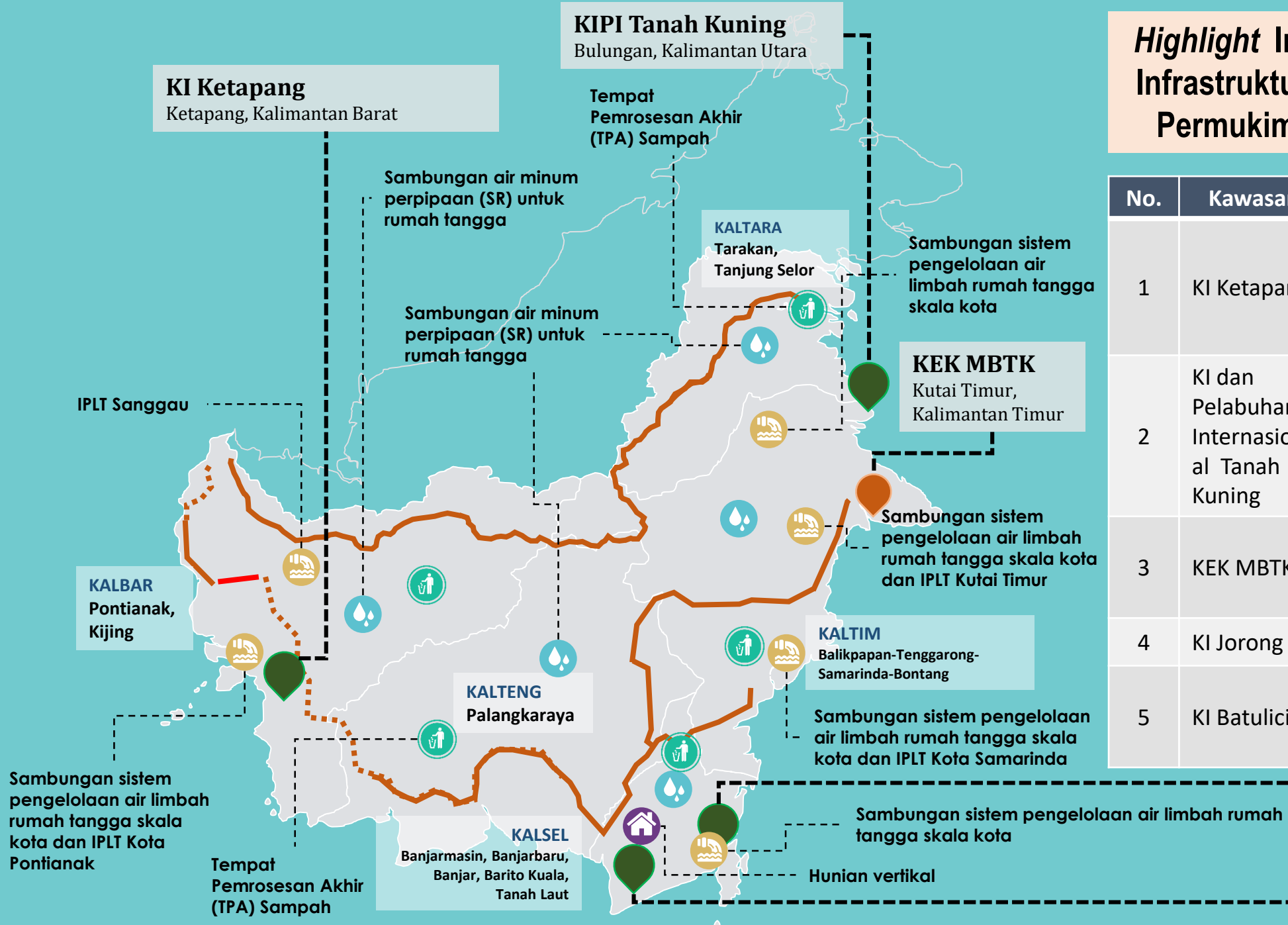
*) Target penerima program dalam RKP 2020

TARGET AKSES AIR MINUM DAN SANITASI 2024 PULAU KALIMANTAN



Highlight Indikasi Program Prioritas Infrastruktur Sektor Perumahan dan Permukiman Wilayah Kalimantan

No.	Kawasan	Infrastruktur
1	KI Ketapang	Sambungan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga skala kota dan IPLT Kota Pontianak
2	KI dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning	Sambungan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga skala kota
3	KEK MBTK	sistem pengelolaan air limbah rumah tangga skala kota dan IPLT Kutai Timur
4	KI Jorong	Hunian vertikal
5	KI Batulicin	Sambungan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga skala kota



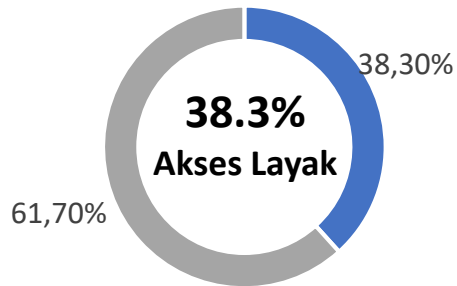
KI Batulicin
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

KI Jorong
Tanah Laut, Kalimantan Selatan

TARGET AKSES PERUMAHAN 2024 PULAU KALIMANTAN

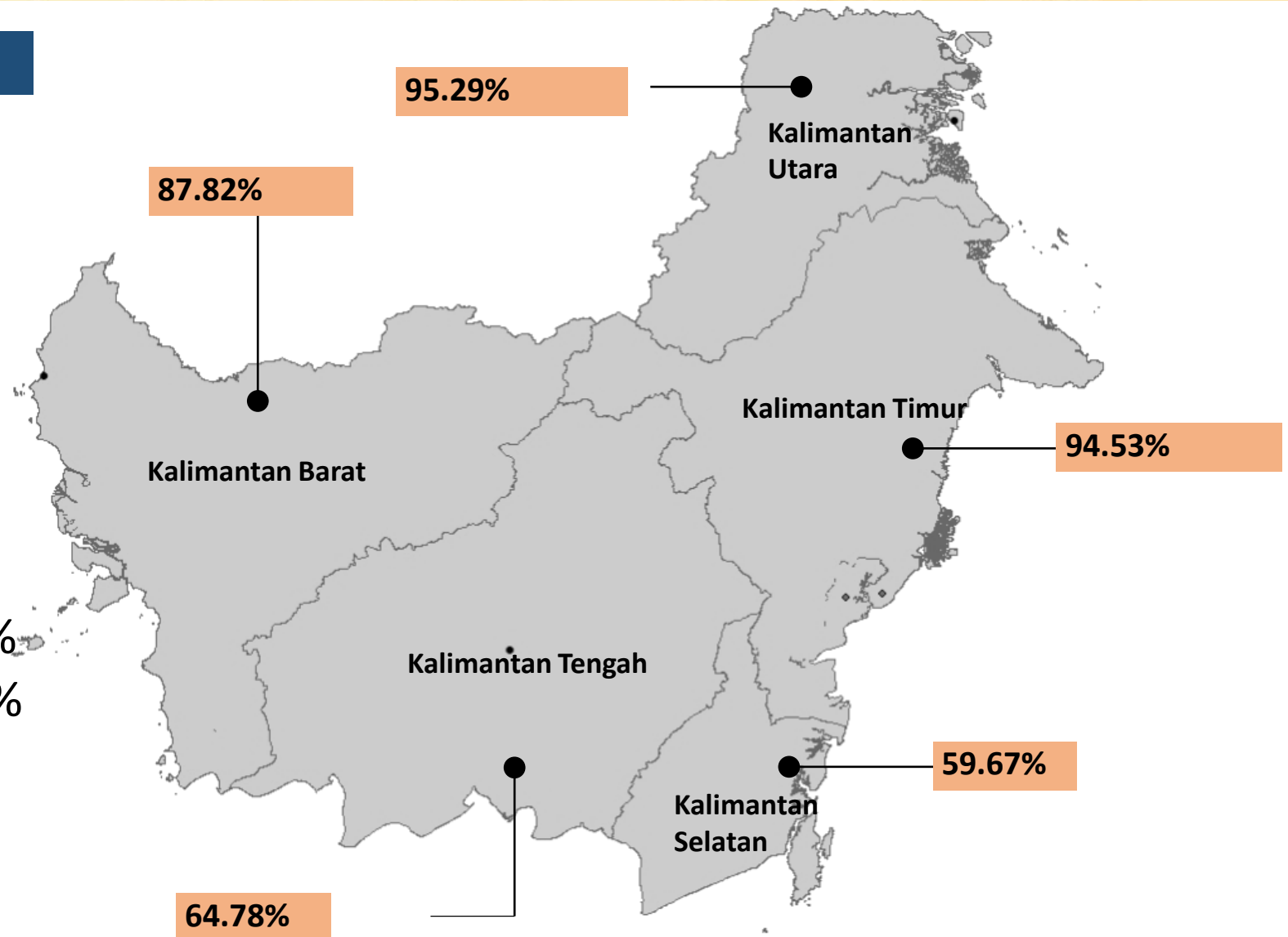
Capaian Akses Nasional (2018)

Rumah Tangga yang Tinggal di Hunian Layak

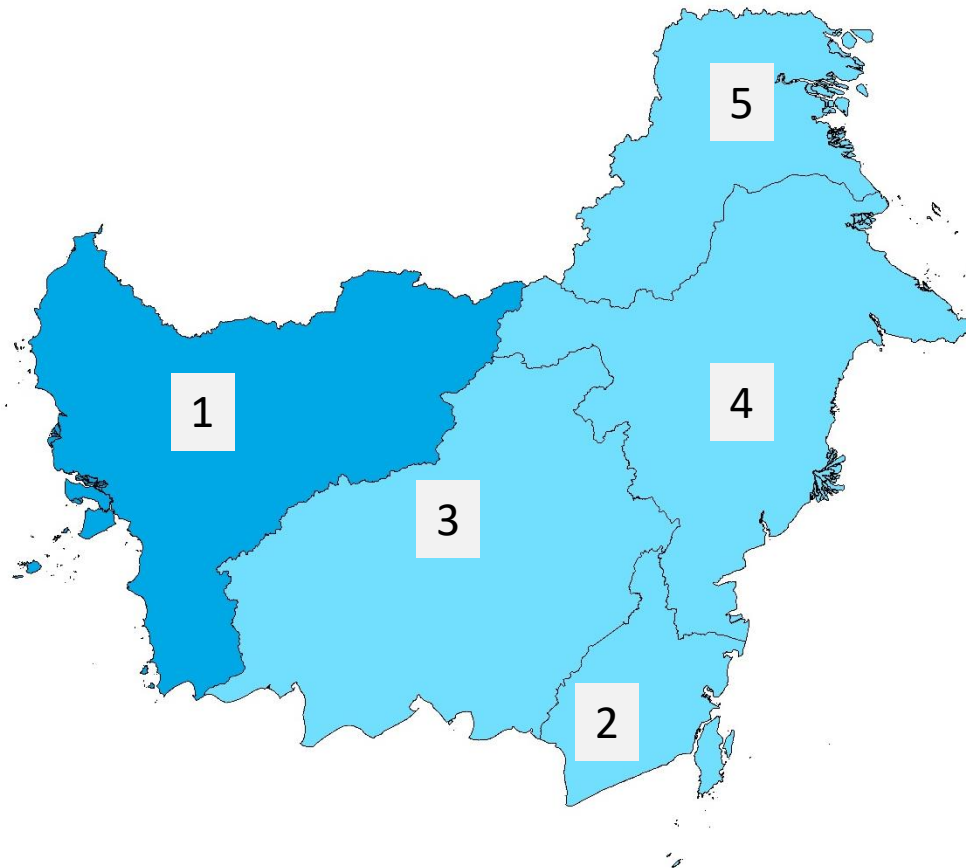


Capaian Akses Provinsi (2018)

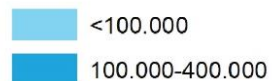
- Kalimantan Barat: 49.17%
- Kalimantan Tengah: 34.28%
- Kalimantan Selatan: 39.63%
- Kalimantan Timur: 59.19%
- Kalimantan Utara: 59.87%



LOKASI FOKUS PRIORITAS PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI KALIMANTAN



KETERANGAN



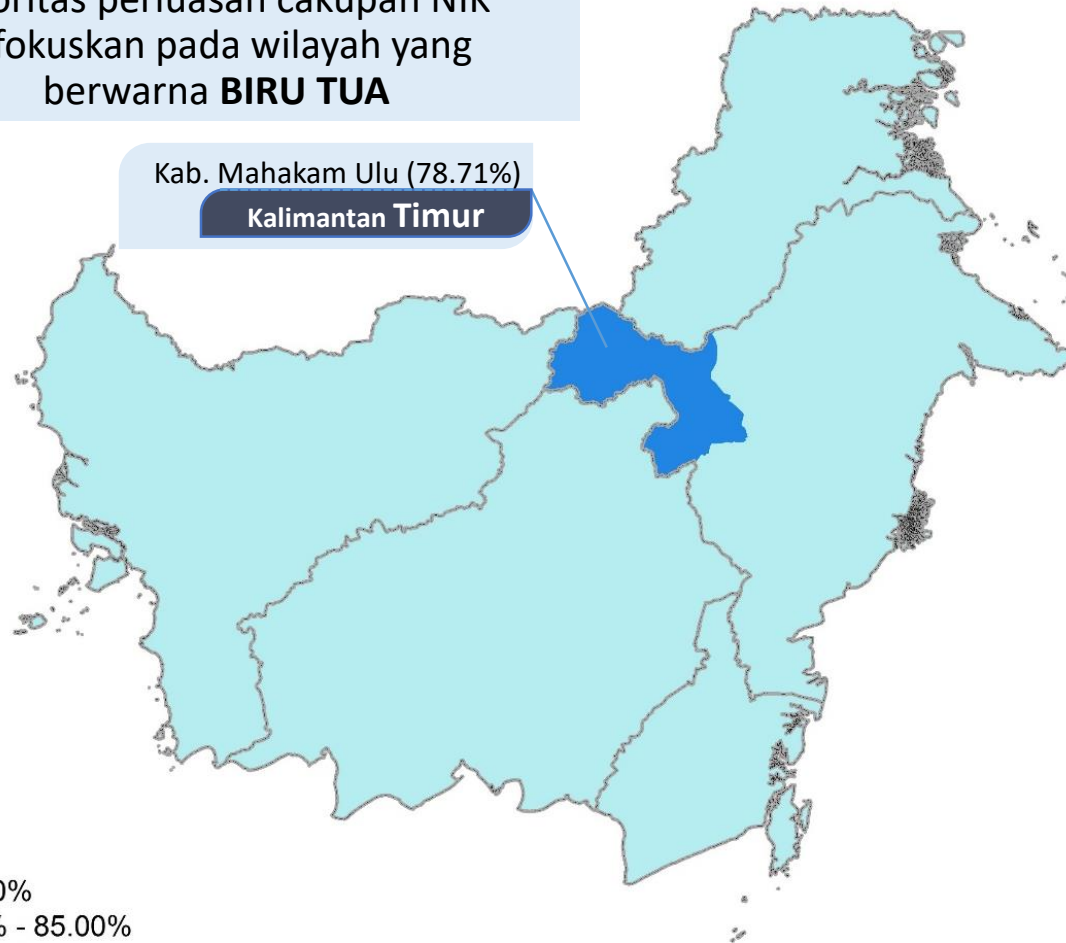
Prioritas wilayah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali bersekolah:

1. Provinsi Kalimantan Barat (118.845 Anak Tidak Sekolah)
2. Provinsi Kalimantan Selatan (83.409 Anak Tidak Sekolah)
3. Provinsi Kalimantan Tengah (53.579 Anak Tidak Sekolah)
4. Provinsi Kalimantan Timur (35.794 Anak Tidak Sekolah)
5. Provinsi Kalimantan Utara (12.041 Anak Tidak Sekolah)

TARGET PRIORITAS PERLUASAN CAKUPAN NIK KALIMANTAN 2020-2024

Prioritas perluasan cakupan NIK difokuskan pada wilayah yang berwarna **BIRU TUA**

Kab. Mahakam Ulu (78.71%)
Kalimantan Timur



LEGENDA

	< 70,00%
	70,01% - 85,00%
	> 85,01%



Perluasan Kelompok Khusus

- Rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan
- Partisipasi aktif



Integrasi Sensus Penduduk 2020

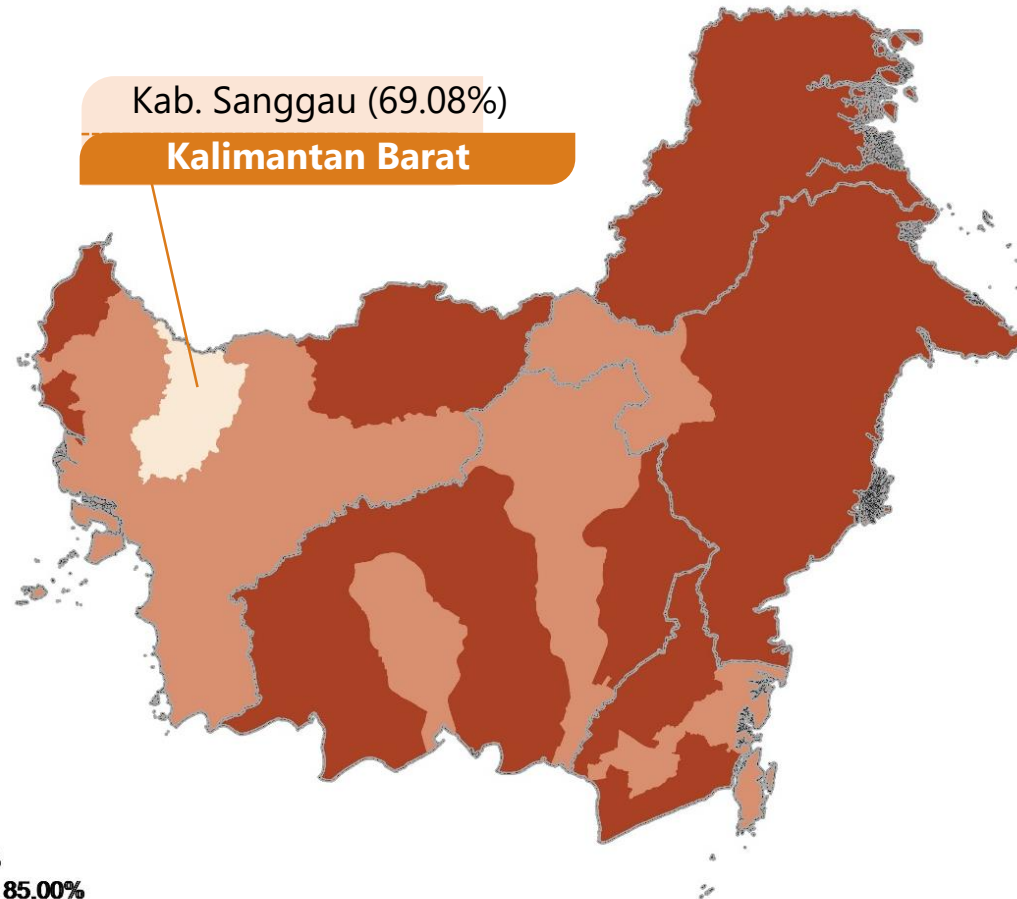
- Data kependudukan berbasis NIK tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk
- Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan



Integrasi Data

- NIK digunakan sebagai identitas tunggal dalam layanan publik

TARGET PRIORITAS PERLUASAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN KALIMANTAN 2020-2024



LEGENDA

- < 70,00%
- 70,01% - 85,00%
- > 85,00%



Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif
- Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu
- Kebijakan tentang layanan terpadu
- Kebijakan layanan keliling terpadu
- Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa

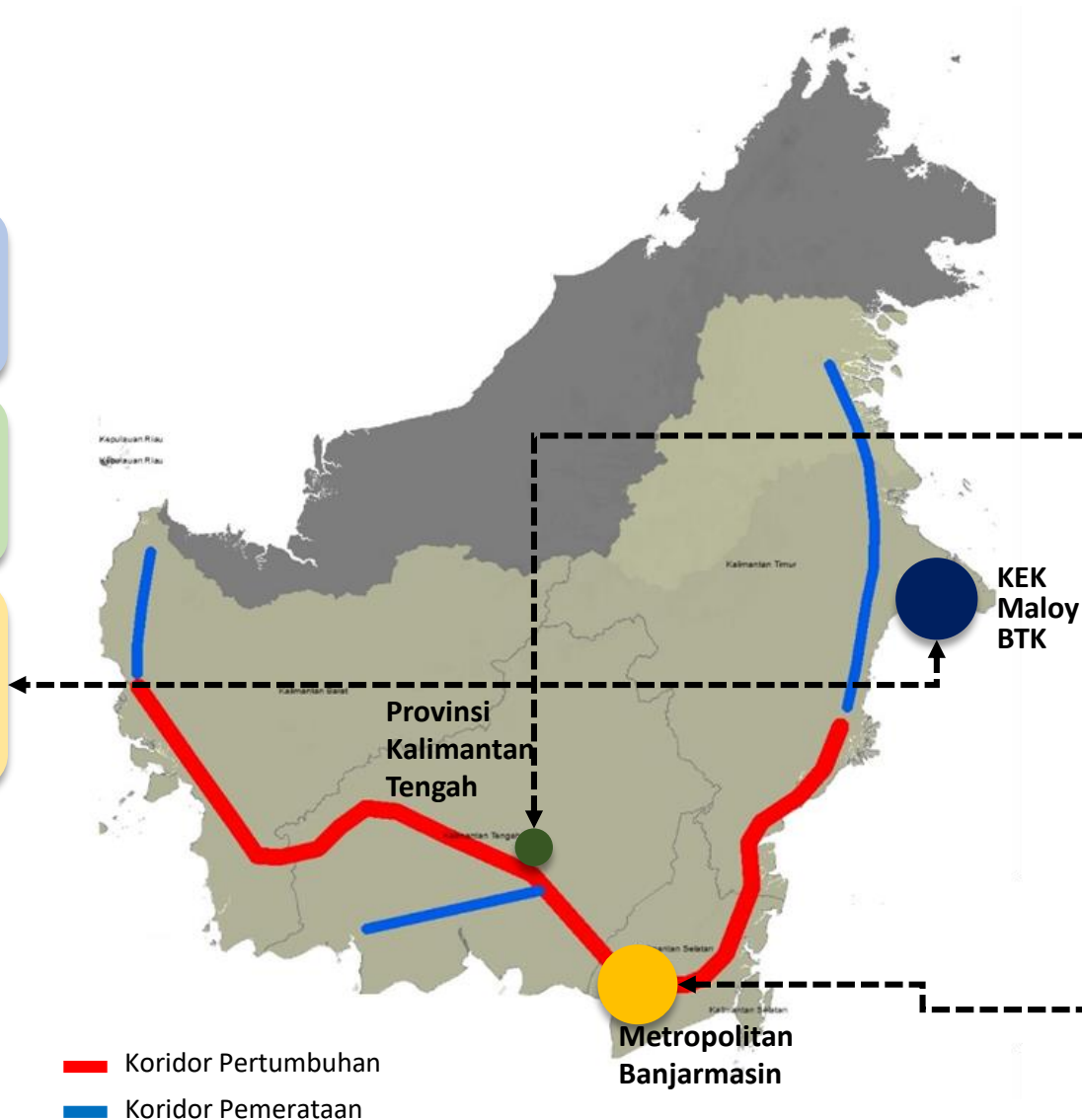
Prioritas Perluasan Kepemilikan Akta
Kelahiran difokuskan pada wilayah yang
berwarna **COKELAT MUDA**

INDIKASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK K/L – KP 1, 2, dan 3

KP 1 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

Pro PN
Percepatan Peningkatan Investasi
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Pro K/L
Pembangunan infrastruktur
tampungan air multi guna berbasis
wilayah



KP 2 PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

Pro PN
Pengembangan Industri berbasis
perkebunan

Pro K/L
Peningkatan produksi kelapa sawit

KP 3 PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Pro PN
Pengembangan Wilayah
Metropolitan Banjarmasin

Pro K/L
Pembangunan KA Tanjung Paringin-
Barabai-Rantau-Martapura-
Banjarmasin

INDIKASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK K/L – KP 1,2, & 3:

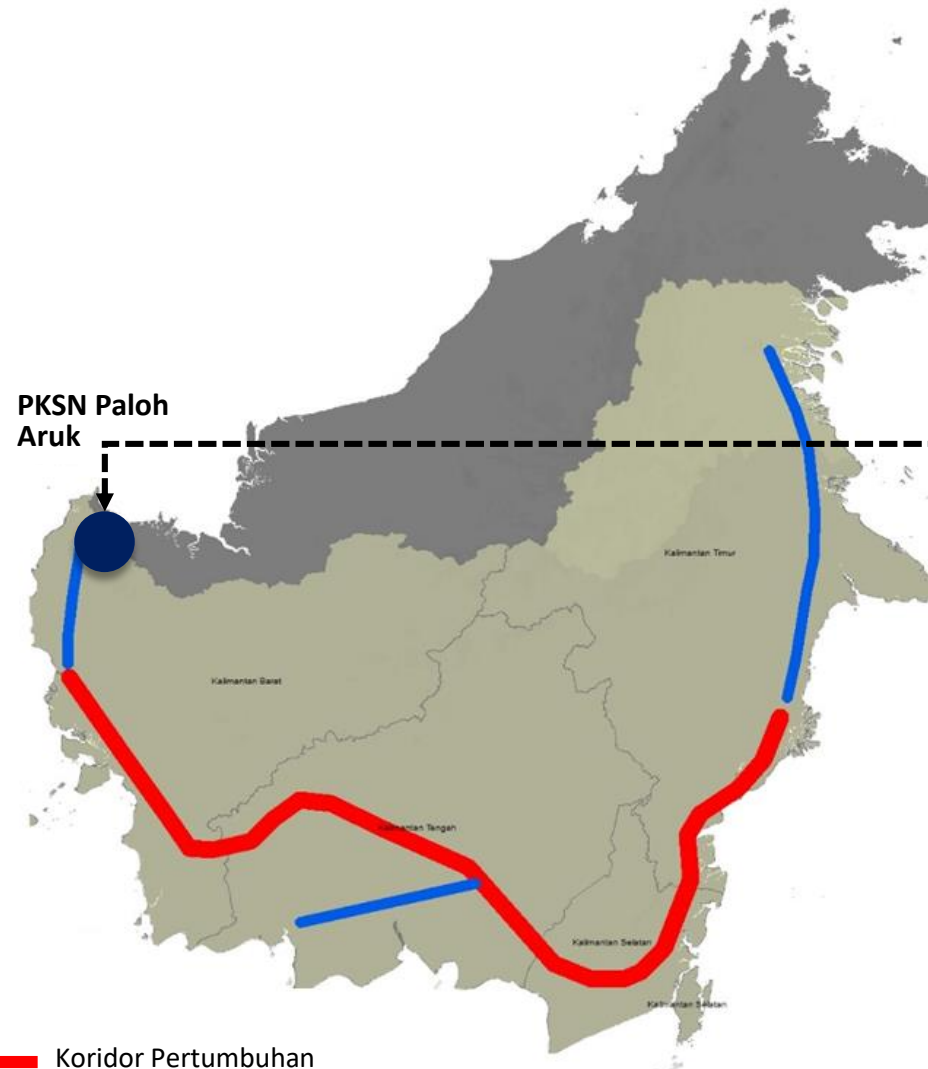
RINCIAN TARGET, ANGGARAN, DAN LOKASI

Kebijakan/ Strategi	Indikator	Target		Indikatif Pendanaan (Rp Miliar)		Total (Rp. M)	Lokasi	Major Project	Kegiatan K/L	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2020	2024	2020	2024						
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis											
Pro PN: Percepatan Peningkatan Investasi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan) terhadap laju pertumbuhan investasi Provinsi Kaltim										
Pro K/L: Pembangunan infrastruktur tampungan air multi guna berbasis wilayah							Waduk Lambakan, Sepaku semoi, Waduk Marangkayu		Pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya.	Program pengelolaan sumber daya air	Kementerian PUPR
KP2: Pengembangan Sektor Unggulan											
Pro PN: Pengembangan Industri berbasis perkebunan	jumlah produksi (Ton)										
Pro K/L: Peningkatan produksi kelapa sawit	jumlah produksi (Ton)								Akselerasi, Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Kementerian Pertanian
KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan											
Pro PN: Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin											
Pro K/L: Pembangunan KA Tanjung Paringin-Barabai-Rantau-Martapura-Banjarmasin	Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)	0	18,00	0	400	400	Kota Banjarmasin	MP	Pengelolaan Prasarana Perkeretaapian	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan

KP 4 PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

Pro PN
Pembangunan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan dan
Permukiman

Pro K/L
Pengembangan Sistem
Penyelenggaraan Air Minum Layak
dan Aman



— Koridor Pertumbuhan
— Koridor Pemerataan

KP 5 PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, DAN PERDESAAN

Pro PN
Pengembangan Ekonomi Kawasan
Perbatasan Negara di PKSN Paloh-Aruk

Pro K/L
Pengembangan Area Sentra Industri
Sawit

KP 6 KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH

Pro PN
Peningkatan Pelayanan Pertanahan

Pro K/L
Perapatan Batas Kawasan Hutan

INDIKASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL DAN PROYEK K/L – KP 4,5, & 6:

RINCIAN TARGET, ANGGARAN, DAN LOKASI

Kebijakan/ Strategi	Indikator	Target		Indikatif Pendanaan (Rp Miliar)		Total (Rp. M)	Lokasi	Major Project	Kegiatan K/L	Program K/L	Instansi Pelaksana
		2020	2024	2020	2024						
KP 4: Peningkatan Pelayanan Dasar											
Pro PN: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dan aman										
Pro K/L: Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum Layak dan Aman	Peningkatan kapasitas SPAM terbangun (lpd)	19	57	18,924	123,006			Pembangunan 10jt Sambungan Rumah	Pembinaan dan Pengembangan SPAM	Pengembangan SPAM dan Sanitasi Layak dan Aman	Kementerian PUPR
KP 5: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, dan Perdesaan											
Pro PN: Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Paloh-Aruk											
Pro K/L: Pengembangan Area Sentra Industri Sawit	Luas Area Industri Sawit yang dikembangkan	8900	8900	40	40	200	Kabupaten Sambas	Mendukung Major Project	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kementerian Perindustrian
KP 6: Kelembagaan dan Keuangan Daerah											
Pro PN: Peningkatan Pelayanan Pertanahan											
Pro K/L: Perapatan Batas Kawasan Hutan	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km)	3666	3666	78,17	102,46	449,51	Pusat (alokasi Kementerian)		Pengukuran dan Pemetaan Dasar	Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	Kementerian ATR/BPN

4. STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN

SASARAN PEMBANGUNAN, POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BASIS KOMODITAS *)

Karet, Kelapa Sawit, Lada
Batu Bara

INDUSTRI DENGAN NILAI TAMBAH YANG BESAR **)

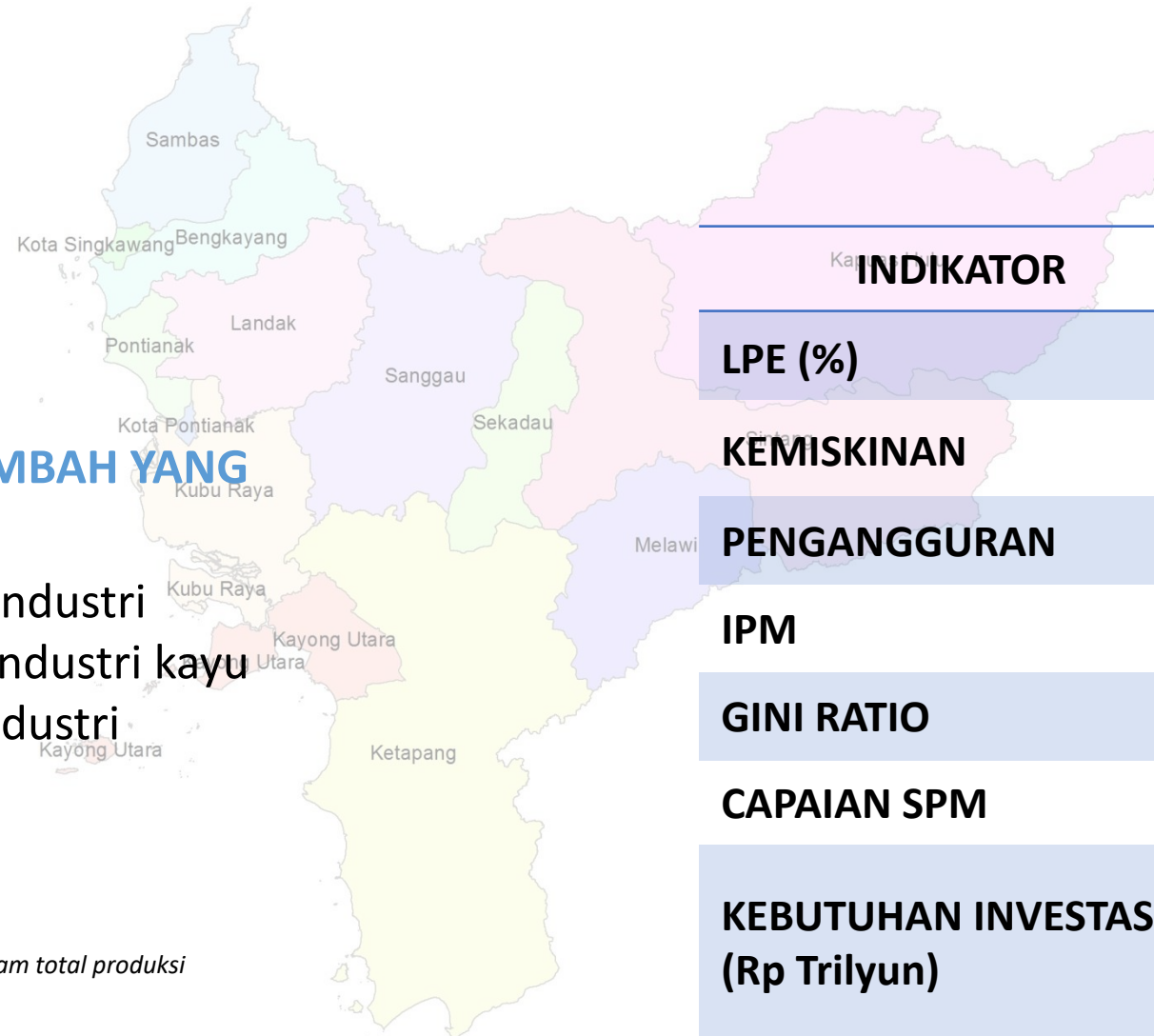
Industri penggergajian kayu; Industri
minyak makan kelapa sawit; Industri kayu
lapis; Industri karet reman; Industri
remilling karet

Keterangan:

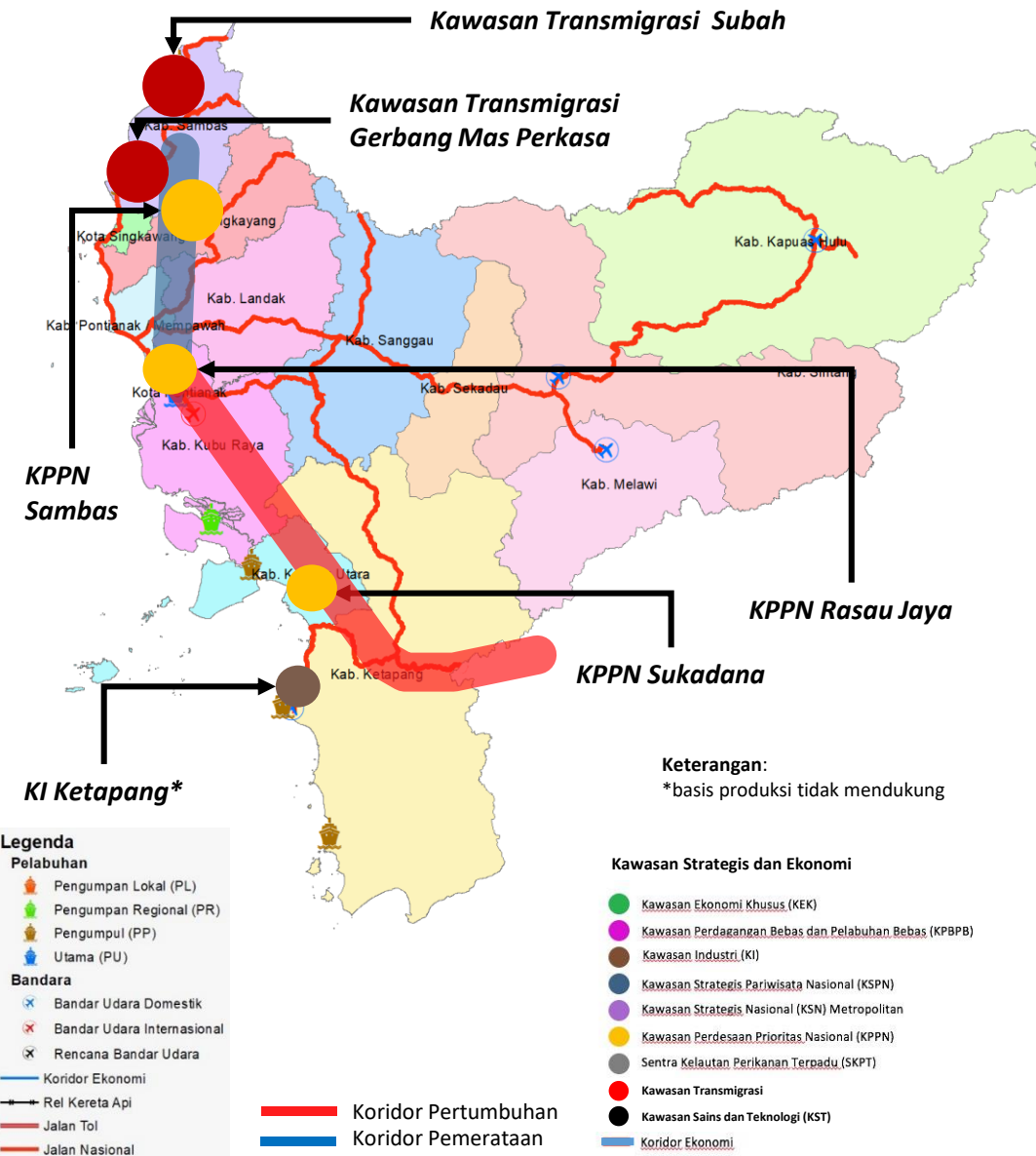
*) angka dalam kurung menunjukkan peran wilayah dalam total produksi nasional

**) Industri besar dan menengah; ISIC 5;

Nilai tambah = upah + surplus usaha + pajak



INDIKATOR	2020	2024
LPE (%)	5,35	6,27
KEMISKINAN	6,43	5,23
PENGANGGURAN	3,8	3,18
IPM	68	71,22
GINI RATIO	0,320	
CAPAIAN SPM	56,15	100,00
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Trilyun)	450-600 (Total 2020-2024)	



1. Mengembangkan komoditas unggulan yaitu karet, kelapa sawit, lada dan batu bara;
2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hilirisasi komoditas unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu karet dan kelapa sawit;
3. Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Ketapang yang berbasis pengolahan logam aluminium dan bauksit*;
4. Mengembangkan KPPN Rasau Jaya, KPPN Sukadana, dan KPPN Sambas sebagai penghasil komoditas padi dan jagung pipil melalui upaya hilirisasi industri untuk menggerakkan ekonomi lokal;
5. Mempersiapkan Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Subah sebagai kawasan penghasil komoditas perkebunan (karet dan kelapa sawit) melalui upaya hilirisasi industri kecil menengah;
6. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Gerbang Mas Perkasa di Kab. Sambas;
7. Mengembangkan Taman Nasional Danau Sentarum, Bukit Baka, Gunung Niut, Kepulauan Karimata dan Pantai Selimpai;
8. Mengembangkan kawasan lintas batas negara Temaju, Aruk, Jagoi Babang, Entikong, Jasa, Badau;
9. Membangun lokasi prioritas perbatasan di Kab. Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu;
10. Membangun daerah tertinggal di Kab. Sintang;
11. Melaksanakan percepatan pelaksanaan SPM.

SASARAN PEMBANGUNAN, POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

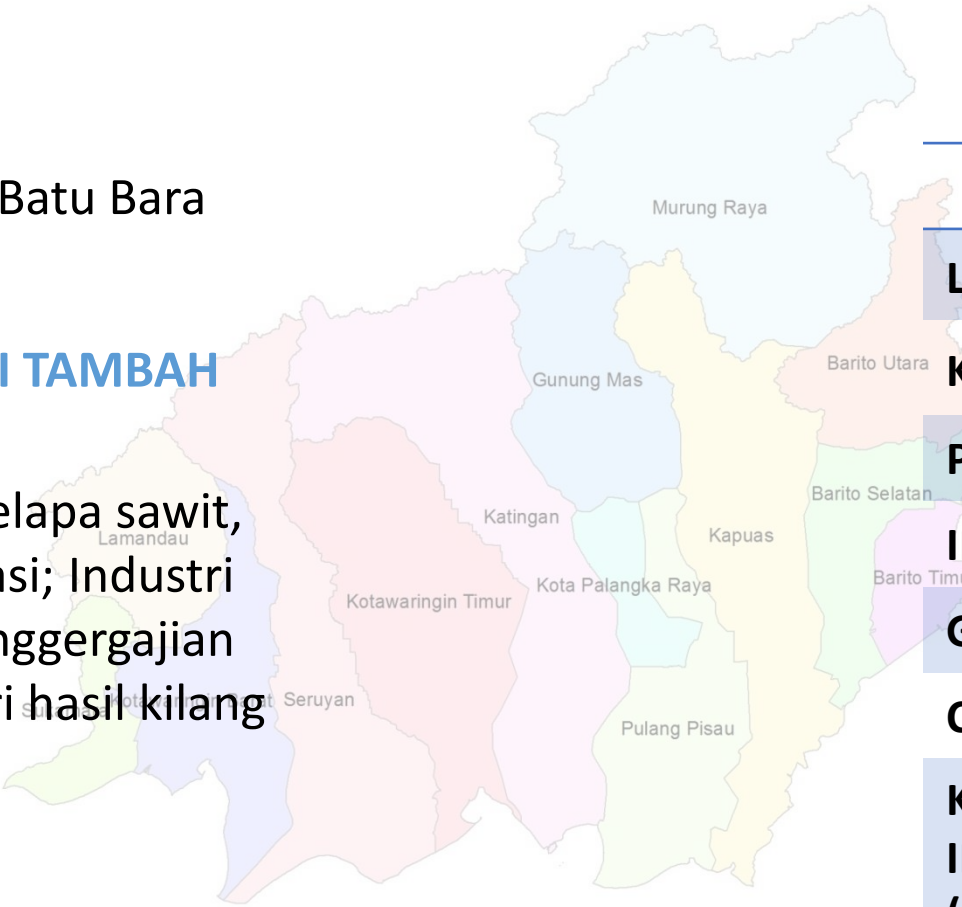
BASIS KOMODITAS *)

Karet, Kelapa Sawit

Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara

INDUSTRI DENGAN NILAI TAMBAH YANG BESAR **)

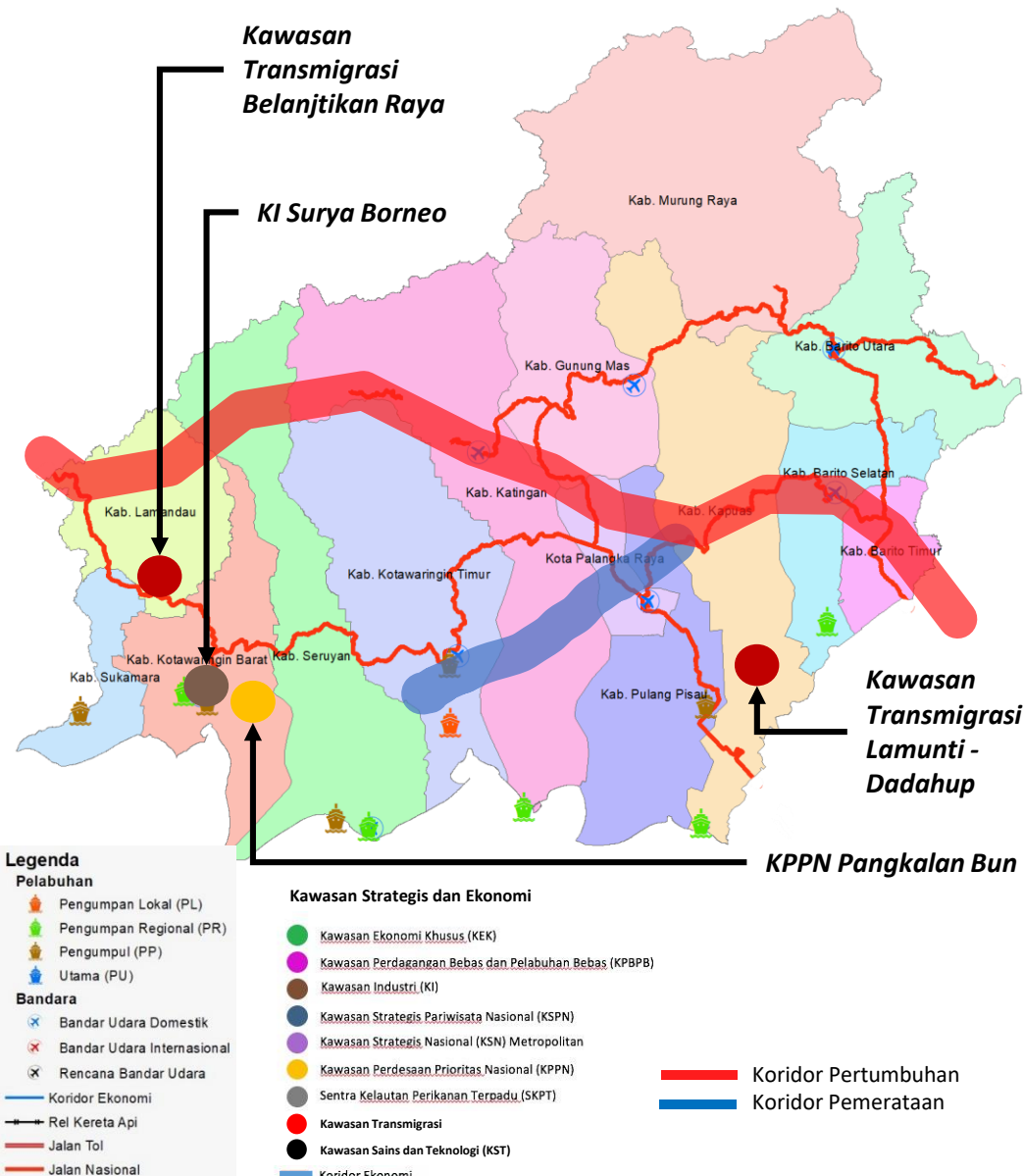
Industri minyak makan kelapa sawit,
Industri kayu lapis laminasi; Industri
karet reman; Industri penggergajian
kayu; Industri produk dari hasil kilang
minyak bumi



INDIKATOR	2020	2024
LPE (%)	5,65	6,54
KEMISKINAN	4,72	3,50
PENGANGGURAN	3,7	3,52
IPM	71,52	71,67
GINI RATIO	0,327	
CAPAIAN SPM	61,02	100,00
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Trilyun)	350-460 (Total 2020-2024)	

Keterangan:
 *) angka dalam kurung menunjukkan peran wilayah dalam total produksi nasional
 **) Industri besar dan menengah; ISIC 5;
 Nilai tambah = upah + surplus usaha + pajak

STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



1. Mengembangkan komoditas unggulan yaitu karet, kelapa sawit, lada, dan batubara;
2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hilirisasi komoditas unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu karet, kelapa sawit, dan minyak bumi;
3. Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Surya Borneo yang berbasis pengolahan kelapa sawit;
4. Mengembangkan KPPN Pangkalan Bun sebagai penghasil komoditas perikanan melalui upaya hilirisasi industri untuk menggerakkan ekonomi lokal;
5. Mempersiapkan Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya dan Lamunti - Dadahup sebagai kawasan penghasil komoditas perkebunan (karet dan kelapa sawit) melalui upaya hilirisasi industri untuk mendukung KI Surya Borneo;
6. Mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota;
7. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Lamunti di Kab. Kapuas;
8. Meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan;
9. Melaksanakan percepatan pelaksanaan SPM.

SASARAN PEMBANGUNAN, POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BASIS KOMODITAS *)

Kelapa Sawit, Kedelai

Perikanan Tangkap

Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara

INDUSTRI DENGAN NILAI TAMBAH YANG BESAR **)

Industri minyak makan kelapa sawit;

Industri semen; Industri kayu lapis; Industri

karet reman; Industri besi dan baja dasar

Keterangan:

*) angka dalam kurung menunjukkan peran wilayah dalam total produksi nasional

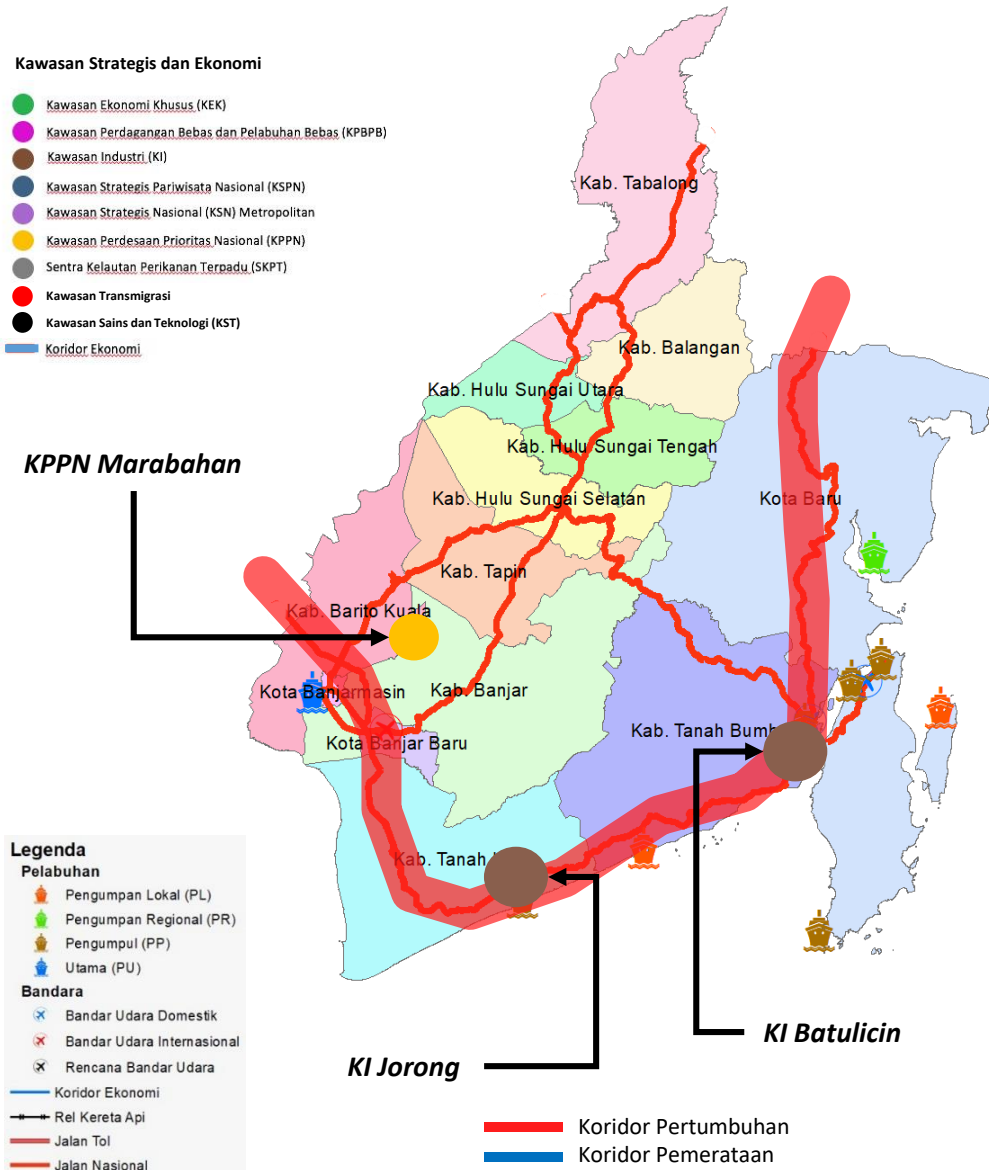
**) Industri besar dan menengah; ISIC 5;

Nilai tambah = upah + surplus usaha + pajak



INDIKATOR	2020	2024
LPE (%)	5,30	6,28
KEMISKINAN	4,20	3,04
PENGANGGURAN	4,2	3,48
IPM	71,58	74,05
GINI RATIO	0,330	
CAPAIAN SPM	64,17	100,00
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Trilyun)	400-520 (Total 2020-2024)	

STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



1. Mengembangkan sektor unggulan yaitu karet dan kelapa sawit;
2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hilirisasi komoditas unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu kelapa sawit dan karet;
3. Mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Batu Licin yang fokus pada pengolahan agro, rumput laut, dan logam.;
4. Menginisiasi pembangunan Kawasan Industri Jorong yang berbasis agro dan pengolahan logam;
5. Mengembangkan KPPN Marabahan sebagai penghasil komoditas patin dan padi melalui upaya hilirisasi industri untuk menggerakkan ekonomi lokal;
6. Mendorong percepatan pembangunan moda transportasi masal (kereta api)
7. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di Cahaya Baru Kab. Barito Kuala;
8. Meningkatkan keterkaitan, peran, dan fungsi Kota Rawa sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Rawa;
9. Mempercepat pelaksanaan SPM.

STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KP 1 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS

PRO-PN: Fasilitasi investasi dan perizinan pembangunan KI Batulicin

PRO K/L: Pembangunan infrastruktur tampungan air multi guna berbasis wilayah

KP 2 PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

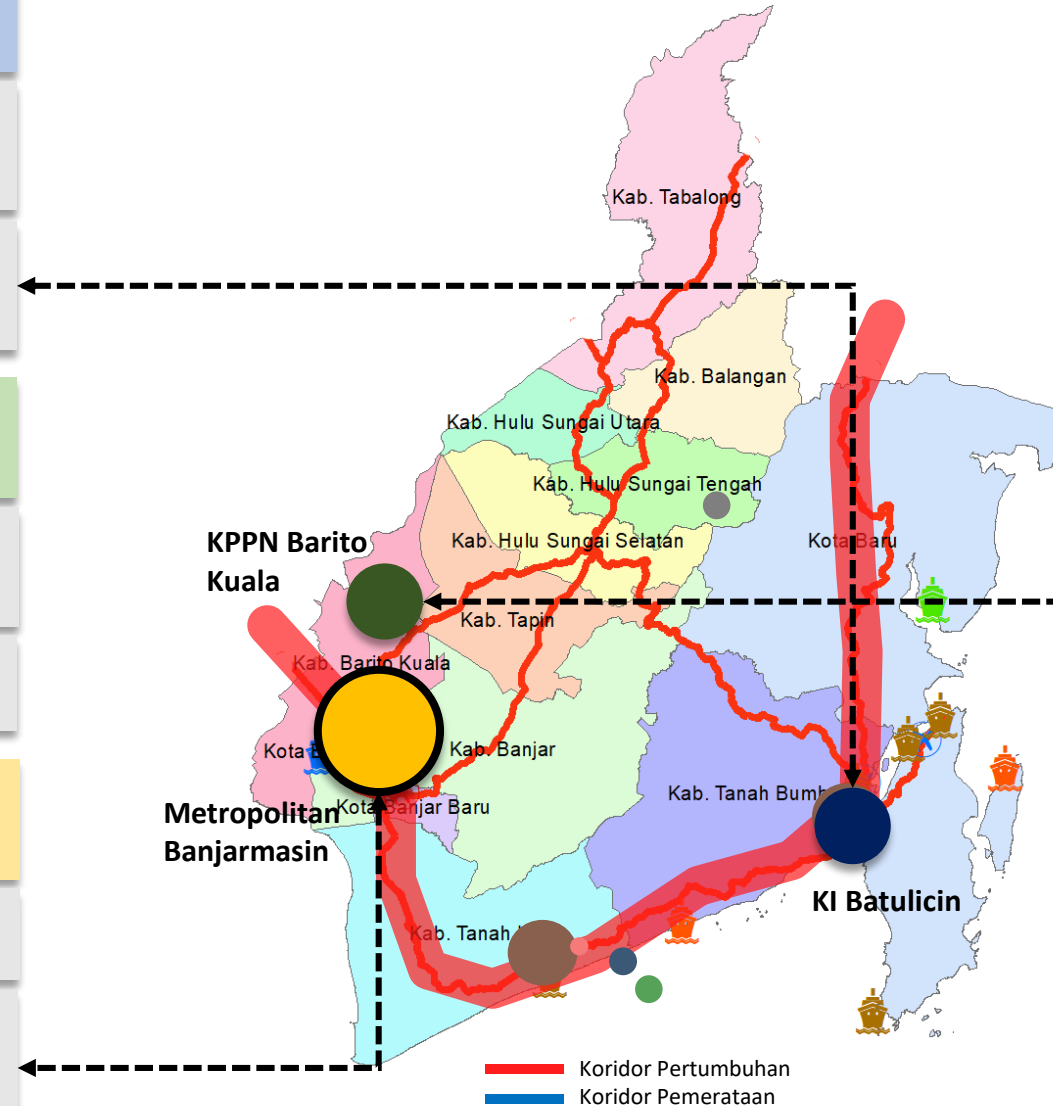
PRO-PN: Pengembangan Industri berbasis perkebunan

PRO K/L: Peningkatan produksi kelapa sawit

KP 3 PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

PRO-PN: Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin

PRO K/L: Panjang Jalur Kereta Api Regional (angkutan Barang dan Penumpang) dibangun (km)



KP 4 PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PRO-PN: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

PRO K/L: Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

KP 5 PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, DAN PERDESAAN

PRO-PN: Pembangunan KPPN Barito Kuala dan Banjar

PRO K/L: Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Ekonomi di Kawasan Perdesaan

KP 6 KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH

PRO-PN: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

PRO K/L: Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

SASARAN PEMBANGUNAN, POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BASIS KOMODITAS *)

Kelapa Sawit, Lada

Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara

INDUSTRI DENGAN NILAI TAMBAH YANG BESAR **)

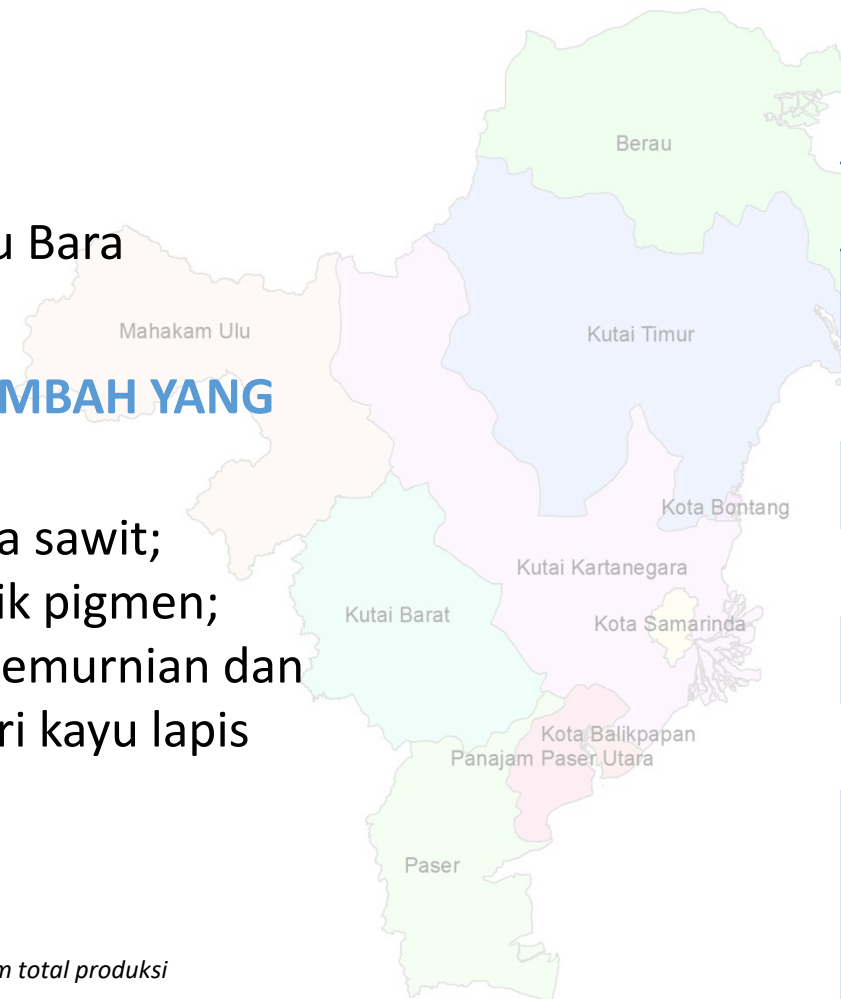
Industri minyak makan kelapa sawit;
Industri kimia dasar anorganik pigmen;
Industri kayu lapis; Industri pemurnian dan
pengolahan gas alam; Industri kayu lapis
laminasi

Keterangan:

*) angka dalam kurung menunjukkan peran wilayah dalam total produksi nasional

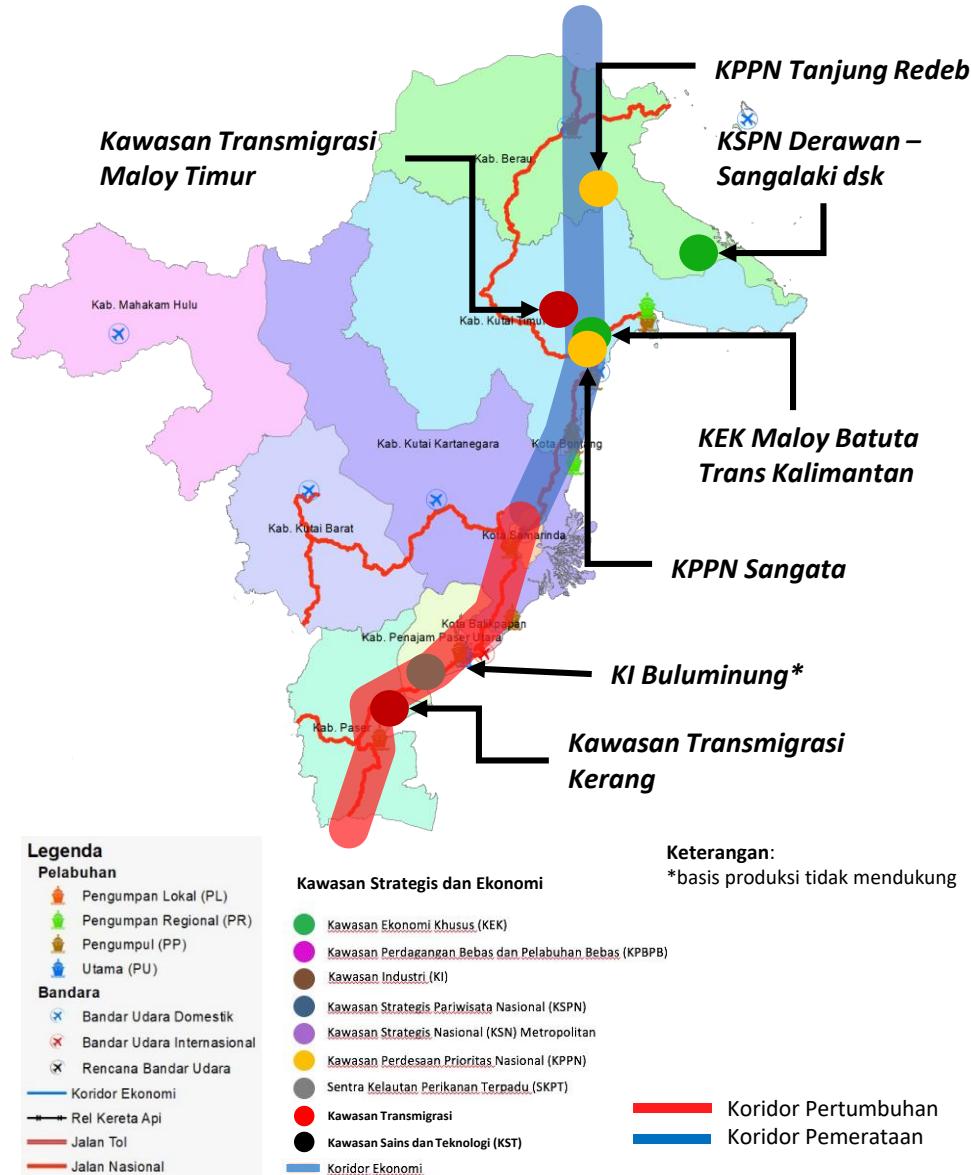
**) Industri besar dan menengah; ISIC 5;

Nilai tambah = upah + surplus usaha + pajak



INDIKATOR	2020	2024
LPE (%)	2,75	3,97
KEMISKINAN	5,58	4,24
PENGANGGURAN	6,35*	5,41
IPM	76,91	79,25
GINI RATIO	0,329	
CAPAIAN SPM	62,84	100,00
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Trilyun)	1050-1480 (Total 2020-2024)	

STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



1. Mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit dan lada;
2. Mengembangkan sentra-sentra produksi hilirisasi komoditas unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu kelapa sawit dan minyak bumi
3. Meningkatkan investasi pada KEK MBTK yang berbasis industri pengolahan kelapa sawit, kayu, energi dan logistik;
4. Menginisiasi pembangunan Kawasan Industri Buluminung yang fokus pada pengolahan kertas*;
5. Memperkuat KSPN Derawan - Sangalaki dan sekitarnya sebagai destinasi potensial;
6. Mengembangkan KPPN Sangata sebagai penghasil komoditas beras organik melalui upaya hilirisasi industri untuk menggerakkan ekonomi lokal dan KPPN Tanjung Redeb sebagai penghasil komoditas perikanan melalui upaya hilirisasi industri dan desa wisata untuk mendukung KSPN Derawan dan sekitarnya;
7. Mempersiapkan Kawasan Transmigrasi Kerang sebagai kawasan penghasil komoditas kelapa sawit melalui upaya hilirisasi industri untuk mendukung KEK/KI MBTK dan KI Buluminung, serta mengembangkan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang sebagai kawasan penghasil komoditas padi melalui upaya peningkatan produksi dan desa wisata berbasis agrowisata sebagai destinasi wisata pendukung KSPN/DPP Derawang dan sekitarnya;
8. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Maloy Kaliorang di Kab.Kutai Timur, dan KPB Kerang Kab. Paser;
9. Membangun lokasi prioritas perbatasan di Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Berau; PKSN Long Apari;
10. Mempercepat pelaksanaan SPM.

SASARAN PEMBANGUNAN, POTENSI DAN KEUNGGULAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BASIS KOMODITAS *)

Perikanan Budidaya

INDUSTRI DENGAN NILAI TAMBAH YANG BESAR **)

Industri kayu lapis; Industri kimia dasar organik lainnya; Industri pembekuan biota air lainnya; Industri minyak makan kelapa sawit; Industri pencetakan umum

Keterangan:

*) angka dalam kurung menunjukkan peran wilayah dalam total produksi nasional

**) Industri besar dan menengah; ISIC 5;

Nilai tambah = upah + surplus usaha + pajak

***) Angka sementara hasil kesepakatan dengan Bappeda Provinsi tanggal 22-23 April 2019

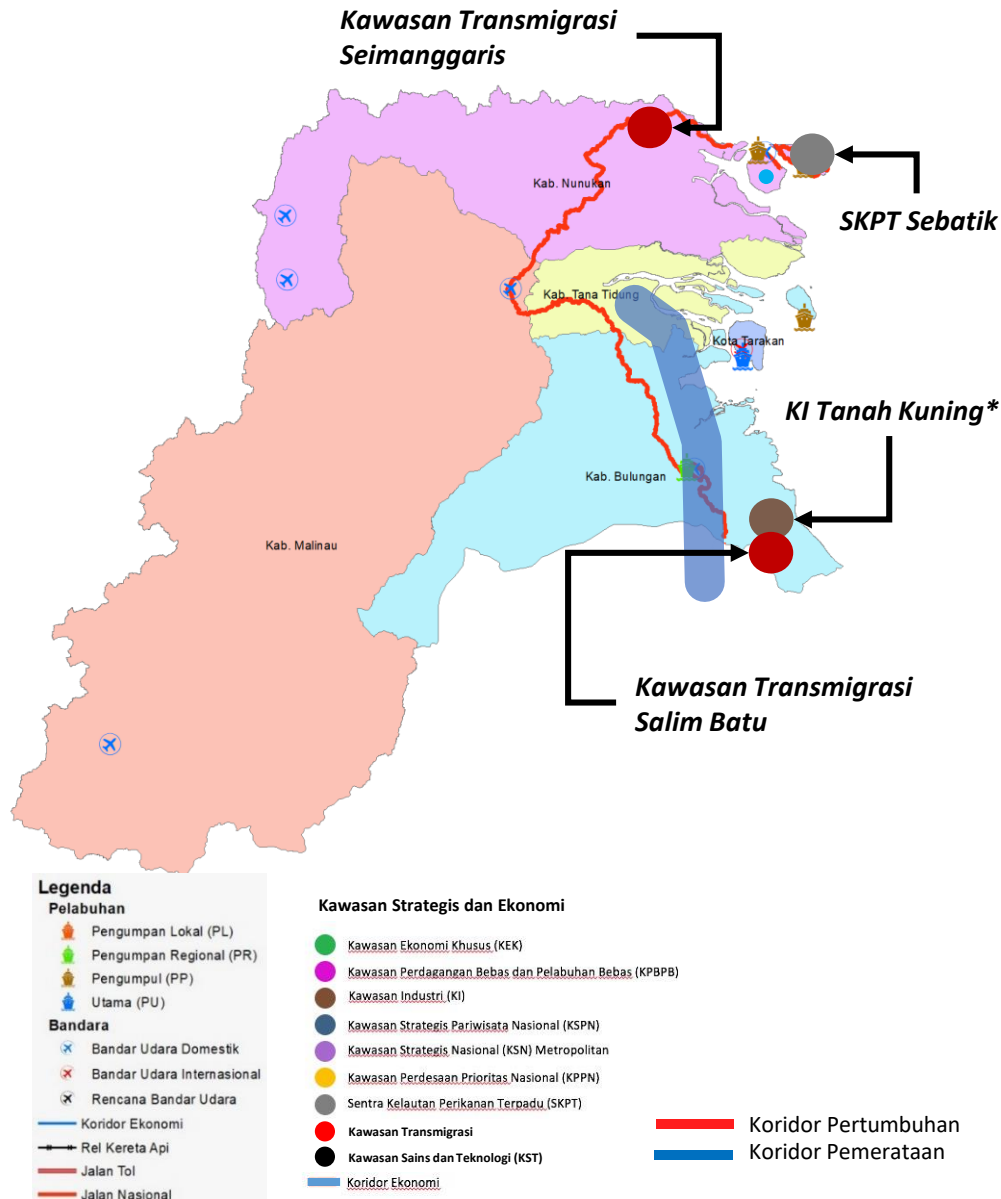
****) Angka sementara hasil exercise per 22 Maret 2019

*****) Angka sementara hasil exercise per 18 Maret 2019



INDIKATOR	2020	2024
LPE (%)	7,00	7,33
KEMISKINAN	5,85	4,44
PENGANGGURAN	4,60	3,88
IPM	71,29	73,71
GINI RATIO	0,299	
CAPAIAN SPM	62,84	100,00
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Trilyun)	250-340 (Total 2020-2024)	

STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



1. Mengembangkan komoditas unggulan yaitu perikanan budidaya dan sentra produksinya;
2. Menginisiasi pembangunan KI Tanah Kuning yang berbasis pengolahan logam*;
3. Mengembangkan SKPT Sebatik sebagai basis komoditas perikanan unggulan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Mengembangkan Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimanggaris sebagai kawasan penghasil komoditas kelapa sawit melalui upaya hilirisasi industri kecil menengah;
5. Mendorong pengembangan kawasan koridor perkotaan baru Tarakan-Tanjung Selor
6. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Salim Batu (Tanjung Buka) di Kab. Bulungan;
7. Membangun lokasi prioritas perbatasan di Kab. Malinau dan Nunukan; pengembangan PKSN Nunukan dan Long Nawang.
8. Memperbaiki konektivitas antar pusat-pusat komoditas unggulan;
9. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi antara Indonesia-Malaysia;
10. Melaksanakan percepatan pelaksanaan SPM.



Terima Kasih

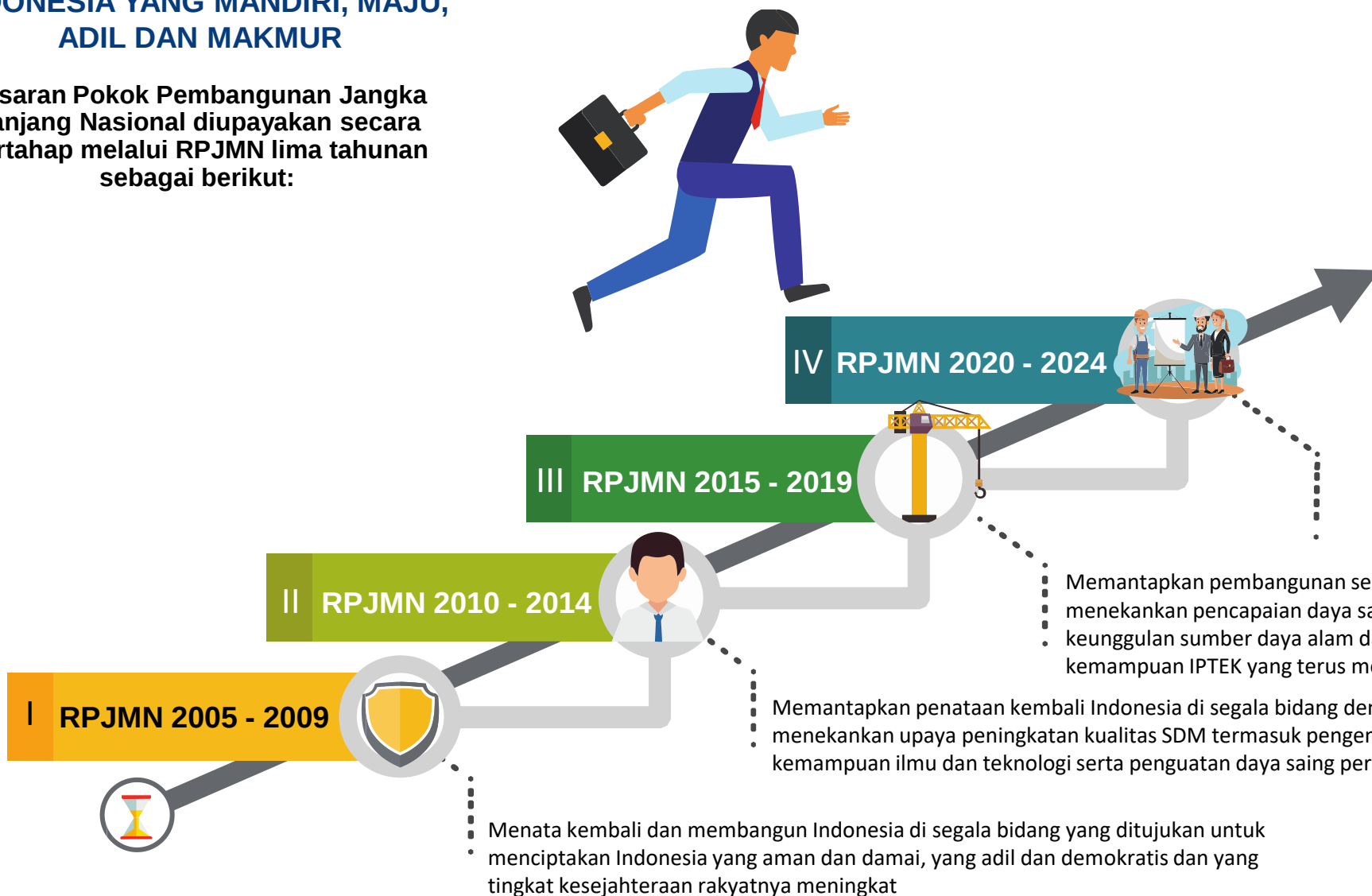


Lampiran

ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV)

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:



- TIGA KATA KUNCI:**
- Struktur Perekonomian yang Kokoh
 - Keunggulan Kompetitif Wilayah
 - SDM Berkualitas

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

POTENSI – JALUR TRANSPORTASI LAUT NASIONAL & INTERNASIONAL (*INTEGRATED PORT NETWORK*)

TOL LAUT adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari **Sumatera hingga ke Papua** dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.



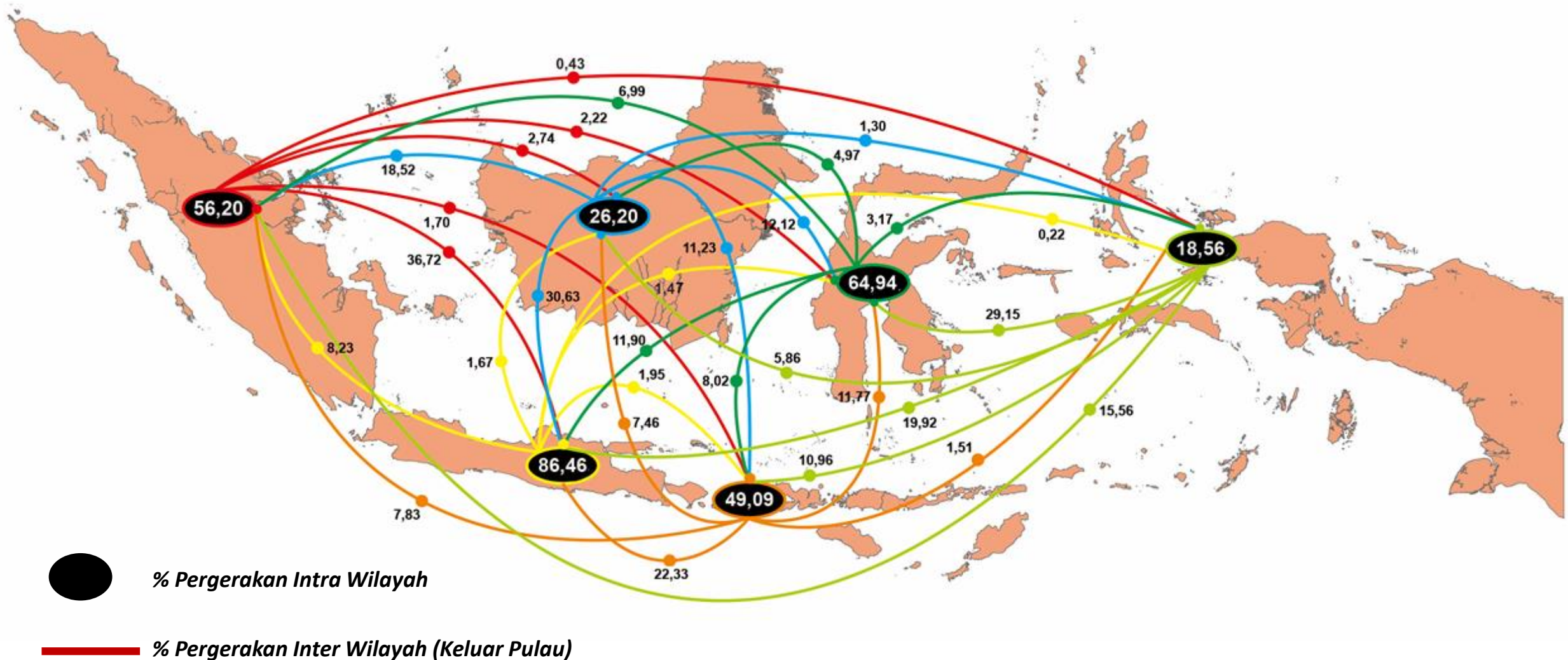
24 pelabuhan
104 kapal perintis

50 unit sarana kapal
penyeberangan perintis;

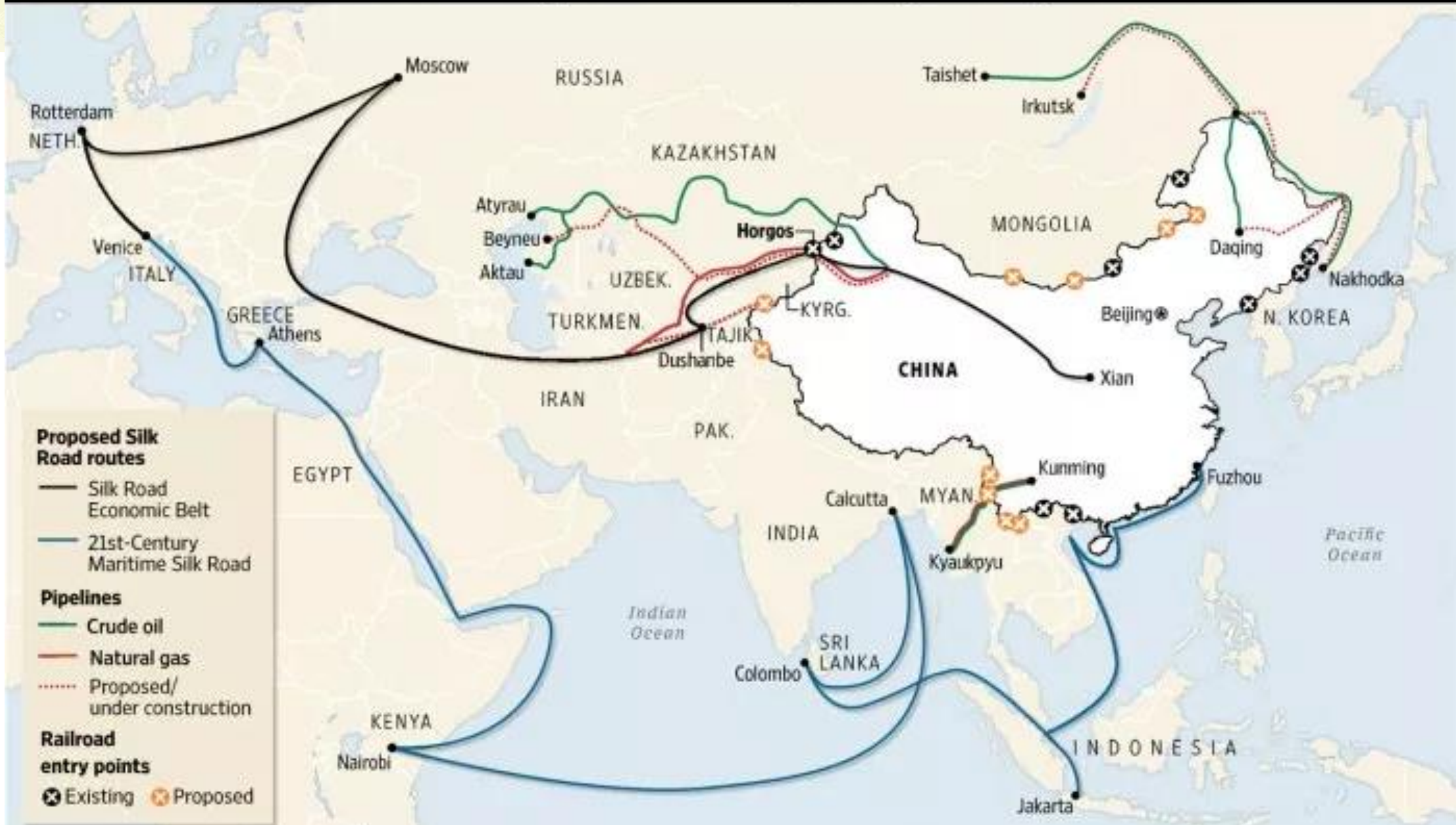
60 dermaga
penyeberangan

Industri
Maritim

POLA PERGERAKAN BARANG (OUTPUT) ANTAR WILAYAH (DALAM %)



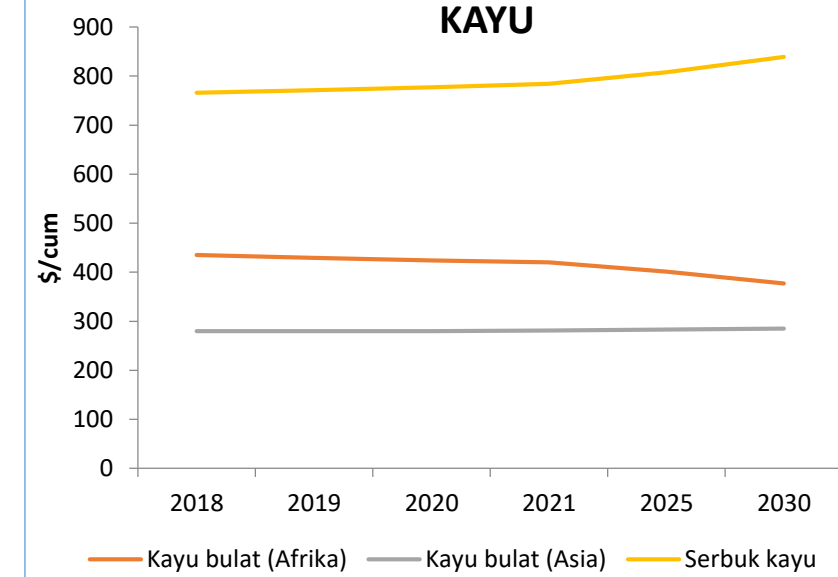
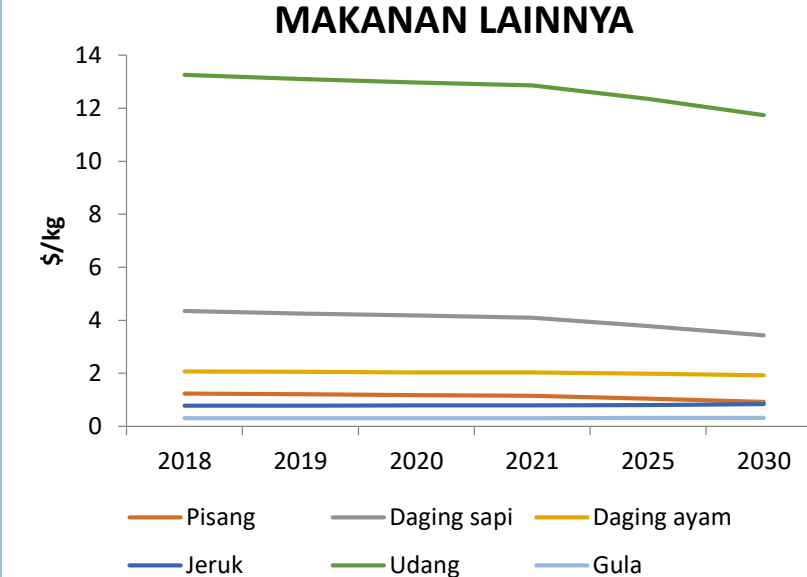
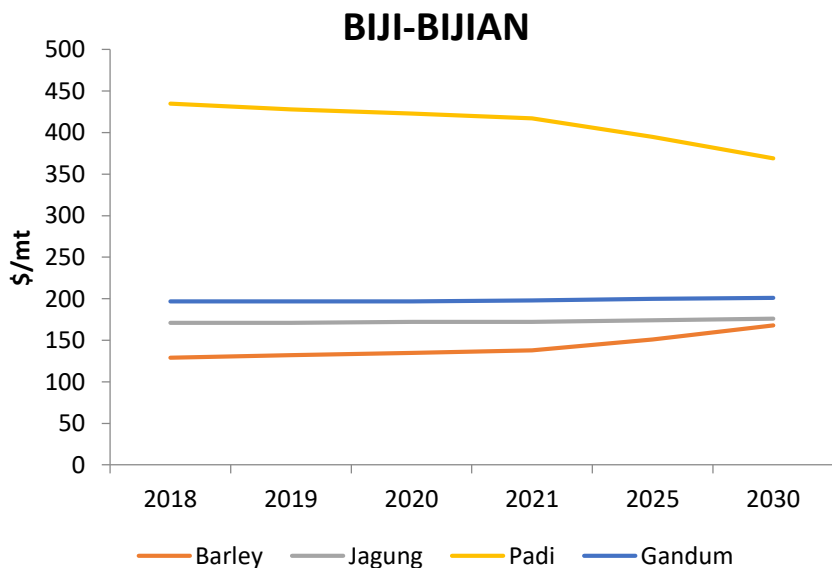
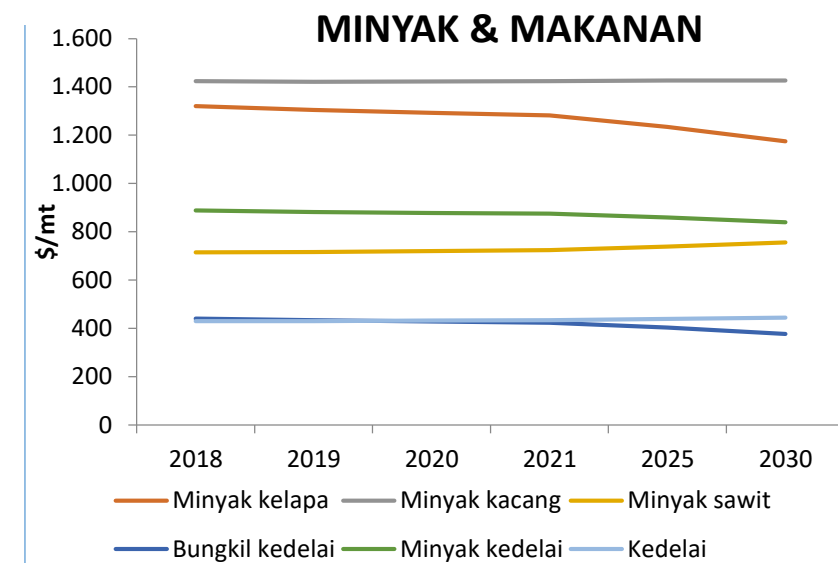
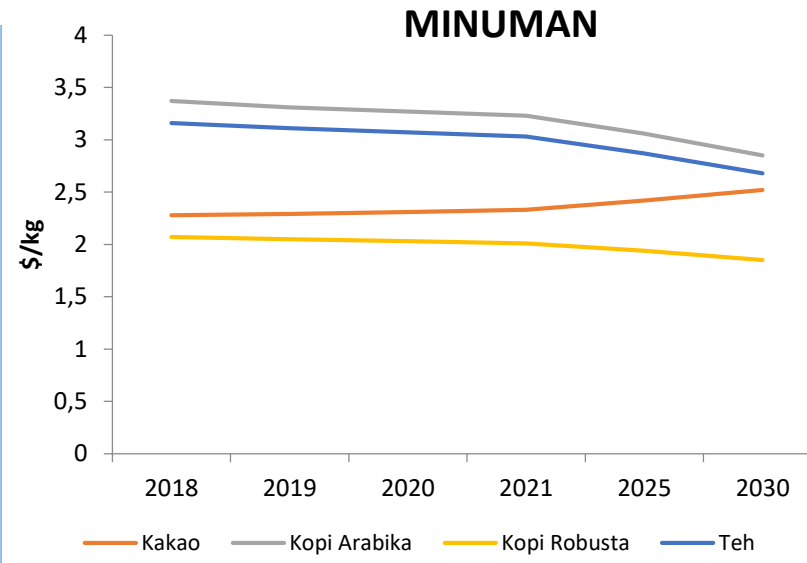
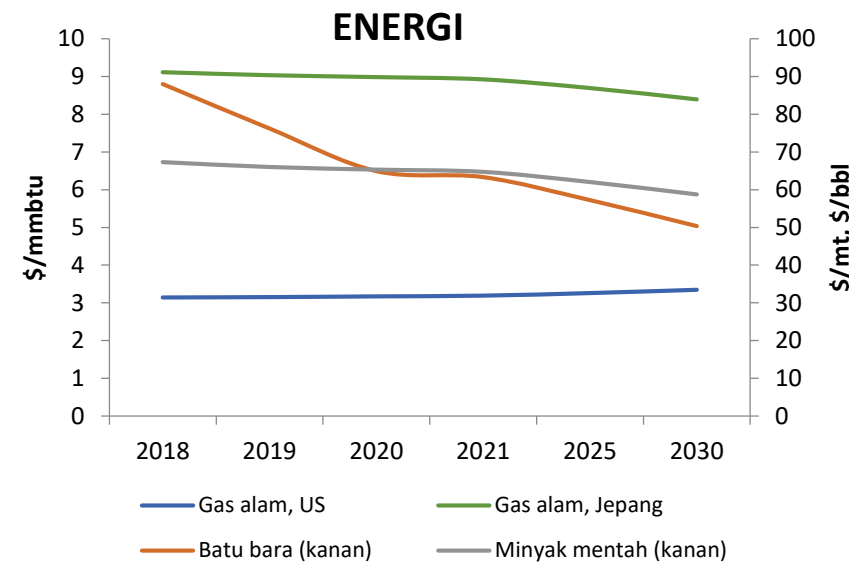
POTENSI - INISIATIF ONE BELT ONE ROAD



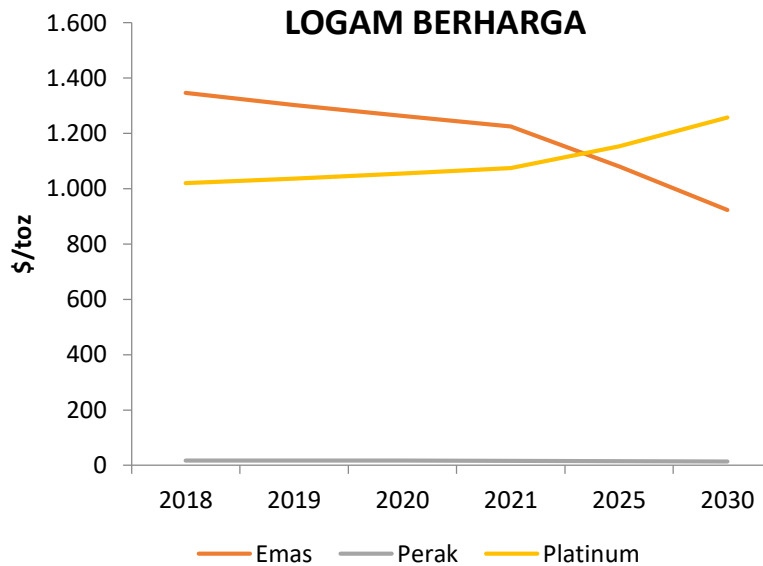
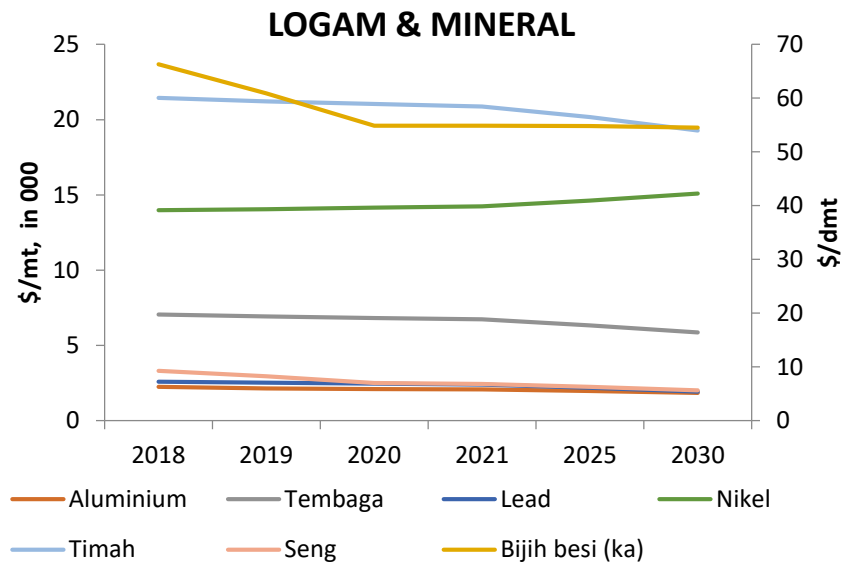
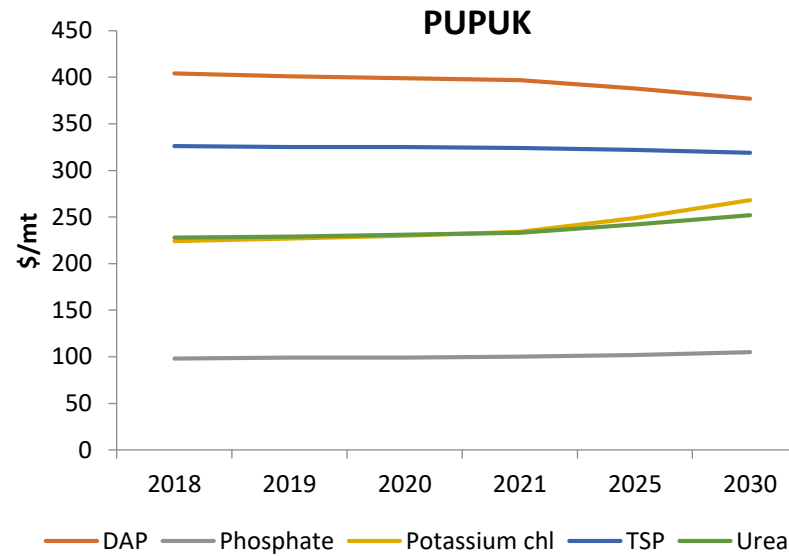
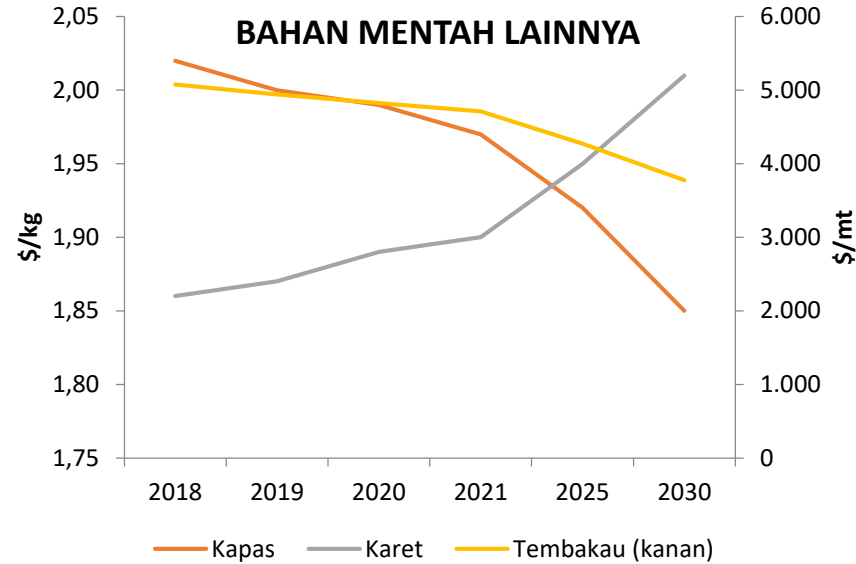
Sources: Xinhua (Silk Road routes); U.S. Department of Defense, Gazprom, Transneft (pipelines); United Nations (rail entry points)

The Wall Street Journal

POTENSI - PRAKIRAAN HARGA KOMODITAS



POTENSI - PRAKIRAAN HARGA KOMODITAS



Komoditas yang prospektif

gas alam, kakao, *groundnut oil*, minyak sawit, kedelai, jagung, daging ayam, gula, jeruk, serbuk kayu, karet, pupuk (kecuali DAP dan TSP), nikel, platinum.

Komoditas yang kurang prospektif

Minyak mentah, batubara, kopi, teh, minyak kelapa, minyak kedelai, beras, daging sapi, udang, kayu batangan, kapas, tembakau, pupuk DAP dan TSP, timah, tembaga, emas.



VISI 3 PRESIDEN:

“Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan...Memangkas Hambatan Investasi, Perizinan yang Lambat, Pungli...”



1 Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi

- Kegiatan terkait : Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional,
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Prov DKI, PTSP Kota Surabaya
- Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Daerah, Kemendagri



2 Fasilitas Kemudahan Usaha dan Investasi

- Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan DNI
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait yang sektornya masuk dalam DNI
- Kegiatan terkait : Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik PTSP daerah, Kemendagri
- Kegiatan terkait : Pemanfaatan tax holiday tax allowance
- K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, K/L terkait perizinan investasi



3 Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif

- Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan
- K/L terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kemendagri



VISI 4 PRESIDEN:

“Mereformasi Birokrasi...Reformasi Struktural Agar Lembaga Semakin Sederhana, Semakin *Simple*, Semakin Lincah, Mengubah *Mindset*,...Kecepatan Melayani, Kecepatan Memberi Izin...”



Arahan Presiden:

1. Penyederhaan perizinan
2. Penataan struktur kelembagaan birokrasi

Akar Permasalahan Pembangunan:

Iklm investasi dan ekspor yang belum kondusif disebabkan oleh regulasi dan kebijakan.



Hasil *Growth Diagnostic*:

Kualitas institusi rendah

1. Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
2. Lemahnya koordinasi antarkebijakan

Arah Kebijakan:



Penerapan *e-service* pada sektor pelayanan perizinan



Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perizinan



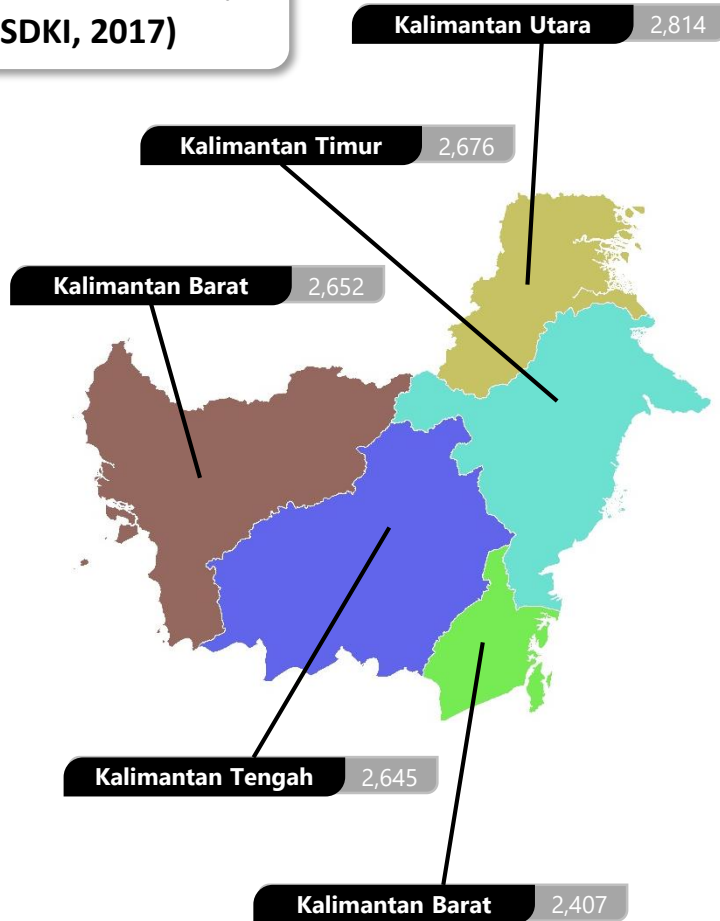
Pembangunan Zona Integritas pada unit pelayanan perizinan



Penataan koordinasi K/L yang menangani perizinan sektoral

PENANGANAN ISU KEPENDUDUKAN YANG TEPAT MENJADI KUNCI PENINGKATAN SDM

TFR Nasional: 2,4
(SDKI, 2017)

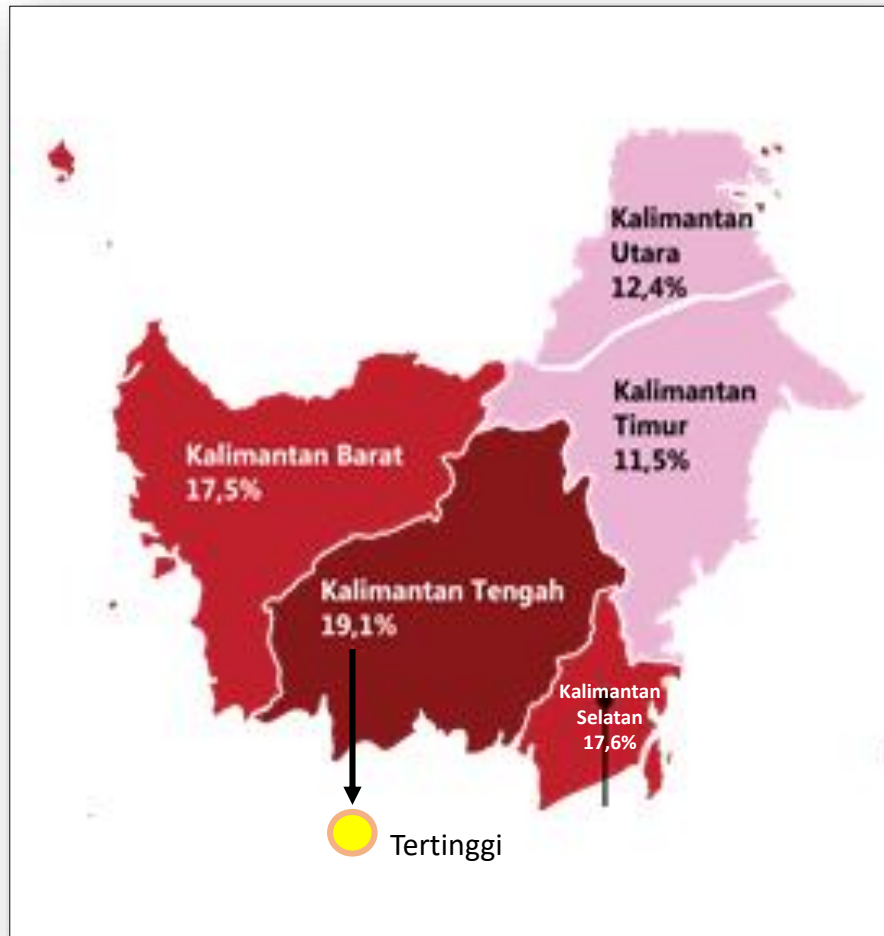


Semua provinsi di Kalimantan memiliki TFR di atas rata-rata nasional (TFR > 2,4), sehingga diperlukan strategi khusus yaitu:

- Pengembangan inovasi dalam Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan budaya, karakteristik, atau kondisi masyarakat lokal.
- Advokasi intensif kepada pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan.
- Peningkatan akses dan layanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas terutama bagi keluarga miskin.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang ditujukan untuk:

- Optimalisasi bonus demografi melalui peningkatan SDM, dengan menekankan membiasakan menabung dan berinvestasi.
- Memperpanjang bonus demografi melalui penyiapan penduduk lansia untuk tetap aktif dan produktif.



STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK :



PENINGKATAN LAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK

- Optimalisasi PIK-R, layanan kesehatan reproduksi remaja yang dicakup dalam Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja (PKPR) dan Bina Kesehatan Remaja (BKR)
- Layanan pendampingan bagi anak yang terlanjur menikah
- Pemberdayaan ekonomi keluarga
- Optimalisasi layanan dan konseling untuk orang tua (PUSPAGA)
- Penguatan bantuan Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Pintar



PENGUATAN KAPASITAS ANAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

- Akses pendidikan berkualitas dan wajib 12 tahun
- Peningkatan pengetahuan terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas
- Peningkatan pengetahuan terkait keterampilan hidup
- Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan
- Optimalisasi Pusat Kreativitas Anak
- Penguatan Forum Anak



PENINGKATAN PENGETAHUAN & KESADARAN ORANGTUA, KELUARGA, MASYARAKAT (SEKOLAH, PESANTREN, DAN OMS)

- Diseminasi informasi terkait hak anak dan risiko perkawinan anak
- Kampanye pencegahan perkawinan anak melalui sekolah, mimbar keagamaan, lembaga adat dan media massa



PENGUATAN KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN

- Penguatan kapasitas KUA dan peradilan agama
- Optimalisasi program bimbingan perkawinan (BIMWIN)
- Harmonisasi dan sinkronasi UU Perlindungan Anak dan perkawinan
- Advokasi pemberian sanksi hukum terhadap orang tua dan para pihak yang melakukan perkawinan anak
- Advokasi untuk perda-perda pencegahan perkawinan anak



PENGUATAN KOORDINASI & SINERGI LINTAS K/L, OMS, DU, MP & MEDIA

- Dokumentasi praktik baik pencegahan perkawinan anak di setiap tingkatan
- Penguatan Rakornas, Rakorda, dan lintas K/L
- Pembangunan alat monitoring dan evaluasi untuk pencegahan perkawinan anak di berbagai tingkatan
- Pembentukan Kelompok Kerja Lintas K/L/OPD untuk memantau, mengevaluasi, dan bersinergi program pencegahan perkawinan anak

- Persentase Perempuan 20 - 24 Tahun Yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2018
- Persentase perkawinan usia anak terendah di Pulau Kalimantan adalah **Provinsi Kalimantan Timur** sebesar **11,5 persen**
- Persentase perkawinan usia anak tertinggi di Pulau Kalimantan adalah **Provinsi Kalimantan Tengah** sebesar **19,1 persen**.